



**Transformasi Praktik Pemakaman di Tokyo sebagai Respon terhadap Gempa,
Perang, dan Pandemi serta Konsekuensinya terhadap Buddhisme**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (Strata 1)
Bahasa dan Kebudayaan Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Oleh:

Rahmalia Azzahra
NIM 13020221140079

PROGRAM STUDI S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2025

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Transformasi Praktik Pemakaman di Tokyo sebagai Respon terhadap Gempa, Perang, dan Pandemi serta Konsekuensinya terhadap Buddhisme”** ini disusun tanpa mengambil bahan hasil penelitian, baik untuk memperoleh gelar sarjana, diploma, atau magister dari universitas lain maupun penelitian lainnya. Penulis juga menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengambil bahan dari tulisan atau publikasi orang lain kecuali yang sudah disebutkan dalam rujukan dan daftar pustaka. Penulis bersedia menerima sanksi apabila terbukti melakukan plagiasi atau penjiplakan.

Semarang, 7 Agustus 2025

Penulis,



Rahmalia Azzahra

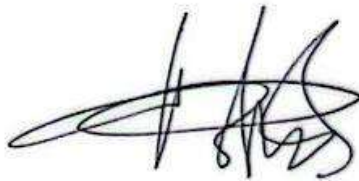
NIM.13020221140079

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Transformasi Praktik Pemakaman di Tokyo sebagai Respon terhadap Gempa, Perang, dan Pandemi serta Konsekuensinya terhadap Buddhisme”**, ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan kepada tim penguji pada tanggal 20 Agustus 2025.

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dewi Saraswati Sakariah S.S., M.Si.
NPPU H.7.199004022021042001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Transformasi Praktik Pemakaman di Tokyo sebagai Respon terhadap Gempa, Perang, dan Pandemi serta Konsekuensinya terhadap Buddhisme” ini telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Program Studi Strata 1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada tanggal 20 Agustus 2025.

Tim Penguji Skripsi

Ketua,

Dewi Saraswati Sakariah S.S., M.Si.
NPPU H.7.199004022021042001



Anggota I,

Ichlasul Ayyub S.S., M.Si.

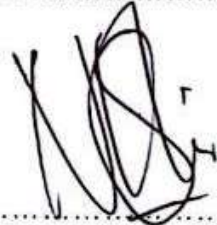
NPPU H.7.199401302023071001



Anggota II,

Nisia Nur Dwi Agusta S.Hum., M.Si.

NPPU H.7.199308152022042001



Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum.
NIP. 19721119198021002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”

-Samuel Beckett

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Skripsi ini penulis persembahkan khususnya untuk diri sendiri, juga kepada kedua orang tua, teman-teman, serta semua pihak yang senantiasa memberi dukungan selama proses penulisan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Transformasi Praktik Pemakaman di Tokyo sebagai Respon terhadap Gempa, Perang, dan Pandemi serta Konsekuensinya terhadap Buddhisme”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat agar memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak bantuan, dukungan, dan kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak. Tanpa dukungan mereka, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan rasa terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Alamsyah, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
2. Zaki Ainul Fadli, S., M. Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
3. Elizabeth I. H. A. N. Rini, S.S., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
4. Budi Mulyadi S.Pd., M,Hum., selaku dosen wali penulis sejak semester satu hingga penulis menyelesaikan akhir perkuliahan. Terima kasih atas arahan, dukungan, dan bimbingannya selama perkuliahan
5. Dewi Saraswati Sakariah S.S., M.Si., selaku dosen pembimbing, yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan, semangat, serta kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Seluruh Dosen dan karyawan Program Studi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan semangat, perhatian, kasih sayang, menjadi tempat berbagi cerita, serta menjadi sumber motivasi selama proses ini.

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat karunia nya penulis dapat mengerjakan skripsi dan dilancarkan proses pembuatan sampai akhir.
2. Orang tua penulis, bapak Sukri, S.Sos, M.H., dan Ibu Dra. Siti Nuralifah yang senantiasa memberikan dukungan doa, kasih sayang, motivasi, dan finansial, sehingga penulis dapat menempuh masa perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kakak dan adik penulis, Taufika Rahmana dan M. Aulia Sukri yang turut memberikan dukungan dan doa untuk penulis.
4. Sahabat Penulis, Roosy Nur Thahara yang telah berjuang dari awal masa perkuliahan hingga akhir. Teman-teman SMA yang sekarang sedang meniti karir masing-masing, Rifdah Husna, Saffanah Haura, Fadila Nadifa, Nayla Hana, dan Kanaya Aliyanadira. Teman-teman yang menjadi *support system*, Eunice Fastin dan Natasha Gunsaputri. Teman-teman seperjuangan Leo, Ardan, Dhevan,

Armand, dan Zahra. Serta teman-teman lain yang tidak tersebut namanya. Terima kasih karena selalu ada dan mewarnai masa perkuliahan penulis.

5. Terakhir, untuk diri sendiri, terima kasih telah berjuang dan pantang menyerah dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini mencapai titik akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Meski demikian, besar harapan penulis agar karya ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan studi kebudayaan Jepang.

Semarang, 7 Agustus 2025

Penulis.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rahmalia'.

Rahmalia Azzahra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	X
INTISARI	XI
ABSTRACT	XII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	10
1.7 Sistematika Penelitian	10
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Teori Konsekuensi Modernitas Anthony Giddens	18
1. Time-Space Distanciation (Pemisahan Ruang dan Waktu).....	21
2. <i>Disembedding</i> (Pelepasan Konteks Tradisional).....	22
3. Reflexivity (Refleksivitas Sosial).....	23
2.3 Praktik pemakaman Tradisional Jepang	24
BAB III	28
PEMBAHASAN.....	28
3.1 Praktik Pemakaman Pasca Gempa Kanto (1923)	32
3.1.1 Kebijakan Yamamoto Tahun 1923	35
3.1.2 Rekonstruksi Kota Tokyo Pasca Gempa Kanto 1923	44

3.2	Praktik Pemakaman Pasca Perang Dunia Kedua (1939-1945).....	55
3.2.1	Tokyo Air Raid Maret 1945	61
3.2.2	Perkembangan Industri Pemakaman pasca Perang Dunia II (1945-1991) ..	72
3.3	Praktik Pemakaman Pasca Pandemi Covid-19 (2020-Sekarang)	80
3.3.1	Kebijakan Pemerintah Terhadap Pandemi Covid-19	85
3.3.2	Adaptasi Industri Pemakaman Terhadap Pandemi Covid-19.....	92
BAB IV.....		103
KESIMPULAN		103
要旨		104
DAFTAR PUSTAKA.....		108
DATA PRIBADI.....		115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bentuk Kuburan di era Modern Berupa Nisan Keluarga	3
Gambar 2. Lokasi dan Jumlah Populasi Evakuasi Utama di Kota Tokyo.....	33
Gambar 3. Dokumen Keputusan kabinet No.143, 4 September 1923.....	35
Gambar 4. Tumpukan jenazah di lokasi gudang pakaian Honjo	38
Gambar 5. Tumpukan abu jenazah pasca kremasi di lokasi gudang pakaian Honjo.....	40
Gambar 6. Seorang biksu Buddha memanjatkan doa kepada arwah.....	42
Gambar 7. Sisa-sisa jenazah yang terpisah dari bekas gudang pakaian Honjo	43
Gambar 8. Draf dekrit kekaisaran yang disetujui oleh Kabinet	45
Gambar 9. Referensi gambaran fasilitas osuarium khusus korban bencana.....	49
Gambar 10. Gedung Peringatan Lokasi Bencana Gempa Bumi Honjo Hifukusho.....	52
Gambar 11. Interior dalam osuarium tempat abu jenazah gempa kanto	53
Gambar 12. Gedung Peringatan Lokasi Bencana Gempa Bumi Honjo Hifukusho.....	54
Gambar 13. Setelah menandatangani Pakta Tripartit pada tanggal 27 September 1940.....	56
Gambar 14. Foto Menteri Luar Negeri Jepang diatas kapal U.S.S	59
Gambar 15. Reskrip Kekaisaran asli tentang Pengakhiran Perang	60
Gambar 16. Kepadatan penduduk kota Tokyo tahun 1940	63
Gambar 17. Foto Dampak serangan udara Tokyo pada tahun 1945	66
Gambar 18. Tama Bochi (多磨墓地)	70
Gambar 19. Katalog Pertama perusahaan pemakaman Koekisha	74
Gambar 20. Video Dokumenter berjudul <i>When I Die</i>	79
Gambar 21 Tabel Distribusi Kematian di Tokyo.	82
Gambar 22. Dokumenter singkat berjudul terkait pandemi	83
Gambar 23. Survei oleh Kamakura Shinsho pada tahun 2020	89
Gambar 24. Layanan pemakaman <i>virtual</i> oleh perusahaan pemakaman Koekisha	90
Gambar 25. Pengelolaan pemakaman masa Pandemi Covid-19	94
Gambar 26. Layanan pemakaman <i>Drive-thru</i>	95
Gambar 27. Diagram hasil survei Kamakura Shinsho	97

INTISARI

Penelitian ini membahas transformasi praktik pemakaman di Tokyo sebagai respons terhadap tiga peristiwa besar: Gempa Besar Kanto (1923), Perang Dunia II (1945), dan pandemi Covid-19 (2020). Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana ketiga peristiwa tersebut memengaruhi praktik pemakaman serta konsekuensinya terhadap unsur religius, khususnya ajaran Buddhisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sistem pemakaman dalam aspek teknologi dan religi serta mengkaji bentuk adaptasi masyarakat terhadap krisis sosial dan modernitas.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada praktik pemakaman Buddhis di wilayah urban Jepang, khususnya Tokyo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan dari arsip pemerintah Jepang, media elektronik, situs perusahaan pemakaman, serta dokumenter terkait praktik pemakaman selama pandemi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemakaman di Tokyo mengalami pergeseran dari sistem yang bersifat religius dan kolektif menjadi lebih sekuler dan individualis. Transformasi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, demografis, serta perkembangan teknologi. Munculnya layanan pemakaman virtual menjadi salah satu indikator penting perubahan tersebut. Studi ini juga menyoroti bagaimana ajaran Buddha mengalami penyesuaian nilai agar tetap relevan dalam masyarakat Jepang kontemporer.

Kata Kunci: pemakaman, Jepang, modernitas, Buddhisme, transformasi sosial

ABSTRACT

This study examines the transformation of funeral practices in Tokyo in response to three major events: the Great Kanto Earthquake (1923), World War II (1945), and the Covid-19 pandemic (2020). The main issue raised is how these three events have influenced funeral practices and their consequences for religious elements, particularly Buddhist teachings. This study aims to analyze changes in funeral systems in terms of technology and religion, as well as to examine how society adapts to social crises and modernity.

The scope of this research is focused on Buddhist funeral practices in urban areas of Japan, particularly Tokyo, and does not cover in depth funerals in rural areas or among minority groups. The method used is descriptive qualitative with a literature review approach. Data was collected from Japanese government archives, electronic media, funeral company websites, and documentaries related to funeral practices during the pandemic.

The results of the study indicate that funeral practices in Tokyo have shifted from a religious and collective system to a more secular and individualistic one. This transformation is influenced by economic, demographic, and technological developments. The emergence of virtual funeral services is one of the key indicators of this change. The study also highlights how Buddhist teachings have undergone value adjustments to remain relevant in contemporary Japanese society.

***Keyword:* funeral, Japan, modernity, buddhism, social transform**

BAB I

PENDAHULUAN

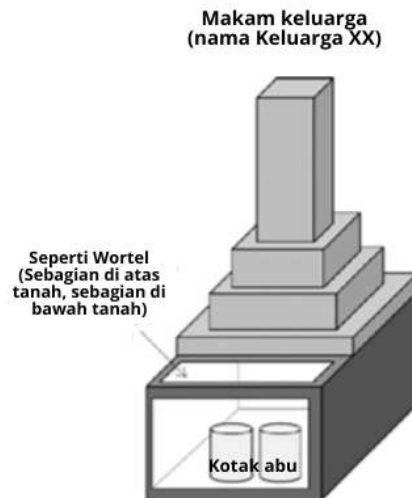
1.1 Latar Belakang

Kematian bukan hanya peristiwa biologis tetapi juga peristiwa yang mempengaruhi aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam bahasa Jepang, kematian disebut *Shikyo* (死去), *Shi* (死), atau *Osho* (往生). *Shi* yang berarti kematian, dan *Osho* dalam ajaran Buddhisme yang merujuk pada kehidupan pasca kematian. Sejak ratusan tahun yang lalu, kematian di Jepang terikat pada pengaruh Shinto dan khususnya Buddha. Jika dilihat pada zaman Kofun (sekitar abad ke-4 M), Jepang memiliki sistem pemakaman monumental berupa gundukan makam besar yang disebut dengan *Kofun*. Bentuk dan ukuran Kofun menandai hierarki sosial di masyarakat pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, pemakaman tradisional ini bertransformasi dan sistem pemakaman dengan praktik kremasi telah menjadi pilihan yang umum di masyarakat.

Jepang saat ini merupakan negara dengan angka kremasi nomor satu di dunia, mencapai 99,97% pada tahun 2025, dikutip dari situs *World Population Review* (World Population Review, 2025). Praktik ini berakar dari ritus Buddhisme yang masuk ke Jepang sekitar abad ke-4 M. Namun, praktik ini tidak langsung diterima oleh masyarakat Jepang. Berdasarkan sejarah, praktik ini mengalami penolakan dari beberapa pihak, khususnya pada awal masa restorasi Meiji. Menurut Bernstein, pada tahun 1873, pemerintah Jepang melarang praktik kremasi seiring dengan munculnya komunitas *anti-buddhism* untuk mengurangi dominasi kuil buddha, mereka merasa bahwa praktik

kremasi tidak sesuai dengan adab atau *bunmei*. Dua tahun setelahnya, Pemerintah Jepang melegalkan kembali praktik kremasi secara resmi pada bulan Juli tahun 1875. Meskipun pada awalnya terbatas dikalangan pejabat saja, secara bertahap praktik kremasi mulai meluas ke masyarakat umum (Bernstein, hlm. 304-331, 2000). Sejak dilegalkan kembali, praktik kremasi di Jepang menjadi pilihan utama dalam pemakaman Jepang. Namun, dalam perkembangannya, praktik ini juga mengalami pergeseran nilai dari yang terikat dengan spiritualitas menjadi lebih sekuler dan praktis.

Secara historis, pemakaman di Jepang terikat pada ajaran Buddhisme, di mana ritual pemakaman melibatkan biksu Buddha, sutra dan serangkaian ritus yang berlangsung bahkan pasca kematian. Namun, dinamika urbanisasi yang terjadi dengan cepat, perubahan demografi akibat dari menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya populasi lansia, serta keterbatasan ruang di kota besar seperti Tokyo, mulai mengguncang fondasi tradisi tersebut. Situasi ini menimbulkan ketidakselarasan antara praktik lama yang bersifat kultural dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut efektivitas, fleksibilitas, dan individualisasi. Pergeseran ini kemudian dapat menunjukkan bagaimana modernitas memengaruhi aspek-aspek paling intim dalam kehidupan manusia, termasuk cara mereka menghadapi kematian.



Gambar 1 Bentuk Kuburan di era Modern Berupa Nisan Keluarga

Sumber : digambar oleh Toishiba Shiso dalam *Kantōdaishinsai to ihai nōkotsu-dō haka*

Transformasi praktik pemakaman di Jepang tidak serta-merta meniadakan tradisi sebelumnya, melainkan memunculkan bentuk baru yang berkolaborasi dengan nilai-nilai kultural yang ada. Salah satu wujudnya adalah pemakaman keluarga seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Bentuk pemakaman ini mulai menguat sejak era Meiji terutama di wilayah pedesaan atau pinggiran kota pasca bencana Gempa Kanto (1923). Menurut Shiho, pasca Gempa Kanto pemerintah memberikan mandat untuk memindahkan kuil dan lahan pemakaman ke pinggiran kota dan daerah pedesaan (Shiho, hlm. 26, 2023). Bentuk makam keluarga ini kemudian memperlihatkan bagaimana masyarakat berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan modernitas dengan ikatan tradisi yang masih dianggap penting.

Dalam konteks ini, terdapat peristiwa-peristiwa krisis yang secara signifikan mempercepat perubahan praktik pemakaman khususnya di daerah urban seperti Tokyo.

Peristiwa-peristiwa tersebut adalah Gempa Kanto (1923), Perang Dunia II (1945), dan pandemi Covid-19. Ketiga peristiwa ini kemudian menjadi titik balik penting karena memaksa masyarakat untuk merefleksikan kembali cara menghadapi kematian di tengah keterbatasan ruang, infrastruktur, dan kondisi sosial-ekonomi. Terlepas dari tingginya angka kematian yang disebabkan oleh ketiga peristiwa ini, peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bagaimana bencana alam, perang, dan wabah dapat menjadi pendorong modernisasi ritual pemakaman dari yang pada mulanya bersifat komunal dan berlandaskan atas kepercayaan, menuju bentuk yang lebih rasional, individualis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini juga di singgung oleh Suzuki, bahwa keterbatasan ruang mendorong masyarakat untuk menyederhanakan dan beradaptasi dengan lingkungannya (Suzuki, hlm. 65, 2003). Pada dunia yang dewasa ini ditandai dengan meningkatnya dominasi pada sistem jasa pemakaman modern.

Dengan adanya peristiwa-peristiwa besar seperti Gempa kanto (1923), Perang Dunia II (1945), dan pandemi Covid-19 (2020), masyarakat Jepang berangsur angsur mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Seperti bagaimana Gempa Kanto memperkuat pelaksanaan praktik kremasi di Jepang. Hal ini disinggung oleh Picone, bahwa Gempa Kanto memiliki peran besar yang memperkuat praktik kremasi dalam skala nasional (Picone, hlm. 135, 2007). Selanjutnya, pasca Perang Dunia II, di mana Jepang mengalami krisis sosial dan keterbatasan lahan, masyarakat Jepang mulai mengambil tindakan reflektif seiring dengan berkembangnya industri pemakaman di Jepang. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi pada praktik pemakaman yang menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Jepang dalam menghadapi pembatasan

sosial. Menurut Gould dkk., Penggunaan teknologi menjadi solusi dari tantangan sosial era kontemporer (Gould dkk., hlm. 606, 2021). Munculnya layanan *virtual* yang ditawarkan oleh industri pemakaman pada masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu bukti bahwa praktik pemakaman di Jepang bertransformasi sesuai dengan zamannya. Berdasarkan teori budaya Koentjaraningrat, transformasi sistem peralatan dan teknologi merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap lingkungan sosialnya (Koentjaraningrat, hlm. 31, 2009). Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai cerminan transformasi dari sistem pemakaman di Jepang.

Meskipun demikian, tanpa disadari teknologi juga turut menggeser unsur-unsur religi dalam praktik pemakaman. Praktik pemakaman tradisional yang dulunya berkaitan erat dengan sistem kepercayaan tradisional, saat ini berubah menjadi lebih sekuler. Menurut Yamanaka, praktik pemakaman di Jepang yang mulanya beriringan dengan kuil Buddha, kini menjadi pilihan individu. nilai agama tidak sepenuhnya hilang, namun digunakan sesuai kebutuhan (Yamanaka, hlm. 369, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa, spiritualitas tidak lagi menjadi acuan utama dalam praktik pemakaman, namun hanya sebatas opsi apabila memungkinkan. Pergeseran nilai ini sejalan dengan teori sekularisasi Peter L. Berger, yang menjelaskan bahwa krisis sosial dapat mempercepat pergeseran nilai agama menuju sistem yang lebih fungsional (Berger & Georgetown University, hlm.13, 2008). Hal ini, menandakan bahwa praktik pemakaman di Jepang mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih sekuler dan individualis, sejalan dengan karakter masyarakat Jepang kontemporer.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis tertarik untuk mendalami transformasi sistem pemakaman yang tercipta pasca peristiwa-peristiwa besar di Jepang. Transformasi ini akan dilihat dari dua aspek, yakni pengaplikasian teknologi dan dampak terhadap nilai spiritualitasnya, dengan pertimbangan kedua unsur budaya tersebut lah yang menunjukkan pergeseran cukup signifikan pasca peristiwa-peristiwa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, pokok permasalahan pada penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana praktik pemakaman di Tokyo bertransformasi pasca Gempa Besar Kanto (1923), Perang Dunia II (1945), dan pandemi Covid-19 (2020) serta konsekuensinya terhadap unsur-unsur yang terkait dengan sistem kepercayaan yakni ajaran Buddhisme?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis transformasi praktik pemakaman di Tokyo yang terjadi pasca Gempa Besar Kanto (1923), Perang Dunia II (1945), dan pandemi Covid-19 (2020) serta konsekuensinya terhadap unsur-unsur yang terkait dengan sistem kepercayaan yakni ajaran Buddhisme.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini melihat perkembangan dengan acuan tiga periode bencana besar yang terjadi di Tokyo yaitu Gempa Kanto (1923), Perang Dunia II (1945), dan pandemi Covid-19 (2020). Penelitian ini akan berfokus pada transformasi praktik pemakaman di Tokyo pasca Gempa Besar Kanto (1923), Perang Dunia II (1945), dan pandemi Covid-19 (2020) dan dampak modernisasi terhadap pergeseran sistem kepercayaan dan spiritual dalam praktik pemakaman di Tokyo dalam hal ini ajaran Buddha. Ketiga peristiwa ini memiliki peran penting terhadap transformasi praktik pemakaman. Gempa Kanto 1923 mendorong munculnya efisiensi tata kota Tokyo, sementara Perang Dunia II mendorong perkembangan penyedia layanan pemakaman atau *Sougisha*, dan Pandemi Covid-19 kemudian mempercepat penggunaan teknologi. Ketiga peristiwa ini menjadi tolak ukur perkembangan praktik pemakaman di Jepang khususnya daerah urban seperti Tokyo.

Penelitian ini akan memfokuskan praktik pemakaman dalam ajaran Buddha di daerah Tokyo. Penelitian ini tidak secara mendalam membahas praktik pemakaman di daerah rural, praktik pemakaman non-Buddhis atau minoritas, atau perspektif gender secara spesifik.

Dalam konteks praktik pemakaman, penelitian ini menggunakan istilah *Sousai* (葬祭) yang secara harfiah merujuk pada praktik pemakaman dan ritual terkait. Tidak hanya upacara pemakaman itu sendiri, tetapi juga tahapan pasca pemakaman seperti peringatan dan penghormatan kepada leluhur atau *Hotoke* (仏).

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena tidak semua data pribadi korban, seperti latar belakang sosial, agama, atau kondisi ekonomi, dapat diakses secara lengkap, sehingga analisis yang dilakukan masih terbatas pada informasi umum yang tersedia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menggali fenomena secara mendalam dan kontekstual. Menurut Creswell, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada deskripsi mendalam dan komprehensif tentang fenomena atau peristiwa dalam konteks alami dengan variabel yakni catatan observasi, transkrip, wawancara, teks sastra, berita acara, catatan sejarah, memo, dan film dokumenter (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kepustakaan terkait sejarah sosial untuk mengkaji konteks transformasi kebudayaan yang berlangsung dari masa ke masa. Menurut Hart, studi pustaka adalah sebuah proses tinjauan kritis dan sistematis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran lengkap terkait pengetahuan yang sudah ada, mengidentifikasi kesenjangan, serta membangun landasan teoritis dan metodologis yang kuat untuk penelitian (Hart, 1998). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur yang bersumber dari data sekunder yang merujuk pada arsip sejarah seperti dokumen resmi pemerintah Jepang melalui situs resmi pemerintah Jepang yang menyediakan arsip peraturan perundang-undangan Jepang yang dapat diakses E-Gov Japan melalui *www.laws.e-gov.go.jp* dan National Diet Library

melalui situs www.ndlsearch.ndl.go.jp, situs resmi pemerintah Jepang yang menyediakan informasi terkait penanggulangan bencana melalui situs www.bousai.go.jp, situs resmi Kemeterian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan sosial Jepang melalui situs www.mhlw.go.jp, arsip nasional Jepang yang dapat diakses melalui www.archives.go.jp dan www.digital.archieves.go.jp, koran media elektronik NHK dan Asahi Global yang diakses melalui situs www2.nhk.or.jp dan www.globe.asahi.com, situs resmi perusahaan pemakaman Kamakura Shinsho dan Sun Holding yang dapat diakses melalui www.kamakura-net.co.jp dan www.sunholdings.net , serta video dokumenter di Youtube yang berkaitan dengan pemakaman pada masa pandemi Covid-19 (2020).

Selain itu, Data penelitian ini juga ditunjang oleh beberapa buku, dan artikel jurnal yang membahas dampak dari peristiwa Gempa Kanto (1923), Perang Dunia II (1945), dan Pandemi Covid-19 (2020) terhadap praktik pemakaman di Jepang.

Analisis data dilakukan dengan mendalami bagaimana transformasi praktik pemakaman di Jepang pasca peristiwa-peristiwa besar tersebut terhadap transformasi praktik pemakaman di Jepang dan konsekuensi modernisasi terhadap pergeseran sistem kepercayaan dan spirtual dalam praktik pemakaman di Jepang.

Untuk menunjang proses interpretasi, penelitian ini menggunakan teori Konsekuensi Modernitas oleh Anthony Giddens (1990) dengan buku *The Consequences of Modernity*, sebagai landasan teoritis utama.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu bahasa dan kebudayaan Jepang pada kajian mengenai transformasi praktik pemakaman dan konsekuensinya terhadap sistem kepercayaan di Jepang. Selain itu, memberikan referensi bagi penelitian serupa di bidang Budaya Jepang, agama, sekularisasi, dan transformasi budaya.

Sementara manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang cara masyarakat Jepang menghadapi perubahan sosial melalui praktik pemakaman dan acuan dalam memahami respon masyarakat modern terhadap bencana.

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan proses pengerjaan penelitian sekaligus pembacaan laporan hasil penelitian, maka diperlukan rumusan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Dalam bab ini membahas terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II. Kajian Pustaka. Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab ini berisi: Penelitian terdahulu, dengan judul *Changing Funerals and Their Effects on Bereavement Grief in Japan* (2023) yang ditulis oleh Megumi Kondo-Arita & Carl B. Becker, *Religion Overcoming Religions: Suffering, Secularism, and the Training*

of Interfaith Chaplains in Japan (2018) yang ditulis oleh Michael Berman, *The Transition of Japanese Funeral Ceremony: Cultural and Business Perspective* (2017) ditulis oleh Hariyadi Budi Susanto, *Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Terhadap Munculnya Risiko Individualisme di Masa Pandemi Covid-19* (2023) yang ditulis oleh Sirah Robitha Maula dkk., dan *Globalizing Impact of Modernity in Africa* (2017) yang ditulis oleh Ibrahim S. Bitrus.

Bab III. Pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil dari permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana Transformasi Praktik Pemakaman di Jepang dalam Respon terhadap Krisis Sosial Gempa Perang dan Pandemi dan serta konsekuensinya terhadap sistem Agama dalam praktik Pemakaman di Jepang.

Bab IV Simpulan. Adalah bagian penutup penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lima penelitian terdahulu judul *Changing Funerals and Their Effects on Bereavement Grief in Japan* (2023) yang ditulis oleh Megumi Kondo-Arita & Carl B. Becker, *Religion Overcoming Religions: Suffering, Secularism, and the Training of Interfaith Chaplains in Japan* (2018) yang ditulis oleh Michael Berman, *The Transition of Japanese Funeral Ceremony: Cultural and Business Perspective* (2017) ditulis oleh Hariyadi Budi Susanto, *Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Terhadap Munculnya Risiko Individualisme di Masa Pandemi Covid-19* (2023) yang ditulis oleh Sirah Robitha Maula dkk., dan *Globalizing Impact of Modernity in Africa* (2017) yang ditulis oleh Ibrahim S. Bitrus.

Penelitian ini menggunakan Teori Konsekuensi Modernitas oleh Anthony Giddens.

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam meneliti Transformasi Praktik Pemakaman di Jepang dalam Respon terhadap Krisis Sosial Gempa Perang dan Pandemi, peneliti menggunakan lima penelitian terdahulu. Berikut contoh penelitian terdahulu mengenai tema yang sama namun memiliki objek kajian yang berbeda.

Penelitian terdahulu artikel jurnal oleh Megumi Kondo-Arita & Carl B. Becker (2023) yang berjudul *Changing Funerals and Their Effects on Bereavement Grief in*

Japan. Penelitian Kondo-Arita & Becker menggambarkan transformasi signifikan dalam praktik pemakaman di Jepang yang dipengaruhi oleh modernitas dan pandemi COVID-19, dengan dampak nyata pada pengalaman berduka dan kesehatan para keluarga yang ditinggalkan. Pergeseran ke pemakaman yang lebih privat dan penggunaan teknologi baru mencerminkan dinamika modernitas. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dukungan sosial dan risiko kesehatan mental, yang memerlukan perhatian dari penyedia layanan pemakaman dan sistem kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan melakukan survei kuantitatif nasional dengan melibatkan 1078 pelayat (*chief mourners*) di Jepang sebagai responden utama. Survei ini mengumpulkan data melalui hampir seratus pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman berduka, praktik pemakaman, dan kondisi kesehatan para pelayat. Analisis data dilakukan secara statistik dan juga melibatkan analisis kualitatif terhadap komentar terbuka responden. Untuk teori yang digunakan oleh Kondo-Arita & Becker pada penelitian ini yaitu teori dari sosiologi budaya yang melihat ritual sebagai mekanisme pengikat sosial dan media untuk mengekspresikan serta berbagi kesedihan secara sosial.

Persamaan penelitian ini dan penelitian dari Kondo-Arita & Becker yaitu memiliki fokus terhadap transformasi praktik pemakaman dan penyederhanaan praktik pemakaman itu sendiri. Sementara perbedaannya terdapat pada penggunaan metodologi dan teori yang mana penelitian Kondo-Arita & Becker menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Sementara penelitian ini menggunakan teori Konsekuensi Modernitas Giddens serta menggunakan metode studi literatur. Perbedaan lainnya yaitu, Kondo-Arita

& Becker tidak menelaah praktik dari pemakaman itu sendiri melainkan bagaimana respon keluarga duka terhadap praktik pemakaman yang semakin disederhanakan pada masa Covid-19. Sementara penelitian ini membahas dampak dari tiga bencana besar seperti Gempa Kanto, Perang Dunia II, dan Pandemi Covid-19.

Selanjutnya, artikel jurnal oleh Michael Berman (2018) yang berjudul *Religion Overcoming Religions: Suffering, Secularism, and the Training of Interfaith Chaplains in Japan*. Penelitian ini membahas fenomena dalam praktik keagamaan pasca bencana besar seperti gempa, tsunami, reaktor nuklir yang terjadi pada tahun 2011. Bencana ini melahirkan profesi baru bernama *Interfaith Chaplains* atau pendeta lintas agama. Para *Chaplain* ini ditugaskan untuk memberikan rehabilitasi trauma pasca bencana dengan pendekatan spiritual agar dapat diterima oleh masyarakat. Perawatan ini disebut dengan 心のケア (Kokoro no kea) atau perawatan hati. Penelitian ini menyoroti bagaimana korban melakukan rehabilitasi dengan tuntutan sekularisme di kehidupan modern. Penelitian ini menggunakan teori Sekularisasi, agama public (*public religion*) dari José Casanova, dan konsep *religion overcoming religions* yang menggambarkan bagaimana para profesional agama mengatasi Batasan sektarianisme untuk melayani masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait penderitaan sosial (*social suffering*).

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian dari Berman terdapat kelemahan sistem kepercayaan pascabencana. Serta adanya sekularisme dari kehidupan bermasyarakat Jepang di era Kontemporer. Dan perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada fokus dari peran agama itu sendiri. Berman berfokus pada peran agama di

lembaga sosial, sementara penelitian ini berfokus pada transformasi praktik pemakaman dan nilai budaya.

Selanjutnya, penelitian terdahulu tesis oleh Hariyadi Budi Susanto (2017) yang berjudul *The Transition of Japanese Funeral Ceremony: Cultural and Business Perspective*. Tesis ini menganalisis praktik pemakaman di Jepang dari sudut pandang budaya dan bisnis. Penelitian ini memiliki fokus utama pada pergeseran bentuk pemakaman yang disederhanakan akibat dari modernisasi dan urbanisasi. Penelitian ini menggunakan teori modernitas dan sekularisasi, serta konsep-konsep dari antropologi agama dan sosial terkait bagaimana peran agama dalam masyarakat modern.

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian dari Hariyadi yaitu membahas pergeseran nilai pemakaman tradisional menjadi lebih modern. Persamaan selanjutnya yaitu, keduanya menganalisis penyederhanaan praktik pemakaman dari segi gaya upacaranya. Sementara perbedaannya dari penelitian ini dan penelitian Hariyadi yaitu, penelitian ini memandang dari segi krisis, sekularisme, dan modernisasi sebagai faktor pendorong pergeseran nilai religi dalam praktik pemakaman. Sementara Hariyadi menyoroti dari segi ekonomi dan bisnis, ditunjukkan pada fokusnya terhadap industri pemakaman di era kontemporer.

Selanjutnya, artikel jurnal Oleh Sirah Robitha Maula dkk., (2023) yang berjudul *Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Terhadap Munculnya Risiko Individualisme di Masa Pandemi Covid-19*. Penelitian ini. Maulana dkk., menganalisis dampak globalisasi dan modernisasi terhadap sikap individualisme selama masa pandemi. Penelitian ini juga membahas fenomena *panic buying* yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 sebagai

salah satu bentuk manifestasi sikap individu akibat kebijakan *social distancing*. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana globalisasi dan modernisasi menyebabkan perubahan nilai budaya dan sosial khususnya di Indonesia, terkait dengan menurunnya rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Penelitian ini menggunakan teori Modernitas dari Anthony Giddens, dan pendekatan analisis deksriptif dengan mengorganisasikan data yang ada.

Persaman dari penelitian ini dan penelitian oleh Maulana dkk., terdapat dari penggunaan teori Modernitas dari Giddens sebagai kerangka konseptual. Persamaan selanjutnya yaitu fokus utama penelitian terdapat pada dampak modernisasi terhadap transformasi sosial dan budaya. Sementara perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada secara khusus penelitian ini membahas transformasi praktik pemakaman dan system religi di Jepang, sementara penelitian oleh Maulana dkk., berfokus pada munculnya resiko individualitas di Indonesia selama pandemi.

Dan yang terakhir, penelitian terdahulu artikel jurnal oleh Penelitian Ibrahim S. Bitrus (2017) yang berjudul *Globalizing Impact of Modernity in Africa*. Penelitian ini mengkaji dampak globalisasi modernitas terhadap kehidupan sosial, budaya, dan institusi keagamaan di Afrika dengan fokus pada Nigeria. Jurnal ini juga membahas bagaimana modernitas yang menyebar secara global mengubah struktur sosial dan budaya Afrika, namun menyoroti bahwa konsep Giddens tentang "akhir tradisi" tidak sepenuhnya berlaku di Afrika. Banyak nilai tradisional, terutama yang berakar pada iman Kristen, masih dipertahankan meskipun ada pengaruh modernitas yang kuat. Penelitian ini

menggunakan teori Modernitas dari Anthony Giddens, dan pendekatan analisis deksriptif dengan mengorganisasikan data yang ada.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Bitrus terletak pada penggunaan teori modernisasi Giddens untuk menganalisis dampak dari modernisasi tersebut terhadap suatu nilai di masyarakat Jepang. Persamaan selanjutnya, terdapat pada konteks sosial budaya, yang mana baik penelitian ini maupun penelitian Bitrus, berfokus pada transformasi nilai-nilai tradisional di masyarakat. Sementara itu, perbedaan dari penelitian ini dan penelitian Bitrus terdapat lokasi yang menjadi fokus penelitian, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana respon pemerintah dan masyarakat Jepang pasca peristiwa-peristiwa besar seperti gempa, perang dan juga pandemi. Sementara penelitian Bitrus memfokuskan pada konsekuensi modernitas terhadap kehidupan sosial, budaya, dan institusi keagamaan di Nigeria, Afrika.

Kelima penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan penulisan dalam penelitian ini. Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang menyoroti transformasi praktik pemakaman dari tradisional menuju modern yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa besar Gempa Kanto (1923), Perang Dunia II (1945), dan Pandemi Covid-19 (2020), serta secara signifikan mengaitkan ketiga peristiwa-peristiwa besar tersebut sebagai sebab dan juga akibat dari terjadinya transformasi praktik pemakaman di Jepang. penelitian ini menggunakan teori Konsekuensi Modernitas Giddens, untuk meninjau bagaimana transformasi praktik pemakaman mempengaruhi sistem kepercayaan pasca peristiwa-peristiwa besar pada praktik pemakaman di Jepang.

2.2 Teori Konsekuensi Modernitas Anthony Giddens

Modernitas merupakan transformasi nilai, sistem, dan struktur dalam kehidupan sosial. Anthony Giddens dalam karyanya *The Consequences of Modernity* (1990) menjelaskan bagaimana modernitas tidak sebatas kemajuan teknologi, tetapi juga bagaimana dampak teknologi terhadap struktur sosial, pola hubungan, dan sistem nilai di masyarakat. Giddens mengibaratkan modernitas sebagai *Juggernaut* atau mesin yang terus maju dan tidak dapat berhenti. Mesin ini terus melaju dan melindas apapun yang ada dihadapannya. Jalurnya tidak selalu lurus, terkadang mesin ini akan keluar dari jalurnya dan bergerak tak menentu. Akibatnya, manusia tidak dapat merasa sepenuhnya aman, karena medan yang dilaluinya penuh dengan resiko dan konsekuensi yang tinggi.

Modernitas bagi Giddens adalah hal yang bersifat multi dimensional pada level institusional yang saling berjalan. Giddens mendefinisikan modernitas dalam konteks empat lembaga dasar yang membentuk modernitas dan membedakannya dari masyarakat pra-modern, yaitu kapitalisme, industrialisme, kapabilitas pengawasan (*Surveillance Capacities*), dan kekuatan militer (*Military Power*).

1. Kapitalisme

Kapitalisme adalah suatu sistem produksi yang bertumpu pada hubungan kepemilikan privat atas kapital serta penguasaan atas tenaga kerja. Dalam keberlangsungannya, sistem ini mengaitkan mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi atas komoditas sebagai satu rantai. Dengan adanya proses komodifikasi tenaga kerja ini, individu (buruh/karyawan) diandaikan sebagai faktor produksi yang akan menunjang

proses produksi. Namun, wilayah produksi bukan menjadi tujuan akhir sebab komoditas tersebut tidak akan berarti apabila tidak ada yang mengonsumsi.

Bagi Giddens kapitalisme tidak bisa dimaknai dalam bingkai ekonomis semata, tetapi ia dapat digunakan untuk memahami suatu tatanan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai *social order*, kapitalisme merujuk pada masyarakat kapitalis yang merupakan *class society*. Ini dicirikan oleh beberapa hal: (1) Tatanan ekonominya bertumpu pada kepemilikan privat atas modal serta penguasaan atas tenaga kerja; (2) Wilayah ekonomi benar-benar terpisah dari arena sosial yang lain terutama institusi politik; (3) Pemisahan antara masyarakat politik dan ekonomi diletakkan di atas superioritas kepemilikan kapital yang ditandai komodifikasi atas tenaga kerja di dalam sistem kelas; (4) Karakter negara sangat dipengaruhi oleh wilayah ekonomi sehingga otonomi negara terhadap masyarakat terbentuk karena ketergantungannya pada akumulasi kapital.

2. Industrialisme

Industrialisme yang dimaksud oleh Giddens lebih dari sekedar pemakaian teknologi. Sehingga apa yang disebut masyarakat industri bukan hanya masyarakat yang memakai mesin. Industrialisme menunjuk pada organisasi sosial dari suatu proses produksi yang diatur untuk merangkai kerja manusia, mesin-mesin, input bahan mentah serta *output* produksi dalam satu kinerja.

Industrialisme bisa bersinggungan dengan kapitalisme karena alasan yang jelas yaitu pencapaian keuntungan yang lebih besar. Inovasi teknologi yang diterapkan di dalam industri dapat dipakai untuk menurunkan biaya produksi serta mengurangi biaya

investasi dalam mempekerjakan buruh. Jelas bahwa kapitalisme dan industrialisme mengedepankan bentuk produksi yang berbasis dan berpusat di pabrik dan wilayah industri sehingga bentuk memiliki motif keuntungan (*profit motive*) menjadi hal dominan dalam ekonomi modern dan menggeser bentuk-bentuk produksi tradisional yang berbasiskan pada pertanian.

3. Kapabilitas Pengawasan (*Surveillance Capacities*)

Kapabilitas pengawasan merujuk pada rasionalisasi administratif yang dibangun oleh atasan kepada bawahan dalam rangka pengawasan dan eksploitasi. Hal ini biasa dilakukan oleh negara kepada masyarakat ataupun majikan kepada buruhnya. Menurut Giddens, bentuk pengawasan administrative ini ada dua, yaitu:

1. Akumulasi informasi. Ini berkaitan dengan tindakan negara untuk mengumpulkan data tentang masyarakat dalam kepentingan kontrol. Misal, data statistik mengenai kelahiran, kematian, perceraian, kejahatan, tempat tinggal, pekerjaan, latar belakang agama atau etnis.
2. Supervisi kegiatan bawahan oleh atasan. Ini merupakan pengawasan langsung oleh negara kepada masyarakat ataupun majikan kepada buruh di mana orang diatur dan didisiplinkan melalui peraturan-peraturan dan aparat kekerasan (mandor, polisi, intelejen).

4. Kekuatan Militer (*Military Power*)

Kekuatan ini berkaitan dengan penguasaan sarana-sarana kekerasan oleh negara untuk menjaga keberlangsungan kekuasaan atas suatu wilayah. Giddens memandang

kontrol atas sarana kekerasan yang sah oleh negara merupakan skema kekuasaan untuk mengawasi warganya serta menjamin kedaulatan negara dari ancaman negara lain atau bila perlu bisa digunakan untuk memperluas wilayah melalui ekspansi militer. Kehadiran industrialisme akhirnya menjadikan kekuasaan militer semakin memiliki arti penting dalam membentuk dunia modern. Hal ini dikarenakan peralatan perang makin maju serta mampu memperkuat keterkaitan militerisme itu sendiri dengan kapitalisme dan pengawasan.

Keempat gugus institusional tersebut menjadi fondasi struktural yang mendorong modernitas. Namun, dampak transformatif modernitas tidak berhenti pada keberadaan lembaga-lembaga itu saja. Lebih lanjut, Giddens menjelaskan bagaimana modernitas secara fundamental melepaskan sistem tradisional. Menurut Giddens modernitas memiliki konsekuensi dalam melepas sistem tradisional dan menggeser unsur-unsur religi di masyarakat serta menciptakan ketergantungan terhadap sistem abstrak seperti birokrasi, profesionalitas, dan teknologi. Terdapat tiga komponen utama konsekuensi modernitas sebagai fenomena yang dinamis. Tiga komponen ini meliputi *Time-Space Distanciation*, *disembedding*, dan *reflexivity*.

1. Time-Space Distanciation (Pemisahan Ruang dan Waktu)

Time-Space Distanciation merujuk pada pemisahan ruang dan waktu yang memungkinkan interaksi sosial terjadi melampaui batasan lokal dan temporal. Dalam masyarakat pra-modern, hubungan sosial sangat erat dengan konteks lokal dan waktu tertentu, namun modernitas mengubah ruang dan waktu menjadi dimensi yang standar

dan abstrak, sehingga aktivitas sosial dapat terjadi walau terbatas ruang dan waktu. Pemisahan ini menjadi syarat utama bagi proses *disembedding*, yakni pelepasan konteks tradisional, serta mekanisme penggerak organisasi modern yang dapat menghubungkan lokal dan global secara efisien. Selain itu, *Time-Space Distanciation* juga memungkinkan terbentuknya historis radikal, yang mana masa lalu, sekarang, dan masa depan direkombinasikan dalam kerangka sejarah dunia yang terstandarisasi dan berlaku secara universal.

2. *Disembedding* (Pelepasan Konteks Tradisional)

Disembedding merujuk pada proses terlepasnya nilai tradisional dari sebuah praktik, yang mana tindakan sosial tidak lagi menggunakan nilai lama tetapi lebih mengarah ke sistem baru yang lebih efisien dan rasional. Giddens membagi jenis mekanisme *disembedding* menjadi dua, yakni *simbolik token*, dan *expert system*.

Simbolik token, berupa uang, berguna sebagai alat tukar yang dapat dipindahkan tanpa bergantung pada siapa yang menggunakannya. Pada era tradisional, kegiatan transaksi dilakukan secara tatap muka, atau secara harfiah harus bertemu di satu tempat dan waktu yang sama dan tentunya terdapat uang fisik. Namun, perkembangan teknologi memberikan kemudahan dengan adanya uang digital. Selanjutnya, munculnya pasar online yang tidak mengharuskan kegiatan jual beli dilakukan secara tatap muka. Hal ini memungkinkan transaksi terjadi di tempat dan juga waktu yang berbeda. Uang digital atau Uang modern ini telah dijamin oleh negara menjadi contoh utama bagaimana *disembedding* memungkinkan aktivitas ekonomi dilakukan secara luas.

Expert system atau sistem ahli merupakan sistem pengetahuan teknis yang bersifat profesional. Sistem ini mengorganisasikan berbagai aspek kehidupan sosial dan material, seperti arsitektur, dokter, dan teknologi yang diciptakan. Sistem ini didasari oleh kepercayaan (*Trust*) di mana masyarakat mempercayai sistem abstrak dan kapitalisasi profesional meskipun tidak memahami cara kerjanya secara detail. *Trust* dalam konteks modernitas bukan kepercayaan personal, tetapi kepercayaan pada sistem dan institusi yang menjalankan nilai dan keahlian simbolik token maupun sistem ahli.

3. Reflexity (Refleksivitas Sosial)

Reflexity menggambarkan bagaimana masyarakat modern secara sadar merefleksikan praktik sosial berdasarkan informasi dan situasi terkini. Mereka tidak lagi mengikuti tradisi yang sudah mengakar, tetapi membuat keputusan rasional berdasarkan konteks baru. Refleksivitas ditandai dengan Tindakan sosial dan pengetahuan saling mempengaruhi satu sama lain secara terus menerus. Berbeda dengan tradisi yang mengandalkan kesinambungan masa lalu dan praktik berulang, modernitas menempatkan refleksi kritis dan revisi konstan terhadap praktik sosial sebagai inti dari reproduksi sistem sosial. Dalam konteks ini, tradisi tidak lagi menjadi fondasi utama, melainkan harus berdasarkan bukti secara rasional dan reflektif. Pengetahuan dalam modernitas bersifat terbuka dan tidak pernah pasti, sehingga perubahan sosial menjadi dinamis dan tidak terduga.

Melalui ketiga konsep ini, Giddens memberikan kerangka teoritis yang relevan untuk mendalami transformasi pemukiman di Tokyo sebagai dampak dari modernitas.

Penelitian ini menggunakan teori konsekuensi modernitas yang dikemukakan oleh Anthony Giddens sebagai alat dalam menganalisis transformasi praktik pemakaman dan pergeseran nilai religi yang terjadi akibat dari transformasi tersebut.

2.3 Praktik pemakaman Tradisional Jepang

Dalam tradisi masyarakat Jepang, praktik pemakaman dikenal dengan istilah *Sousai* (葬祭), yang terdiri dari dua karakter yaitu *sou* (葬) berarti pemakaman, dan *sai* (祭) yang berarti ritual yang berlanjut. Istilah ini memberi makna pandangan spiritual masyarakat Jepang bahwa praktik pemakaman bukan akhir, tetapi awal dari serangkaian penghormatan dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Suzuki, ritual pemakaman di Jepang memiliki karakteristik yang sangat erat kaitannya dengan ruh dan kepercayaan nenek moyang. Dalam kepercayaan lama, selama manusia hidup, tubuhnya ditempati oleh *ikiryou* (生霊)¹. Namun, setelah kematian, ruh tersebut akan terlepas dari tubuh dan berubah menjadi *shirei* (死霊)² (Suzuki, hlm. 123, 2013).

Secara tradisional, praktik pemakaman di Jepang dilakukan di rumah duka dan di kuil Buddha, di mana para biksu akan mengiringi rangkaian upacara pemakaman. Menurut Earhart dalam bukunya yang berjudul *Japanese Religion Unity and Diversity*:

In traditional times, and even as late as 1951, a funeral was conducted mainly by the Buddhist priest and the hamlet association in cooperation with the bereaved family. There was a procession in which the corpse was carried from the home to a nearby cremation ground. Members of the hamlet association lit the funeral pyre and kept it burning all

¹ *Ikiryō* (生霊) merupakan ruh orang hidup yang menyatu dengan jasad manusia yang masih hidup. Ruh ini memiliki emosi seperti marah, iri, cinta, atau bahkan benci (Yokai.com, 2025)

² *Shirei* atau *Shiryō* (死霊) merupakan ruh seseorang yang sudah meninggal dunia. Biasanya dianggap sebagai ruh yang belum tenang (hantu) yang tidak dipandu dalam ritual spiritual. Dalam kepercayaan tradisional, *Shirei* perlu dipulangkan melalui ritual agar dapat berubah menjadi *Hotoke* (Jisho.org, 2025).

night long in order to reduce the body to ashes, which the family would collect the next morning (Earhart, hlm. 201, 1969).

Langkah pertama yang dilakukan pada pihak keluarga atau komunitas setelah menemukan jenazah adalah menghubungi kuil Buddha terdekat untuk membenahi jenazah tersebut. Jenazah akan dibiarkan di rumah duka setidaknya satu malam sebelum akhirnya di kremasi. Tradisi ini disebut juga dengan *Otsuya* (お通夜) atau malam berjaga, yang bertujuan agar keluarga duka dapat menyampaikan salam perpisahan kepada mending. Keluarga dan kerabat akan berdatangan dan berkumpul di rumah duka dan jenazah akan dibaringkan di atas *futon*³.

Selain membenahi jenazah, biksu Buddha atau Obou akan menentukan penanggalan baik atau buruk untuk melaksanakan kremasi. Sesuai dengan ajaran Buddhisme, bahwa praktik pemakaman di Jepang juga tidak lepas dari penanggalan hari baik atau bisa disebut dengan *Rokuyo* (六曜). Tradisi ini telah menjadi budaya pemakaman Jepang sejak diperkenalkan dari China sekitar abad ke-14. Penanggalan ini dilaksanakan untuk menghindari *Tomobiki* (友引), yang dipercaya menarik teman ke alam baka. Beberapa krematorium bahkan tutup pada hari-hari ini. keluarga akan memilih tanggal-tanggal yang telah di siapkan oleh obou. Jika penanggalan sudah ditentukan, pada hari selanjutnya, jenazah akan dibawa menuju aula kuil untuk diadakan perpisahan secara formal. Jenazah dirias, dimasukan ke dalam peti, dan ditata secara

³ Futon adalah perangkat tidur tradisional Jepang yang dapat digunakan sebagai alas tidur (kasur) dan selimut (dictionary.cambridge.org, 2025).

sakral. Para tamu seperti kolega, teman, dan kenalan mendiang akan hadir untuk memberikan penghormatan. Upacara ini disebut dengan istilah *Kokubetsushiki* (告別式) atau perpisahan resmi. Berbeda dengan *otsuya* yang bersifat intim, *kokubetsushiki* ditujukan bagi relasi yang lebih luas. Menurut Hariyadi, *Kokubetsushiki* memiliki arti *wakare wo tsugeru shikiten* atau upacara pengumuman perpisahan (Hariyadi, hlm. 7, 2017).

Setelah *Kokubetsushiki* selesai dilaksanakan, jenazah akan dibawa menuju krematorium untuk menjalankan *kasou* (火葬) atau kremasi. Selanjutnya, pihak keluarga akan melakukan *Shuukotsu* (収骨) atau pengumpulan tulang yang dipimpin oleh keluarga mendiang. Praktik ini dilakukan dengan metode *kotsuage* (骨上げ) yaitu pengambilan sisa tulang dari abu jenazah menggunakan sumpit secara bergantian. Tulang-tulang tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam guci khusus yang disebut dengan *kotsutsubo* (骨壺). Hal ini dikuatkan oleh Picone, Picone menyatakan pasca kremasi keluarga mengambil sisa dari pembakaran seperti tulang belulang dan dimasukkan ke dalam guci, tulang ini disebut sebagai tulang Buddha yang meliputi tulang belakang, femur, dan lain sebagainya (Picone, hlm. 137, 2007). Untuk tulang-tulang yang berukuran besar akan dipecahkan menggunakan sumpit besi agar dapat dimasukkan ke dalam *kotsutsubo*. Selanjutnya, guci yang telah terisi dengan sisa kremasi jenazah tersebut kemudian akan dibawa menuju makam keluarga atau *ohaka* (お墓), yang biasanya terletak di area kuil atau pemakaman umum. Selama proses penempatan abu ke dalam makam akan diiringi oleh doa-doa dari biksu.

Seperti makna dari istilah praktik pemakaman yang sebelumnya sempat dibahas, *Sousai* (葬祭) bermakna ritual yang berkelanjutan. Maka upacara pemakaman tidak berhenti setelah proses kremasi saja. Tetapi terdapat beberapa rangkaian upacara dalam penghormatan yang dilakukan setelah pemakaman berakhir. Menurut Fujii, rangkaian upacara peringatan dilakukan secara bertahap mulai dari penghormatan di setiap hari (*meinichi*), peringatan hari ke-49 hingga acara tahunan seperti tahun pertama, ketiga, dan ketujuh (Fujii, hlm. 45, 1983). Upacara ini dilakukan untuk menghormati para arwah leluhur agar selalu terlindung dan menjaga hubungan spiritual antar keluarga dan leluhur.

BAB III

PEMBAHASAN

Pemakaman merupakan salah satu praktik sosial yang tidak hanya merefleksikan siklus kehidupan, tetapi juga mencerminkan salah satu sistem sosial budaya pada suatu masyarakat. Di Jepang, praktik pemakaman mengalami transformasi yang cukup signifikan seiring dengan terjadinya peristiwa-peristiwa besar dalam dunia yang modern. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi praktik pemakaman, tetapi juga membawa konsekuensi pada perubahan nilai religi yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, peran komunitas spiritualitas yang sebelumnya menjadi acuan utama, saat ini tergantikan oleh jasa profesional yang terikat dengan efisiensi dan nilai praktis.

Pemakaman tradisional Jepang tidak lepas dari pengaruh ajaran Buddha yang mulai meluas di Jepang pada abad ke-6 M. Praktik kremasi pertama dilakukan oleh seorang biksu Buddha yang bernama Doushou (道昭)⁴ (629-700) pada abad ke-7 M. Hal ini dikuatkan oleh Bernstein, bahwa praktik kremasi sudah terikat erat oleh ajaran Buddhisme pasca praktik kremasi yang dilaksanakan oleh biksu Doushou (Bernstein, hlm. 300, 2000). Kemudian, praktik ini menjadi umum di kalangan pejabat pemerintahan di Jepang.

⁴ Doushou (道昭) adalah biksu yang memiliki peran penting dalam meluasnya agama Buddha di Jepang. Ia membuka aula meditasi pertama di Jepang, tepatnya di kuil Gangou-ji (薬師寺) (nichirenlibrary.org, 2025).

Menurut Bernstein dalam karyanya yang berjudul *Fire and Earth: The Forging of Modern Cremation in Meiji Japan*:

According to the *Shoku Nihongi*⁵, cremation was introduced to Japan by the Buddhist priest Doushou (道昭), who was burned on a funeral pyre by his disciple in 700. The cremation of Empress Jitō (持統)⁶ (645-703) followed several years later, establishing a precedent among aristocracy (Bernstein, hlm. 300, 2000).

Dalam bahasa Jepang, kremasi dikenal dengan istilah *kasou* (火葬) terdiri dari dua karakter *hi* (火) yang berarti api dan *sou* (葬) yang berarti penguburan yang secara harfiah berarti pembakaran jenazah. Menurut Kawano dalam Stewart & Strathern, praktik kremasi di Jepang bukan sekadar metode pemusnahan jasad, tetapi merupakan proses spiritual untuk memurnikan tubuh dan membebaskan ruh, sebagaimana yang ditekankan dalam ajaran Buddhisme (Stewart & Strathern, hlm. 59, 2015). Selain untuk memurnikan, makna kremasi dalam ajaran Buddhisme Jepang juga dianggap sebagai proses spritual untuk mengantarkan ruh menjadi *Hotoke* (仏), yang berarti roh leluhur yang suci setelah dilaksanakannya praktik kremasi. Keluarga Jepang sangat menghormati leluhur mereka secara spiritual dan fisik dari sisa-sisa abu dari kremasi. Keberadaan altar keluarga atau *butsudan* serta pelaksanaan upacara peringatan rutin yang dikenal dengan istilah *houyou* bertujuan untuk menjaga hubungan antara yang hidup dan yang telah meninggal. Ini

⁵ *Shoku Nihongi* adalah buku Sejarah resmi Jepang yang ditulis oleh Fujiwara no Tsugutada dan Sugano no Mamichi. Buku ini mencatat peristiwa-peristiwa kekaisaran antara tahun 697 hingga 791 dan merupakan kelanjutan dari buku *Nihon Shoki* (University of California at Berkley, 2006).

⁶ Jitō (持統) adalah Kaisarani ke-41 yang memimpin sejak tahun 690 hingga 697. Jitō merupakan Kaisar ketiga dari delapan wanita yang mengambil peran sebagai permaisuri (Nippon.com, 2020).

menunjukkan bahwa kematian dalam tradisi Jepang bukanlah akhir, melainkan bagian dari ikatan spiritual dalam suatu keluarga.

Namun, praktik pemakaman di Jepang, terkhususnya pada kota metropolitan Tokyo menunjukkan transformasi signifikan sebagai respon terhadap krisis besar seperti Gempa Kanto (1923), Perang Dunia II (1945), dan pandemi Covid-19 (2020). Ketika peristiwa Gempa Kanto menyebabkan lebih dari 100.000 kematian dan kerusakan infrastruktur parah, pemerintah Jepang terpaksa mengeluarkan kebijakan darurat dengan menerapkan kremasi massal di lokasi penemuan jenazah. Hal ini dilakukan untuk menangani lonjakan korban jiwa dan ketidaktabilan sosial-ekonomi. Menurut Daniell, gempa bumi tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga ekonomi dan mata pencaharian individu (Daniell, hlm. 203, 2014). Pengalaman ini kemudian menjadi dasar bagi penanganan jenazah korban Perang Dunia II, di mana banyak korban yang tidak dapat diidentifikasi sehingga kremasi massal kembali dilakukan atas kesadaran komunitas lokal dan keluarga korban. Hal ini dikuatkan oleh kutipan dari salah satu laman perusahaan layanan pemakaman Soureisha.com, bahwa pengalaman pemerintah dalam menangani jenazah korban Gempa Kanto kemudian dimanfaatkan kembali selama serangan udara di Tokyo pada tahun 1945 (Soureisha.com, 2023).

Fenomena terakhir, Pandemi Covid-19 (2020), kembali memicu transformasi drastis dalam praktik pemakaman. Kebijakan jaga jarak dan pembatasan mobilitas yang diberlakukan oleh pemerintah memaksa transisi praktik pemakaman tatap muka menjadi pemakaman virtual yang mengandalkan teknologi seperti internet dan perangkat digital.

Transformasi ini membawa konsekuensi terhadap sistem kepercayaan yang berikatan erat dengan praktik pemakaman. Muncul pertanyaan baru mengenai bagaimana pihak kuil dan masyarakat mampu beradaptasi untuk memastikan ketenangan arwah mendiang, sekaligus memberikan kenyamanan batin bagi keluarga yang ditinggalkan. Meskipun transformasi terjadi seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat berhasil menyesuaikan bentuk praktik pemakaman, dan unsur-unsur kepercayaan dapat terwujud sebagai respon terhadap tantangan zaman. Situasi ini mencerminkan sifat fleksibilitas dari sistem Kepercayaan di Jepang dalam menghadapi perubahan sosial dan bencana.

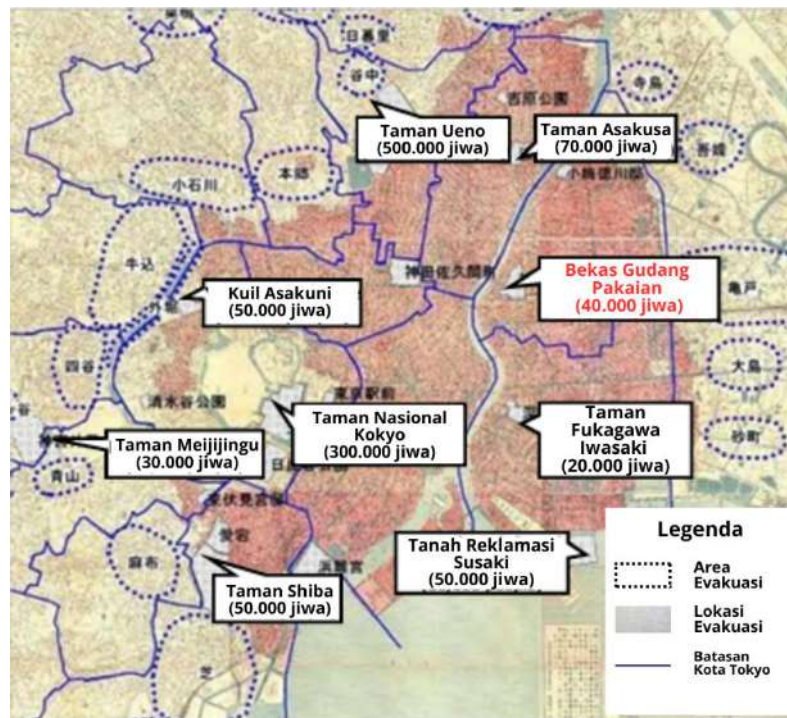
Peristiwa Gempa Kanto (1923), Perang Dunia II (1945), dan pandemi Covid-19 (2020) telah memicu transformasi dalam praktik pemakaman di Tokyo. Gempa Kanto, menuntut pembangunan pemakaman lahan di pinggiran kota Jepang dan menyederhanaan praktik pemakaman di Tokyo dengan adanya kremasi massal. Selanjutnya, Perang Dunia II mendorong praktik pemakaman dilakukan dengan lebih praktis dan efisien. Terakhir, pandemi Covid-19 seiring dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak. Seiring dengan munculnya simplifikasi pada praktik pemakaman pasca peristiwa-peristiwa ini, ini memberikan konsekuensi terhadap unsur-unsur religi dalam praktik pemakaman.

Berdasarkan paparan sebelumnya, praktik pemakaman di Tokyo mengalami transformasi yang cukup signifikan selama satu abad terakhir. Transformasi ini dapat dikategorikan sebagai reformasi. Reformasi ini muncul sebagai respons terhadap tekanan eksternal seperti bencana alam, perang, dan pandemi. Hal ini dikuatkan Burns dalam Tsani dkk., bahwa implementasi reformasi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti

kondisi sosial, ekonomi, politik, dan globalisasi (Tsani dkk., hlm. 136, 2024). Hal ini ini lah yang kemudian memicu transformasi dan konsekuensinya terhadap sistem kepercayaan dan berikut adalah pembahasannya.

3.1 Praktik Pemakaman Pasca Gempa Kanto (1923)

Gempa Besar Kanto atau dalam bahasa Jepang disebut *Kantou dai jishin* (関東大地震) terjadi pada tanggal 1 September 1923 merupakan salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah modern Jepang. Gempa berkekuatan 7.9 skala Richter ini mengguncang wilayah Tokyo dan Yokohama dan menewaskan lebih dari 100.000 jiwa. Gempa ini terjadi sekitar pukul 11:58 waktu setempat dan berlangsung selama 4-10 menit. 30 menit setelah guncangan hebat, lebih dari 130 titik api bermunculan di sepanjang Tokyo. Menurut Schencking, Kemunculan api ini dipicu oleh patahnya aliran gas akibat gempa dan bertepatan dengan waktu makan siang yang mana mayoritas rumah tangga sedang menggunakan api untuk memasak (Schencking, hlm. 300, 2008). Kobaran api meluas akibat dari angin topan yang muncul dan membawa reruntuhan bangunan, barang-barang, hingga tubuh manusia dan rumah-rumah tradisional Jepang yang mayoritas dibangun dengan kayu pun ikut terbakar habis. Menurut data dari situs resmi Arsip Nasional Jepang (National Archive of Japan), lebih dari 99.000 orang tewas, 43.000 orang hilang, 128.000 rumah hancur total, dan 447.000 rumah terbakar (Kementerian Pendidikan Pusat Meteorologi, 2012).



Gambar 2. Lokasi Evakuasi Utama dan Jumlah Populasi yang Dievakuasi di Kota Tokyo pasca Gempa Bumi

Sumber: Dewan Penanggulangan Bencana Nasional Jepang (Bousai.go.jp)

Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menentukan lokasi evakuasi. Penentuan lokasi evakuasi dengan pertimbangan lokasi tersebut memiliki tempat luas dan dapat menampung banyak orang. Berdasarkan Gambar 1, lokasi-lokasi yang dijadikan tempat evakuasi adalah Taman Ueno menampung 500 ribu jiwa, Taman Nasional Kokyo menampung 300 ribu jiwa, Taman Asakusa menampung 70 ribu jiwa, Kuil Yasukuni, Taman Shiba, dan Tanah Reklamasi Susaki yang menampung 50 ribu jiwa, gudang pakaian Honjo Hifukusho yang menampung 40 ribu jiwa, Taman Meijiingu yang menampung 30 ribu jiwa, dan Taman Fukagawa Iwasaki yang menampung 20 ribu jiwa. Dari beberapa lokasi yang dijadikan titik evakuasi, pada Honjo Hifukusho yang

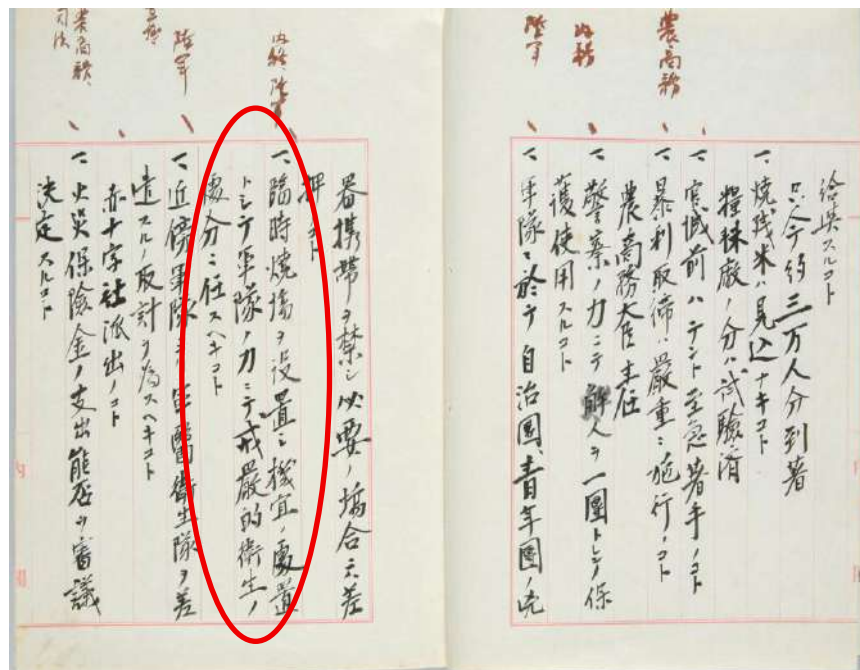
merupakan bekas pabrik pakaian militer mengalami peristiwa yang tragis. Beberapa jam setelah gempa, badai api melanda gudang pakaian Honjo dan dalam waktu hitungan jam api menewaskan 38.000 jiwa warga yang dievakuasi. Hal ini disebabkan oleh angin puting beliung yang membawa api dari titik lokasi kemunculan api di Tokyo. Badai api ini kemudian membakar hangus gudang pakaian Honjo dan menerbangkan puing-puing bangunan gudang tersebut. Para warga yang di evakuasi di lokasi ini diibaratkan terperangkap dalam oven raksasa. Hal ini dikuatkan oleh Schencking dalam bukunya yang berjudul *The Great Kanto Earthquake and The Chimera of National Reconstruction in Japan*,

For writer Tanaka Kotaro, no one event stood out in horror. Rather, he was haunted by the total, overwhelming scale of human suffering and misery he experienced. No place, however, was more confronting to Tanaka than the site where the Honjo Clothing Depot had once stood. There, over 30,000 people suffered a terrifying death. Writing weeks after the calamity, Tanaka concluded that he would never—no matter how hard he endeavored—be free from the sight and smell of the tens of thousands of decaying bodies that littered the 67,000-square-meter (6.7- hectare) site (Schencking, hlm. 14, 2013).

Seorang novelis bernama Uno Kouji yang pada saat itu berada di taman Ueno juga bersaksi bahwa kabut besar yang menyelimuti Tokyo kala itu berasal dari gudang pakaian Honjo. Hal ini dikuatkan oleh Schencking, novelis Uno Kouji merefleksikan bahwa pemandangan Tokyo yang ia saksikan adalah tumpukan kayu dan krematorium atau tempat kremasi darurat di Honjo. Kabut asap menyelimuti kota yang hancur (Schencking, hlm. 105, 2013).

3.1.1 Kebijakan Yamamoto Tahun 1923

Bencana Gempa kanto tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan yang menuntut respon cepat dan terorganisir dari pemerintah Jepang. Dalam situasi darurat ini, pemerintah pusat menghadapi tantangan dalam berbagai aspek mulai dari penyelamatan korban, distribusi bantuan, hingga pengelolaan jenazah. Krisis ini mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan darurat sebagai upaya menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah kekacauan yang terjadi.



Gambar 3. Dokumen Keputusan kabinet No.143, 4 September 1923, 'Masalah pengambilan tindakan terkait gempa bumi'

Sumber: www.archives.go.jp

Menanggapi hal ini, kabinet Yamamoto⁷ membuat kebijakan tindakan darurat pada tanggal 4 September 1923. Terdapat 24 kebijakan yang terdiri dari tindakan militer dalam rangka melindungi, pembagian ransum, hingga pengelolaan jenazah korban secara darurat. Pengelolaan jenazah menjadi salah satu aspek penting bagi pemerintah meninjau tingginya angka kematian yang terjadi akibat gempa. Pada kebijakan ke-12 seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2, 「臨時火葬場を設置し、機宜の処置として軍隊の力で戒嚴的衛生の処分に任ずること。」 *rinji kasoujou o setchi shi, kigi no shochi to shite guntai no chikara de kaigen-teki eisei no shobun ni nin zuru koto*, yang berarti krematorium sementara akan didirikan dan sebagai tindakan yang bijaksana, tindakan sanitasi yang ketat akan diambil dengan menggunakan kekuatan militer. Pengelolaan jenazah secara massal dengan pembakaran terorganisir menunjukkan pengaruh logika industrialisme dalam krisis, di mana efisiensi dan skala besar menjadi prioritas utama. Meskipun tidak menggunakan mesin canggih, penyediaan kayu bakar, penataan area pembakaran, serta pengorganisasian agar api tetap menyala merupakan cerminan dari pendekatan industrial yang berdasar pada rasionalitas.

Kebijakan Yamamoto dibuat bertujuan untuk mengelola jenazah dalam jumlah besar dengan cara cepat dan higienis. Di balik keputusan ini, terdapat motivasi pencegahan kerugian negara yang lebih besar pascabencana. Dengan mempertimbangkan aspek higienitas, pemerintah dapat mencegah epidemi di masyarakat sehingga dapat memulihkan ekonomi negara dengan cepat. Dengan banyaknya jumlah jenazah yang ada,

⁷ kabinet Yamamoto adalah pemerintahan Jepang yang dipimpin oleh Yamamoto Gonnohyoue, yang menjabat sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya pada periode 1923–1924. Kabinet ini baru di sahkan tepat setelah Gempa Besar Kantō yang terjadi pada 1 September 1923 (Bousai.jp, 2024).

pemerintah berhasil mengumpulkan dan mendata para korban gempa. Kemampuan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur jenazah dalam jumlah besar memperlihatkan bagaimana kapabilitas pengawasan modern. Dalam konteks ini, pemerintah tidak sebagai agen kontrol sosial tetapi juga mengatur kembali tatanan sosial di tengah krisis yang terjadi. Dengan demikian, penanganan jenazah dalam kebijakan darurat ini bukan hanya respon secara teknis terhadap kematian massal, tetapi juga menjadi relasi antara struktur institusional modern dan adaptasi sosial yang reflektif.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, militer bertugas menjaga ketertiban dan mengelola operasi krematorium serta penanganan jenazah di bawah status darurat tersebut. Kekuatan militer memainkan peran vital dalam berjalannya kebijakan ini. Tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga sebagai eksekutor utama dalam mengelola krematorium dan pengendalian ruang publik. Hal ini menunjukkan bagaimana militer, sebagai institusi modern dapat mengambil alih fungsi-fungsi sipil dalam kondisi darurat. Kebijakan, pendirian krematorium sementara, dan pengerahan militer dengan pertimbangan aspek higienitas merupakan contoh nyata bagaimana modernitas mengubah praktik pemakaman yang telah lama mengakar dengan reflektivitas pemerintah sebagai pemicu utamanya.

Kebijakan darurat yang diambil oleh pemerintah Jepang dalam menangani krisis ini merupakan manifestasi dari reflektivitas (*reflexivity*) dalam dunia modern. Giddens menjelaskan reflektivitas merupakan kemampuan aktor sosial secara terus-menerus memantau, menilai, dan menyesuaikan tindakan mereka berdasarkan perubahan informasi dan kondisi. Dalam konteks ini, pemerintah secara rasional mengadopsi kebijakan terkait kremasi massal sebagai respon adaptif terhadap situasi krisis, dengan

pertimbangan utama yaitu menjaga higienitas dan mencegah epidemi di masyarakat. Tindakan refleksif ini terjadi atas evaluasi terhadap norma-norma sosial yang diubah oleh modernitas yang mengakar pada empat lembaga institusionalnya.



Gambar 4. Tumpukan jenazah di lokasi gudang pakaian Honjo

Sumber: tohoku.repo.nii.ac.jp

Berdasarkan pertimbangan dari pemerintah terhadap aspek higienitas dan kontaminasi aliran sanitasi, kremasi massal dilakukan sebagai langkah cepat. Seperti yang dapat dilihat dari Gambar 3, jenazah korban ditumpuk pada lahan luas gudang pakaian Honjo dan di kremasi secara massal selama beberapa hari. Kremasi massal yang diberlakukan oleh pemerintah pasca Gempa Kanto bukan sekadar tindakan darurat, tetapi sebagai contoh nyata dari konsekuensi modernitas melalui mekanisme pelepasan (*Disembedding mechanism*) yang dijelaskan oleh Anthony Giddens. Giddens mendefinisikan mekanisme pelepasan (*disembedding mechanism*) sebagai proses di mana hubungan sosial dan interaksi yang sifatnya mengakar terhadap suatu masyarakat akan

terangkat keluar dan diorganisasikan ulang melalui mekanisme abstrak. Dalam penanganan jenazah korban Gempa kanto, proses pemakaman yang secara tradisional dikelola oleh keluarga atau komunitas kini diambil alih oleh negara dan institusi formal. Tujuan utama pemerintah pada saat itu terfokus pada pengelola jenazah dalam jumlah besar dengan cepat dan higienis. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada institusi formal menunjukkan bagaimana masyarakat Jepang pasca Gempa Kanto secara sadar menyerahkan tanggung jawab sosial yang sebelumnya bersifat personal kepada otoritas yang dianggap lebih ahli dan mampu menangani situasi krisis secara rasional. Dengan demikian, praktik kremasi massal ini merupakan contoh konkret bagaimana mekanisme pelepasan bekerja dan mengubah praktik sosial tradisional menjadi praktik yang lebih terorganisir serta terlepas dari konteks lokalnya.

Melihat kembali pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa kremasi massal ini dilakukan langsung pada lokasi di mana para jenazah korban ditemukan. Pada konteks ini, gudang pakian Honjo menjadi tempat jenazah-jenazah tersebut di tumpuk kemudian dibakar secara langsung. Proses kremasi yang dilakukan mempertimbangkan lokasi di mana praktik tersebut dilakukan memberikan contoh nyata konsekuensi modernitas melalui pemisahan ruang dan waktu (*time-space distancing*). Giddens menekankan bahwa pemisahan ruang dan waktu menjadi komponen kunci dalam dinamisme modernitas. Praktik pemakaman tradisional Jepang yang terikat pada lokasi serta waktu spesifik. Seperti perimbangan *rokuyo* (penanggalan hari baik atau buruk dalam kalender Jepang) atau pelaksanaan kremasi pada krematorium, kini bukan menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah Jepang. Pemakaman darurat serta bagaimana sistem *rokuyo* tidak lagi

menjadi pertimbangan menandakan putusnya ikatan tradisional antara hubungan ritual dan tempat suci dalam praktik pemakaman.



Gambar 5. Tumpukan abu jenazah pasca kremasi di lokasi gudang pakaian Honjo

Sumber: tohoku.repo.nii.ac.jp

Selanjutnya, Sisa-sisa tubuh yang telah menjadi abu kemudian ditumpuk menjadi satu gundukan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Shiho, bahwa setelah kremasi selesai dilakukan, semua abu jenazah ditumpuk menjadi satu gundukan setinggi tiga meter (Shiho, hlm. 21, 2023). Hal ini menyebabkan pengembalian abu individu pasca kremasi massal menjadi tidak memungkinkan. Sebagai upaya penghormatan terhadap keluarga yang ditinggalkan, masing masing keluarga diberikan sejumput abu sebagai pengganti jenazah. Menurut Shiho, keluarga diberi sejumput abu gabungan untuk untuk mengenang mendiang (Shiho, hlm 22-23, 2023).

Kondisi ini mencerminkan bahwa terjadinya pemisahan ruang dan waktu secara fisik antara keluarga dan juga korban gempa. Secara tradisional, keluarga akan menemani jenazah mulai dari prosesi *otsuya* hingga mengantarkan jenazah memasuki krematorium dan akhirnya jasadnya berubah menjadi abu. Sementara itu, pasca peristiwa Gempa Kanto terjadi, keluarga hanya dapat melihat tumpukan abu tanpa mengetahui yang mana abu milik keluarganya secara spesifik. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa bagaimana modernitas memberikan konsekuensi melalui mekanisme pemisahan ruang dan waktu dalam konteks praktik pemakaman pasca Gempa Kanto.

Transformasi signifikan yang terjadi pada praktik pemakaman pasca Gempa Kanto, terutama melalui pelepasan nilai-nilai tradisional (*disembedding*) dan pemisahan ruang dan waktu (*time-space distancing*) secara mendalam menguji dan memberikan konsekuensi dalam sistem kepercayaan di Jepang. Rangkaian pemakaman yang dahulunya dilakukan seperti *otsuya*, *rokuyo*, dan adanya *Shuukotsu* (収骨) tidak dilakukan dengan meninjau banyaknya jumlah korban meninggal dunia, dan keterbatasan sumber daya. Dalam sudut pandang religi, sistem *rokuyo* yang melekat pada ajaran Buddhisme tidak lagi menjadi pertimbangan utama, baik dari pihak otoritas maupun masyarakat itu sendiri. Pergeseran ini terjadi atas munculnya urgensi kremasi massal yang menjadi bahan pertimbangan yang pada saat itu dirasa lebih darurat dibandingkan dengan aspek spiritual.



Gambar 6. Seorang biksu Buddha memanjatkan doa kepada arwah orang yang telah meninggal di depan gundukan abu

Sumber: koleksi pribadi J. Charles Schencking dalam buku *The Great Kanto Earthquake and The Chimera of National Reconstruction in Japan*

Meskipun beberapa ritus tersebut hilang, kehadiran biksu Buddha menggambarkan bahwa unsur religi yang seharusnya mengiringi praktik pemakaman tidak benar-benar menghilang. Setelah kremasi massal dilaksanakan, abu jenazah korban tidak serta-merta ditempatkan ke dalam guci atau *katsubo* (骨壺), tetapi dibiarkan di lahan terbuka selama beberapa hari. Selama durasi ini, para biksu Buddha atau *Obou* (お坊) secara konsisten melaksanakan pembacaan sutra setiap harinya. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5, seorang biksu berdiri di depan tumpukan abu jenazah korban sambil memanjatkan doa. Praktik ini merupakan bentuk penghormatan terhadap jenazah korban bencana gempa.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa, meskipun praktik pemakaman dilakukan dalam skala besar melalui kremasi massal dan adanya penghilangan ritus-ritus dalam prosesi pemakaman, peran biksu Buddha tetap menjadi esensi dalam praktik pemakaman. Hal ini dikuatkan oleh Schencking, bahwa biksu Buddha secara terus menerus melantunkan sutra untuk korban bencana, terlepas identitas korban diketahui atau tidak (Schencking, hlm. 105, 2013). Kehadiran dan keterlibatan aktif biksu Buddha dalam proses ini menjadi indikator penting bahwa nilai-nilai religi masih relevan secara mendalam dalam praktik pemakaman Jepang. Kehadiran biksu Buddha kemudian menegaskan adanya keterikatan tradisi leluhur dalam menghadapi peristiwa kematian di dalam masyarakat Jepang. Adaptasi ini menunjukkan reflektivitas dalam sistem kepercayaan itu sendiri, di mana masyarakat mengevaluasi dan menyesuaikan praktik pemakaman agar tetap memberikan makna spiritualitas di tengah kondisi krisis yang mendorong kearah modernisasi.



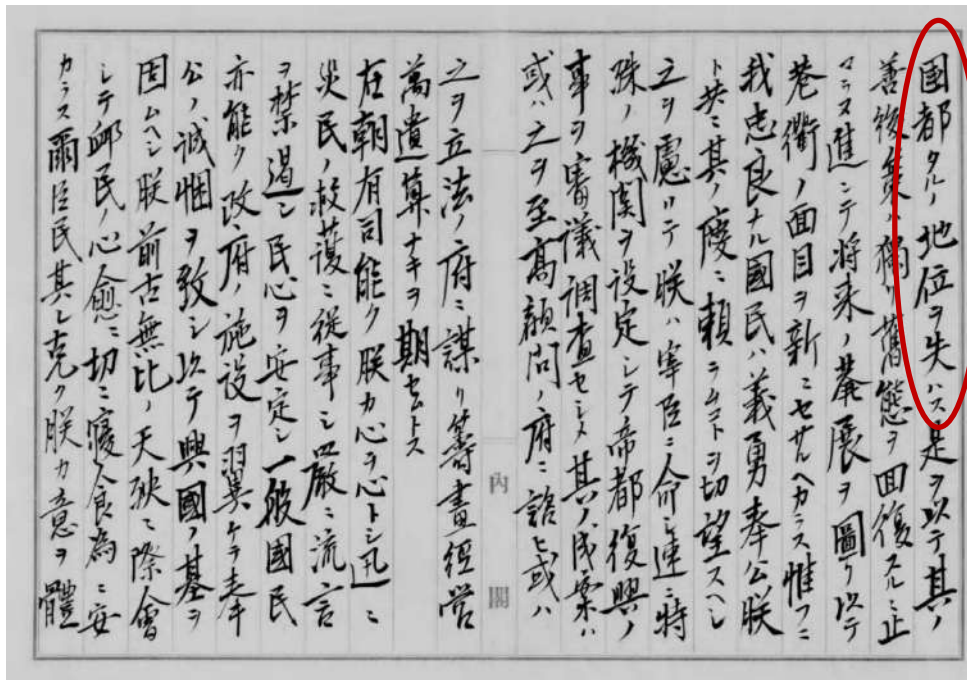
Gambar 7. Sisa-sisa jenazah yang terpisah dari bekas gudang pakaian Honjo

Sumber: Repository Duke University

Setelah beberapa hari didiamkan di tempat terbuka, akhirnya dilakukan upacara penghormatan yang dihadiri oleh menteri kabinet, perwakilan dari keluarga kekaisaran, dan biksu dari berbagai sekte agama besar di Jepang. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6, abu jenazah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 70 guci besar setelah dilakukannya upacara penghormatan. Hal ini dikuatkan oleh Shiho, seorang dermawan menyumbangkan 70 guci besar untuk menyimpan abu jenazah (Shiho, hlm. 21, 2023).

3.1.2 Rekonstruksi Kota Tokyo Pasca Gempa Kanto 1923

Pasca Gempa Besar Kanto tahun 1923, Jepang menghadapi tantangan besar dalam merekonstruksi ibu kota kekaisaran yang telah rusak parah. Dalam situasi darurat tersebut, Menteri Dalam Negeri Goto Shinpei merumuskan “Langkah-Langkah Fundamental untuk Rekonstruksi Ibu Kota Kekaisaran”, yang menegaskan bahwa ibu kota tidak akan dipindahkan. Prinsip ini dikuatkan oleh draf dekret kekaisaran yang disetujui oleh Kabinet Yamamoto yang menyatakan bahwa status Tokyo sebagai pusat negara tidak akan hilang. Menurut artikel dari Yayasan Umum Terpadu, Institut Pembangunan Jepang, kebijakan ini meliputi; (1) Ibu kota negara tidak akan dipindahkan; (2) Kebutuhan biaya rekonstruksi sebesar 3 miliar yen; (3) Penerapan perencanaan kota modern bergaya Eropa dan Amerika. Selain itu, pemerintah mengambil sikap tegas terhadap kepemilikan tanah demi kelancaran rekonstruksi (General Incorporated Foundation, Japan Development Institute, 2014).



Gambar 8. Draft dekrit kekaisaran yang disetujui oleh Kabinet 'Status ibu kota nasional tidak akan hilang'

Sumber: www.digital.archives.go.jp

Dekret kekaisaran yang dapat dilihat pada Gambar 7, 「（東京は）国都タルノ地位ヲ失ハス」 (*Tokyo wa kokudo taruno chii o shitsu hasu*), yang berarti Tokyo tidak akan kehilangan statusnya sebagai ibu kota nasional (National Diet of Japan, 2024). Dekrit ini menegaskan bahwa Tokyo tetap menjadi ibu kota kekaisaran, meskipun kota itu telah hancur akibat bencana. Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa Tokyo adalah pusat politik dan ekonomi, sumber budaya nasional, serta simbol yang dihormati rakyat. Bencana besar ini tidak menghilangkan kedudukannya, melainkan menjadi titik awal untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui pembaruan kota yang ideal.

Kemampuan pemerintah untuk melakukan rekonstruksi berskala masif dengan visi modern ini sangat didukung oleh empat lembaga dasar modernitas oleh Giddens. Industrialisme menjadi peran yang krusial dalam upaya pemerintah Jepang untuk membentuk negara yang ideal. Konsep penyesuaian lahan (*land readjustment*) menjadi pilar utama sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana, yang memungkinkan pemerintah untuk menata ulang lahan dan lingkungan perkotaan secara paksa. Melalui Undang-Undang Perencanaan Kota Khusus atau *Tokubetsu Toshi Keikaku Ho* (特別都市計画法) yang diberlakukan pada Desember 1923 (Yanase dkk., hlm. 66, 2018). Tujuan utamanya yaitu menciptakan struktur kota yang lebih teratur, efisien, dan tahan bencana, seperti dengan membangun jalan yang lebih lebar dan taman-taman besar sebagai pembatas api. Hal ini merupakan bentuk industrialisme dalam produksi lahan kota yang terorganisir dan efisien.

Rekonstruksi ini merupakan investasi besar yang dirancang untuk memulihkan dan memperkuat pusat ekonomi negara. Hal ini secara jelas memberikan gambaran bagaimana sistem kapitalisme berjalan. Pemerintah mengeluarkan keputusan terhadap kepemilikan tanah, termasuk kemungkinan menyita 10% lahan pribadi tanpa kompensasi. Hal ini diatur lebih lanjut oleh Dekrit Kekaisaran *Chokurei Dai 49 Go* (勅令第49号) pada Maret 1924, yang secara rinci mengatur prosedurnya. Dalam dekrit ini, pemerintah bahkan dapat menyita hingga 10% lahan pribadi dari pemilik tanpa kompensasi moneter. Hal ini dikuatkan oleh Yanase, bahwa pemerintah dapat menyita 10% lahan pribadi dari pemilik tanah tanpa kompensasi moneter, dengan kompensasi hanya diberikan jika kerugian melebihi batas (Yanase dkk., hlm. 66, 2018). Kebijakan ini

menunjukkan bagaimana pemerintah memprioritaskan efisiensi dan kepentingan ekonomi makro untuk mempercepat pemulihan kota. Berdasarkan dekrit ini juga dapat dilihat bahwa, pemerintah mengorbankan hak properti individu demi kelancaran investasi kapital dalam rekonstruksi kota. Hal ini kemudian menjadi tanda bagaimana pemerintah Jepang memutuskan kebijakan yang rasional berdasarkan alur pemikiran kapitalisme.

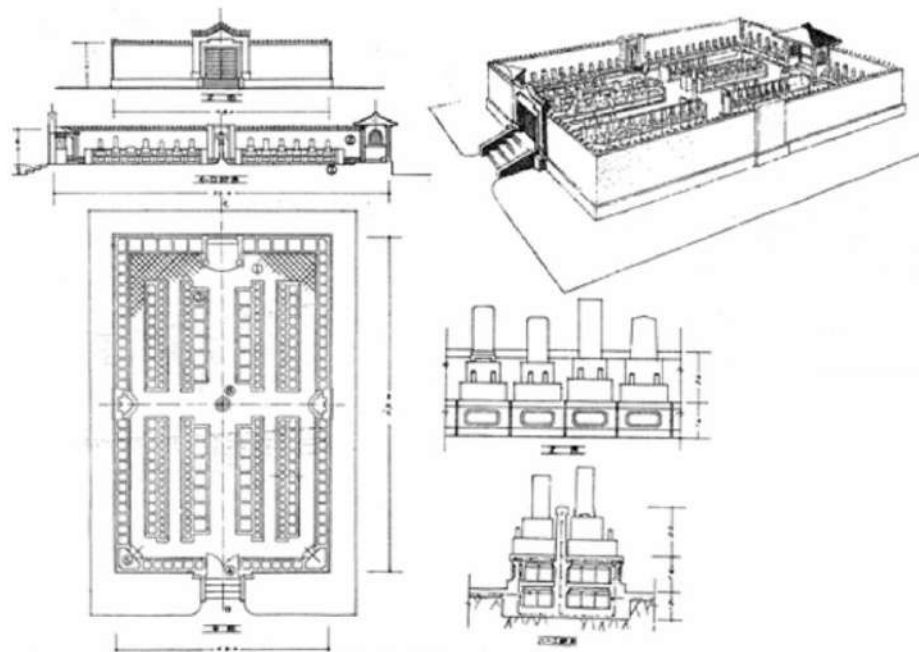
Pemerintah tidak hanya merelokasi fasilitas publik seperti kuil dan pemakaman dari pusat ke pinggiran kota, tetapi juga mampu secara paksa menata ulang seluruh lingkungan kota. Hal ini menggambarkan bentuk kontrol dan pengawasan ruang sosial yang ketat dari pemerintah Jepang, di mana negara memiliki kekuatan untuk menata ulang tata ruang kota demi kepentingan mitigasi dan risiko di masa depan. Kemampuan dalam bentuk penerapan kebijakan yang sangat tegas terhadap kepemilikan tanah, termasuk penyitaan lahan paksa. Hal ini kemudian menunjukkan bagaimana otoritas negara didukung oleh kekuatan militer memastikan kelancaran implementasi rencana rekonstruksi. Namun, kebijakan ini menghadapi penolakan dari kalangan kuil yang menjunjung nilai sakral. Seorang arsitek Jepang, Ito Chuta tetap berpegang bahwa kuil harus selalu terbuat dari kayu karena nilai spiritualnya yang tidak dapat tergantikan. Hal ini dikuatkan oleh Laporan Komite Ahli tentang Warisan Bencana Pelajaran yang Dipetik dari Gempa Besar Kanto 1923 [Bagian 3]:

「神社は人間の住宅ではなくして神霊の在ます宮居である」がゆえに神社は永久に木造であり、その精神は不変である。 *jinja wa ningen no juutakude wa naku shite shinrei no zai masu miyaidearu' ga yueni jinja wa eikyuu ni mokuzoudeari, sono seishin wa fuhendearu*. Yang berarti Kuil bukanlah tempat tinggal manusia, melainkan istana tempat bersemayam roh-roh suci," dan karena itu kuil dibuat dari kayu selamanya, dan rohnya tidak berubah (Komite Ahli tentang Warisan Bencana, hlm.186, 2009).

Penolakan tersebut memaksa pemerintah menunda kebijakan relokasi terhadap kuil-kuil yang hancur akibat gempa. Hal ini dikuatkan oleh Shiho, bahwa banyak pihak kuil yang tidak setuju atas kebijakan ini, sehingga pemerintah harus menunda kebijakan relokasi (Shiho, hlm. 27, 2023). Dengan keterbatasan lahan dan desakan pembangunan infrastruktur besar-besaran, pembangunan Osuarium⁸ menjadi solusi untuk menjawab permasalahan lahan. Penolakan ini menunjukkan bahwa adanya pandangan pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan antara rasionalitas modern pemerintah dan pandangan terhadap nilai-nilai tradisional dari masyarakat Jepang.

Permasalahan lahan telah menjadi problematika tersendiri bahkan sebelum Gempa Kanto terjadi. Hal ini terjadi akibat urbanisasi dan kepadatan penduduk yang memenuhi kota Tokyo. Menurut Shiho, di kota Tokyo terdapat 900-1000 pemakaman yang berlokasi di kuil-kuil kota dan hampir semua terisi penuh (Shiho, hlm.8, 2023). Hal ini menyiratkan bahwa gempa bukan satu-satunya motivasi pemerintah dalam melaksanakan rekonstruksi. Bagi sebagian tokoh reformis seperti mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang bernama Abe Isoo, gempa ini justru menjadi peluang untuk mempercepat reformasi sosial yang telah lama diperjuangkan, seperti penghapusan prostitusi dan pelarangan alkohol. Hal ini dikuatkan oleh Schencking, bahwa Abe menyebut Gempa Kanto sebagai “anugerah”, karena memberikan kesempatan bagi perubahan nilai-nilai sosial dan arah pembangunan kota Tokyo menjadi kota yang lebih ideal (Schencking, hlm.307, 2008).

⁸ Osuarium adalah peti, kotak, atau bangunan yang digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir untuk sisa-sisa kerangka manusia. Biasanya, osuarium digunakan di daerah dengan lahan pemakaman terbatas untuk menghemat ruang (merriam-webster.com, 2025).



Gambar 9. Referensi gambaran fasilitas osuarium khusus korban bencana

Sumber: Gambar oleh Yasumoto Inoue dalam *Kantoudaishinsai to ihai noukotsu-dou haka* pada tahun 1941

Sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pasca Gempa Kanto dan mengatasi keterbatasan lahan, pemerintah Jepang memutuskan mengubah gudang pakaian Honjo menjadi sebuah lahan *memorial* dan pemakaman bagi korban gempa. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi kremasi massal 38.000 jenazah, sebagian besar jenazah ini tidak dapat teridentifikasi. Dalam pelaksanaan penyesuaian lahan pasca Gempa Kanto, pemerintah mengimplementasikan pembangunan osuarium sebagai langkah untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan lahan. Pada Gambar 8, Yasumoto menggambarkan referensi terkait osuarium khusus yang akan dijadikan tempat penyimpanan abu jenazah korban Gempa

Kanto, dan dapat menampung 58.000 tubuh korban yang tidak dapat diidentifikasi. Hal ini dapat juga disinggung oleh Karacas:

Given the tragic nature of the immense loss of life that occurred here, municipal authorities abandoned their original plans for a sports oriented layout for the park. They instead decided to turn the space into a memorial site, the central feature of which would be a charnel house to holding the cremated remains of Tokyo's 58.000, unidentified and unclaimed victims of the fires (Karacas, hlm. 31, 2006).

Desain dari osuarium ini sendiri terinspirasi dari pemakaman kremasi di Pemakaman Ohlsdorf, Hamburg, Jerman. Hal ini dikuatkan oleh Shiho, bahwa sebelum Gempa Besar Kanto, para insinyur taman Jepang telah mengunjungi pemakaman di Inggris, Prancis, Jerman, Austria, Amerika Serikat, dan negara-negara lain, mereka merencanakan untuk membuat pemakaman yang terinspirasi dari pemakaman taman di Jerman (Shiho, hlm. 28, 2023). Selain itu, pemerintah Jepang tidak hanya berfokus pada respon darurat, tetapi juga rekonstruksi pada ibu kota. Hal ini merupakan tindakan refleksif dari pemerintah yang mengevaluasi dari bencana dan secara sadar berupaya membangun masa depan yang lebih baik melalui revitalisasi kota. Rekonstruksi yang dijalankan secara masif ini melibatkan biaya besar dan penerapan perencanaan kota yang modern, serta sikap tegas pemerintah terhadap kepemilikan tanah. Dalam konteks ini, pembangunan osuarium merupakan manifestasi dari reflektivitas pemerintah yang menunjukkan bagaimana otoritas modern mencari solusi rasional dan efisien masalah yang kompleks. Giddens berpendapat bahwa reflektivitas memungkinkan aktor sosial untuk terus-menerus memantau dan mengevaluasi tindakan mereka serta mengimplementasikannya demi masa depan. Pada konteks ini, pemerintah membangun

osuarium untuk mengenang korban-korban bencana Gempa Kanto. Hal ini mengacu pada pandangan reflektivitas bahwa selain mengimplementasikan nilai-nilai yang ada, masyarakat juga berpandangan untuk masa depan.

Pada era tradisional keluarga memegang peran penting dalam praktik pemakaman, termasuk ritual yang melibatkan pengambilan tulang belulang jenazah pasca kremasi (*shuukotsu*) dan pemakaman individual, pembangunan osuarium menggeser peran ini. Abu jenazah korban gempa, yang sebagian besar tidak teridentifikasi, dikumpulkan dan disimpan secara kolektif dalam satu ruangan khusus yang dikelola oleh institusi formal atau pemerintah, bukan lagi oleh keluarga atau kuil secara individual. Masyarakat modern menyerahkan kepercayaan terhadap otoritas yang dianggap lebih ahli atau *expert* dalam penanganan sisa jenazah skala besar. Hal Ini merupakan perwujudan dari *expert system* Giddens, di mana kepercayaan dialihkan kepada sistem teknis dan sifatnya yang profesional yang mengorganisir aspek kehidupan sosial, termasuk pengelolaan kematian massal. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem ahli secara mendasar merujuk kepada konsep mekanisme pelepasan yang diutarakan oleh Giddens. Mekanisme pelepasan (*disembedding*) merupakan proses lepasnya praktik sosial dari konteks lokal ke bentuk sosial dengan sistem abstrak. Dengan begitu, proses pemakaman yang dilakukan oleh pemerintah dengan meletakkan abu di osuarium adalah salah satu bentuk konsekuensi modernitas yang terjadi dengan munculnya kepercayaan terhadap sistem ahli.



Gambar 10. Gedung Peringatan Lokasi Bencana Gempa Bumi Honjo Hifukusho

Sumber: Repository Duke University

Osuarium ini secara resmi dibuka pada tanggal 1 September 1930. Kemudian osuarium tempat abu jenazah korban gempa menjadi bagian dari Earthquake Memorial Hall yang diberi nama taman Yokoami. Pada Gambar 9, dapat dilihat antusiasme warga dan turut datang ke Taman Yokoami. Menurut Karacas, peresmian dilaksanakan bertepatan dengan peringatan ke-7 tahun pasca gempa terjadi dan warga Tokyo berbondong-bondong ke Taman Yokoami untuk melihat peresmian gedung baru tersebut (Karacas, hlm. 31, 2006).

Sejak peresmian pada tahun 1930, layanan peringatan tahunan dilaksanakan di taman Yokoami pada tanggal terjadinya Gempa Kanto. Dengan struktur monumen lainnya, taman Yokoami menjadi ruang memorial dan ritual di mana kota mengingat Gempa Kanto pernah terjadi serta mengenang korban yang meninggal dunia akibat gempa. Pembangunan osuarium dan penyesuaian lahan menunjukkan bagaimana modernitas

memberikan konsekuensi pemisahan ruang dan waktu (*time-space distancing*). Konsep pemisahan ruang dan waktu merujuk pada interaksi sosial terjadi melampaui batasan yang tercipta akibat keterbatasan ruang dan waktu. Dengan pembangunan osuarium, tradisi pemakaman yang terikat pada lokasi pemakaman keluarga yang tersebar dan ritual yang spesifik waktu, kini digantikan oleh satu tempat penyimpanan abu massal yang terpusat hal ini memberikan gambaran bagaimana pembangunan osuarium menjadi salah satu konsekuensi dari modernitas itu sendiri.



Gambar 11. Interior dalam osuarium tempat abu jenazah gempa kanto

Sumber: Foto diambil oleh Cary Karacas dalam artikel jurnalnya yang berjudul *Buckets, Bombs, and Bodies: Rights to the Japanese City the Tokyo Air Raids*

Pasca kremasi massal, abu jenazah disimpan dengan ditumpuk dalam osuarium ini seperti yang dapat dilihat pada Gambar 10. Berbeda dengan praktik tradisional di mana setiap individu dimakamkan secara personal dan biksu akan membacakan doa kesetiap individu tersebut. Pasca Gempa Kanto, abu para korban ditumpuk di dalam osuarium,

namun dapat dilihat pada Gambar 10, bahwa adanya persembahan yang diletakan diatas meja di depan tumpukan *kotsutsubo* (guci yang berisikan abu jenazah). Dalam pandangan Giddens, masyarakat modern tidak sepenuhnya meninggalkan agama, melainkan terjadi sebuah adaptasi yang menunjukkan reflektivitas dalam sistem kepercayaan itu sendiri. Giddens berpendapat bahwa reflektivitas memungkinkan aktor sosial untuk terus-menerus memantau, menilai, dan menyesuaikan tindakan mereka berdasarkan perubahan informasi dan kondisi.



Gambar 12. Gedung Peringatan Lokasi Bencana Gempa Bumi Honjo Hifukusho
Sumber: Repository Duke University

Dalam konteks ini, masyarakat Jepang dan pihak kuil mengevaluasi dan menyesuaikan praktik pemakaman mereka agar tetap memberikan makna spiritualitas di tengah kondisi krisis yang mendorong modernisasi. Dalam bentuk praktik pemakamannya, kremasi massal tidak mengindahkan konsep tradisional. Ritus-ritus

tradisional seperti *Otsuya* (malam berjaga), *Shuukotsu* (pengambilan sisa tulang belulang jenazah), *kokubetsushiki* (penghormatan dan ucapan perpisahan) tidak terjadi dengan tekanan pada masa krisis. Kemudian, agama menemukan cara-cara baru untuk berinteraksi dengan realitas modern, menawarkan alternatif baru dalam memberi makna tersendiri di tengah krisis sosial. Hal ini menggambarkan bagaimana pembangunan osuarium yang dinilai sebagai solusi terhadap efisiensi lahan menjadi memberikan konsekuensi terhadap sistem kepercayaan. Taman Yokoami dijadikan sebuah gedung peringatan bagi korban gempa, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 11. Upacara penghormatan massal yang bahkan tetap dilakukan hingga bertahun-tahun pasca peristiwa Gempa Kanto terjadi. Hal ini memberikan contoh bahwa dengan adanya transformasi dalam bentuk makam serta praktik pemakamannya tidak secara menyeluruh menghilangkan unsur-unsur religi yang melekat pada pemakaman di Jepang.

3.2 Praktik Pemakaman Pasca Perang Dunia Kedua (1939-1945)

Perang Dunia II menjadi salah satu peristiwa yang paling mematikan di dunia dan memberikan dampak pada hampir seluruh aspek kehidupan sosial. Dalam konflik ini, Jepang muncul sebagai salah satu aktor dengan ambisi ekspansionis di wilayah asia. Kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1904 hingga 1905 menjadikan Jepang sebagai negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di asia. Hal ini, menjadi pendorong awal keyakinan Jepang terhadap kapabilitas militernya. Keyakinan ini semakin divalidasi pasca keberhasilan Jepang dalam menguasai Korea pada tahun 1910. Hal ini dikuatkan

oleh Sorensen, bahwa Jepang semakin berambisi untuk memperluas daerah kekuasaannya di Asia setelah berhasil menguasai dataran Korea (Sorensen, hlm. 386, 2001).

Pada tahun 1930, krisis ekonomi global terjadi dan keterbatasan sumber daya, menjadi salah satu pemicu Jepang untuk mencari sumber daya pada wilayah baru. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Jepang melakukan invasi ke Manchuria, China pada 1931. Manchuria sendiri dianggap memiliki potensi sumber daya alam yang dapat memenuhi Pembangunan ekonomi Jepang. Menurut Mutter, Manchuria dipandang sebagai produsen sumber daya alam untuk perlindungan industri di Jepang dan daerah penting yang harus dilindungi dari pendudukan oleh kekuatan asing (Mutter, hlm. 8, 2004). Jepang memandang dirinya sebagai “Pelindung Asia” yang merupakan bagian dari mimpinya untuk menciptakan dan mengendalikan Asia Timur Raya. Kemudian hal ini menjadi titik awal keterlibatan Jepang dalam konflik yang lebih luas, yaitu Perang Dunia II.



Gambar 13. Setelah menandatangani Pakta Tripartit pada tanggal 27 September 1940

Sumber: warfarehistorynetwork.com

Pada tahun 1940, Jepang bergabung dengan Blok Axis atau Blok Poros bersama dengan Jerman dan Italia untuk melawan Blok Sekutu yang terdiri dari negara Inggris, Prancis, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan China. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 12, Duta Besar Jepang untuk Jerman, Saburo Kurusu berpidato di sebuah pertemuan di Berlin. Pertemuan ini dihadiri oleh Adolf Hitler sebagai politikus Jerman dan pemimpin partai Nazi yang berada dipaling kanan dan Menteri Luar Negeri Italia, Count Galeazzo Ciano. Bergabungnya Jepang dengan Blok Poros bukan hanya dengan alasan militer, tetapi juga karena ideologi fasis yang menentang komunisme. Hal ini juga disinggung oleh Koshiro, bahwa tujuan awal perang Jepang bukan hanya untuk menyingkirkan pengaruh Euro-Amerika dari Asia, tetapi juga untuk menyingkirkan pengaruh Komunis (Koshiro, hlm. 437, 2001).

Ketika Perang meledak di Eropa tahun 1939, Jepang belum terlibat secara langsung. Namun, dengan memanfaatkan kekacauan global, Jepang berhasil meluncurkan aksi ekspansi wilayah di Asia Tenggara. Hal ini dikuatkan oleh Daniels, pada awal perang di Eropa, Jepang tidak yakin dan khawatir akan terlibat dalam konflik baru. Namun, keberhasilan Jerman pada musim panas 1940 membawa peluang bagi Jepang (Daniels, hlm. 33, 2004). Ambisi ini kemudian memuncak pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang meluncurkan serangan mendadak ke Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini memicu deklarasi perang dari Amerika Serikat yang kemudian ikut bergabung dengan Blok Sekutu untuk melawan Blok Poros. Hal ini menjadikan Jepang sebagai salah satu aktor utama dalam medan Perang Dunia II di kawasan Pasifik, perang ini dijuluki sebagai *The Pacific War*.

Beberapa tahun setelahnya, Jepang berhasil menguasai wilayah-wilayah di Asia Tenggara seperti Filipina, Indonesia, Burma (Myanmar), Malaya, dan sebagian besar kawasan pasifik. Keberhasilan ini merupakan bagian dari strategi ekspansionis Jepang yang dikenal sebagai “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” (*Greater East Asia Co-Prosperity Sphere*) yang bertujuan untuk membebaskan negara-negara Asia dari kolonialisme barat, meskipun pada praktiknya Jepang bertindak seperti penjajah baru. Namun, pada tahun 1943 hingga 1944, seiring dengan meningkatnya kekuatan industri dan militer Amerika Serikat serta sekutunya, Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai bidang dalam peperangan. Menurut Tillman, Dominasi kekuatan militer pihak sekutu berakhir menjadi pukulan telak bagi Jepang, terutama setelah pertempuran besar seperti *Battle of Midway* dan *Battle of the Philippine Sea* (Tillman, hlm.168, 2010). Hingga pada tahun 1945, Jepang mendapatkan serangan udara dengan bom pembakar di kota Tokyo sebagai jantung dari negara Jepang, hal ini kemudian menjadi salah satu faktor utama Jepang menyerah pada sekutu dalam Perang Dunia II.

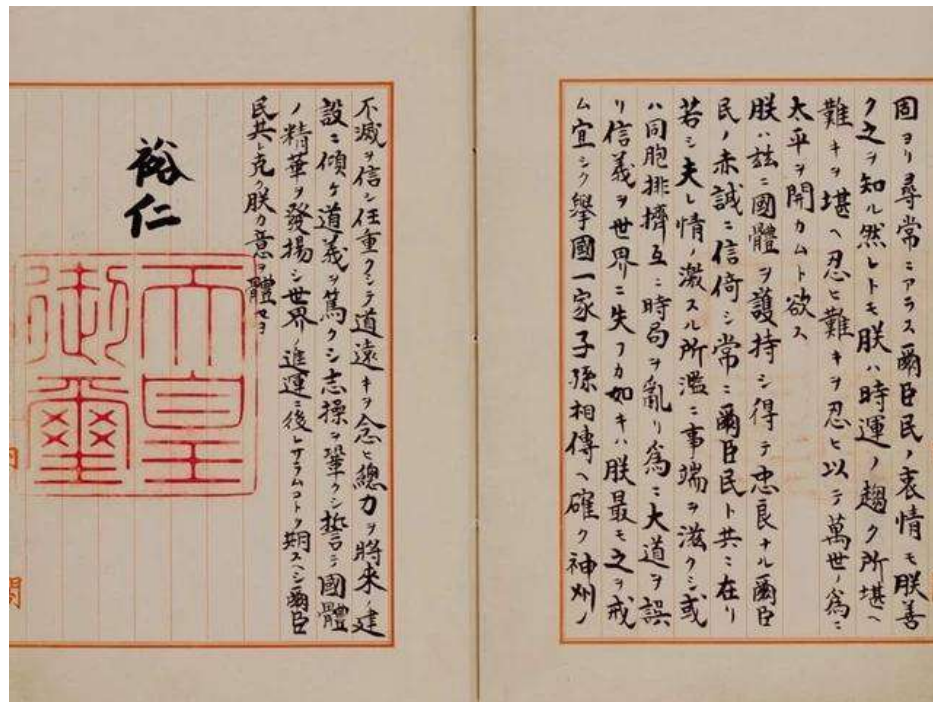


Gambar 14. Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu menandatangani dokumen penyerahan diri Jepang

Sumber : www.globe.asahi.com

Puncaknya terjadi pada tahun 1945, Jepang mendapatkan serangan udara dengan bom pembakar di kota Tokyo sebagai jantung dari negara Jepang pada bulan Maret. Tidak sampai disitu, pada 6 dan 9 Agustus 1945, saat Amerika Serikat menjatuhkan dua bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Sekitar 200.000 orang meninggal akibat ledakan dan radiasi dalam hitungan hari hingga bulan. Dalam kondisi militer yang hancur, ekonomi lumpuh, dan rakyat mengalami penderitaan luar biasa. Pada tanggal 2 September 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini ditandai dengan penandatanganan dokumen penyerahan diri Jepang yang dilakukan pada pukul 9 pagi di atas kapal U.S.S Missouri di teluk Tokyo. Pada Gambar 13, dapat dilihat Menteri Luar Negeri Jepang,

Mamoru Shigemitsu sedang menandatangani perjanjian yang dihadiri oleh prajurit sebelah kiri yaitu Jenderal Douglas MacArthur.



Gambar 15. Reskrip Kekaisaran asli tentang Pengakhiran Perang disimpan di Arsip Nasional Jepang

Sumber: www.globe.asahi.com

Pada siang hari tanggal 15 Agustus 1945 Reskrip Kekaisaran tentang Pengakhiran Perang Asia Timur Raya (大東亜戦争終結に関する詔書) yang dapat dilihat pada Gambar 14 dibacakan dan disiarkan melalui radio *Japan Broadcasting Corporation* ke seluruh penjuru negeri. Dalam reskrip ini Kaisar Hirohito menekankan pertimbangan Kekaisaran terhadap angka kematian akibat perang, Jepang memutuskan

untuk menyelesaikan situasi saat ini melalui tindakan darurat. Dengan demikian, Perang Dunia II pun resmi berakhir.

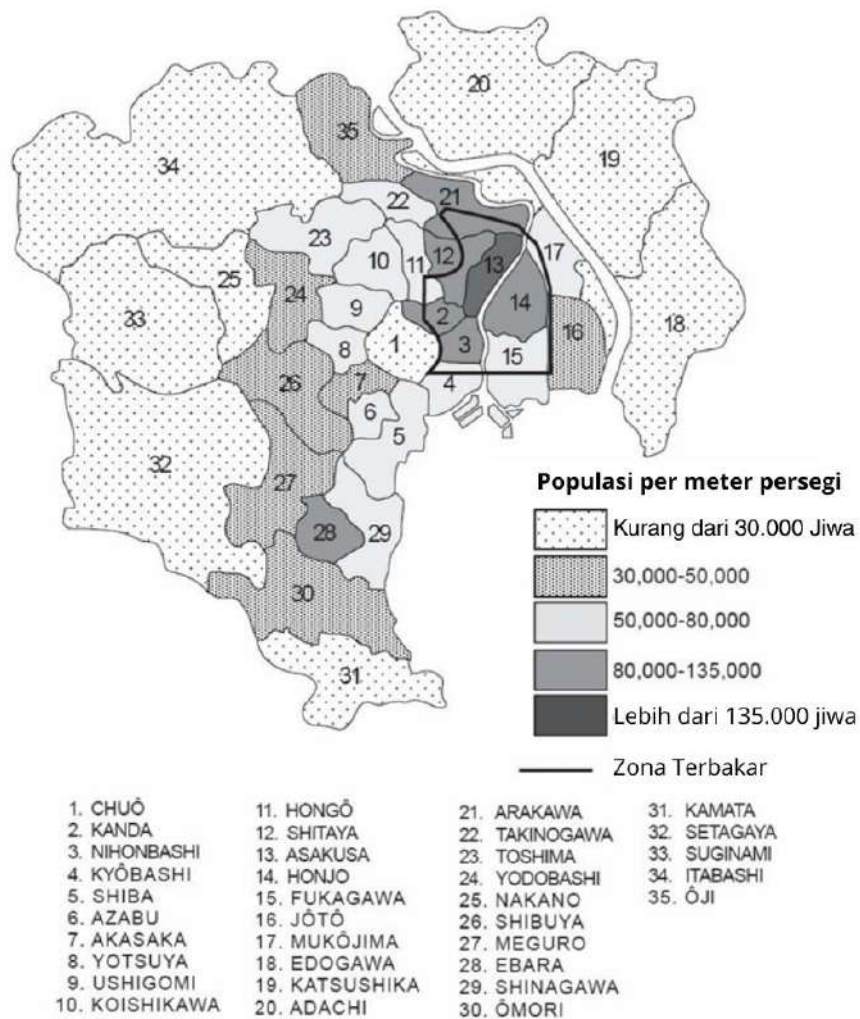
Walaupun perang telah berakhir, dampak yang dirasakan pasca perang menjadi salah satu risiko baru bagi pemerintah Jepang. Tidak hanya dalam bentuk kehancuran fisik akibat serangan udara di kota-kota vital seperti Tokyo, Osaka, tetapi juga kehancuran struktur sosial dan simbolik masyarakat Jepang. Selama masa perang, kematian menjadi erat dengan ideologi negara.

3.2.1 Tokyo Air Raid Maret 1945

Pada tahun 1945, Jepang dikejutkan serangan udara dari Amerika di Tokyo (*Tokyo Air Raid*) pada tanggal 9 hingga 10 Maret, di mana lebih dari 100.000 warga sipil tewas dalam satu malam akibat bom. Menurut Karacas, pengeboman ini dipusatkan pada Tokyo sebagai ibu kota untuk melumpuhkan produksi industri Jepang dan menekan Jepang untuk menyerahkan diri kepada sekutu (Karacas, hlm. 16, 2006). Pada saat itu, Tokyo merupakan pusat politik dan juga pemerintahan, serta pusat transportasi di mana semua jalur besar berpusat di Tokyo. Hal ini menunjukkan bagaimana peristiwa Tokyo Air Raid sebagai bentuk cerminan dari modernitas. Peran industrialisme sangat terasa dalam pembentukan kerentanan kota Tokyo sebagai pusat industri dan pemerintahan. Tokyo berperan sebagai pusat industri yang memasok sumber daya kebutuhan selama perang berlangsung. Hal ini juga menunjukkan bagaimana aset-aset kapital dan pusat produksi industri Jepang menjadi target utama dalam konflik modern.

Pada masa perang, fokus pemerintah Jepang terdapat pada pengawasan terhadap perang itu sendiri. Sehingga sedikit banyak dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan sipil dilakukan oleh otoritas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran atau pengalihan fokus pengawasan dari ranah sipil yang lebih personal menjadi ranah militer dan keamanan yang sifatnya nasional. Pada peristiwa Tokyo Air Raid, kekuatan militer menjadi penyebab langsung bagaimana kekuatan militer modern mempengaruhi warga sipil. Di sisi lain, ideologi militer juga mempengaruhi pandangan masyarakat sipil terhadap berbagai aspek kehidupannya. Hal ini kemudian menumbuhkan sisi patriotisme pada masyarakat untuk membela negerinya.

Peristiwa Tokyo Air Raid memberikan dampak yang cukup fatal bagi Jepang dalam masa peperangan. Pada malam hari tanggal 9 hingga 10 Maret 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom-bom pembakar dan menargetkan lahan pemukiman warga untuk melancarkan *Area Bombing* atau bom pembakar untuk dijadikan target eksperimen. Hal ini dikuatkan oleh Searle, Tokyo dipilih secara khusus untuk menguji efektivitas serangan api karena struktur bangunan kayunya dan kepadatan yang ekstrem (Searle, hlm. 113, 2002).



Gambar 16. Kepadatan penduduk kota Tokyo tahun 1940 dan area target serangan udara 9-10 Maret 1945

Sumber: Kartografi oleh Cary Karacas dalam artikel jurnalnya yang berjudul *Buckets, Bombs, and Bodies: Rights to the Japanese City the Tokyo Air Raids*

Berdasarkan Gambar 15, kepadatan penduduk Tokyo tahun 1945 pada area 12 mil persegi mencapai 1.3 juta jiwa dengan distrik yang memiliki kepadatan tertinggi yaitu Asakusa dengan jumlah lebih dari 135 ribu jiwa dan distrik di sekitarnya seperti Kanda, Nihonbashi, dan Honjo yang berjumlah 80 hingga 130 ribu jiwa. Tingginya angka kepadatan penduduk ini menempatkan Tokyo sebagai kawasan urban yang rawan akan

bencana, terutama kebakaran besar. Hal ini merupakan konsekuensi dari industrialisasi yang mendorong urbanisasi masif tanpa diimbangi dengan pengadaan infrastruktur yang memadai. Meskipun adanya rencana rekonstruksi pasca Gempa Kanto 1923, pada nyatanya rekonstruksi ini tidak sepenuhnya berjalan. Tujuan awal rekonstruksi adalah membangun kota yang tahan terhadap bencana terutama pada kebakaran. Upaya pemerintah pada kala itu adalah mengganti bangunan kayu di Tokyo dengan material yang lebih tahan terhadap api. Menurut Karacas, 90% rencana rekonstruksi tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1930 (Karacas, hlm. 9, 2006).

Kembali pada peristiwa sebelumnya yaitu Gempa Kanto, pada Desember 1923, anggota parlemen mengurangi anggaran rekonstruksi yang semulanya senilai 1,37 miliar Yen, menjadi setidaknya 720 juta Yen. Logika kapitalisme secara signifikan memengaruhi prioritas pemerintah dan keberlangsungan rekonstruksi. Pengurangan anggaran ini dapat menghambat implementasi rencana rekonstruksi jangka panjang terutama pada mitigasi bencana. Berdasarkan Laporan Komite Ahli tentang Warisan Bencana Pelajaran yang Dipetik dari Gempa Besar Kanto 1923 [Bagian 1], bahwa pada tanggal 21 November, kerangka anggaran rekonstruksi ditetapkan menjadi sedikit di atas 720 juta yen oleh Kementerian Keuangan, dan ini memaksa pengurangan rencana rekonstruksi di luar area yang terbakar (Komite Ahli tentang Warisan Bencana, hlm. 12, 2009). Kegagalan dalam rekonstruksi ini menjadi salah satu penyebab utama penyebaran api yang sangat cepat dan mengakibatkan Jepang kembali mengalami bencana kebakaran yang dahsyat pada Maret 1945.

Kembali Pada pengeboman udara Tokyo tanggal 9-10 Maret 1945, setelah pengeboman terjadi, Tokyo mengalami kebakaran hebat. Dalam upaya penanggulangan bencana, kuil-kuil memainkan peran vital sebagai tempat evakuasi, serta tempat penampungan jenazah korban. Kehadiran dokter juga memainkan peran dalam menangani para korban secara langsung di lokasi. Dalam penanganan jenazah, *Field Report Covering Air-Raid Protection and Allied Subjects* mencatat bahwa tubuh-tubuh korban ditempatkan di kompleks kuil atau ruang terbuka publik lainnya yang mudah diakses (Civilian Defense Division, hlm. 88, 1947). Tubuh tubuh korban tidak langsung di makamkan, melainkan sementara waktu ditempatkan di area-area terbuka seperti kompleks kuil dan ruang publik lainnya. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi identifikasi korban serangan udara sebelum akhirnya di kremasi oleh pihak keluarga, otoritas lokal, atau relawan perang. Selain itu, penggunaan tempat publik menjadi tempat evakuasi sementara mencerminkan keterbatasan infrastruktur kota dalam menghadapi skala kematian yang masif, sekaligus menggambarkan bagaimana masyarakat merefleksikan bagaimana pemerintah melakukan penanggulangan bencana pada peristiwa sebelumnya yaitu Gempa Kanto (1923).



Gambar 17. Foto oleh Ishikawa Kouyou ‘*Dampak serangan udara Tokyo pada tahun 1945, menunjukkan kerusakan dan puing-puing*’

Sumber: www.jenikirbyhistory.getarchive.net

Pasca serangan udara, Banyak korban tidak bisa diidentifikasi, karena kondisi tubuh yang terbakar dan hancur seperti yang dapat dilihat pada Gambar 16. Beberapa tempat publik diubah menjadi titik kremasi sementara. Secara tradisional, proses kremasi dilakukan pada tempat-tempat sakral seperti kuil, namun berkaca dari peristiwa sebelumnya yaitu Gempa Kanto (1923), dalam pengelolaan jenazah korban bencana dilakukan kremasi massal dengan pertimbangan higienitas dan mencegah epidemi. Selain itu, pihak kuil dan dokter mendikte dengan tegas batasan waktu dalam penyimpanan jenazah korban. Hal ini dikuatkan dalam *Field Report Covering Air-Raid Protection and Allied Subjects*, laporan ini juga menggarisbawahi keharusan penyimpanan jenazah, yaitu

maksimal dua hari dalam cuaca panas, dan empat hari dalam suhu yang relatif rendah (Civilian Defense Division, hlm. 88, 1947).

Dalam masa perang ini, pemerintah cenderung berfokus terhadap perang itu sendiri, sehingga pemakaman dilakukan atas kesadaran otoritas lokal dan komunitas atas pengelolaan jenazah korban. Praktik ini secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana tradisi pemakaman lama masih tetap hidup dan dijalankan di tengah situasi krisis. Menariknya, kembalinya tanggung jawab atas praktik pemakaman oleh komunitas lokal tidak bisa dianggap sebagai kemunduran sosial. Sebaliknya fenomena ini merupakan manifestasi dari apa yang disebut oleh Giddens sebagai *reembedding*. Menurut Giddens, *reembedding* terjadi ketika masyarakat dapat menerapkan kembali praktik tradisional, namun dengan kesadaran dan konteks yang baru.

Dalam konteks modernitas, praktik-praktik lama tersebut tidak sekadar didaur ulang secara mentah, melainkan diadaptasi dan digunakan kembali dengan perspektif yang lebih fungsional dan relevan terhadap kebutuhan zaman. Dengan demikian, proses ini menunjukkan bagaimana tradisi dan modernitas dapat berinteraksi secara dinamis, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan seperti masa perang. Menurut Giddens dalam Ritzer, dunia modern diposisikan dalam pengertian radikal tentang sejarah, dan mampu memanfaatkannya (Ritzer, hlm. 552, 2011). Maka dengan penggunaan kembali praktik pemakaman sejalan dengan konsep kosekuensi modernitas Giddens yaitu reflektivitas (*reflexivity*). Reflektivitas merupakan situasi di mana masyarakat tidak lagi menerima situasi secara pasif, tetapi secara terus-menerus memantau, merefleksikan, dan menyesuaikan tindakan dan praktik sosial mereka berdasarkan informasi dan pengalaman

yang ada di kehidupan. *Reembedding* sendiri merupakan konsekuensi dari reflektivitas, di mana masyarakat Jepang kembali melakukan praktik pemakaman tradisional namun dengan adanya adaptasi terhadap situasi krisis.

Pemerintah tidak secara langsung mengeluarkan kebijakan ataupun dekrit mengenai pengelolaan jenazah korban, keluarga, komunitas, dan relawan secara sukarela melakukan pemakaman kepada para korban. Hal ini dikuatkan oleh Kawada dalam Akagawa dalam bukunya yang berjudul *Places of Traumatic Memory*,

For survivors, many of them children and young adolescents, the task of collecting bodies and attempting to arrange appropriate cremation and burial was immense. A brief insight into this moment is provided by personal testimony. One woman, who at the time was a 14-year-old student, writes how she and her fellow students, ‘waited for the dawn of August 15th [1945]. We were weak but tried very hard to gather our strength to pile up the vast number of charred bodies on to the truck to be cremated elsewhere’ (Akagawa dkk., hlm. 41, 2020).

Situasi ini juga menunjukkan terjadinya pemisahan ruang dan waktu (*time-space distancing*), di mana keterikatan antara ruang dan waktu dalam praktik sosial mulai bergeser. Menurut Giddens, pemisahan ruang dan waktu merupakan kondisi ketika tindakan sosial tidak lagi terikat oleh keterbatasan ruang dan waktu. Dalam konteks ini, modernitas memungkinkan pengelolaan krisis dan kematian massal dengan baik. Meskipun pada kenyataannya penanganan jenazah yang dilakukan secara massal dan terorganisir di ruang publik seperti kuil atau lapangan umum ini menunjukkan hubungan antara pelaku sosial, lokasi kematian, dan ritual pemakaman tidak lagi bersifat langsung atau lokal. Namun, dalam banyak kasus, keluarga korban bahkan tidak hadir secara fisik dalam proses kremasi. Hal ini mencerminkan alur berpikir secara modern yang

memungkinkan tindakan sosial dijalankan oleh aktor-aktor pengganti seperti relawan, otoritas lokal, sementara nilai-nilai memorial tetap dijalankan. Dengan demikian, praktik pemakaman masa perang bukan hanya bersifat responsif, tetapi juga menjadi manifestasi dari restrukturisasi relasi sosial dalam ruang dan waktu yang modern.

Setelah kremasi massal dilakukan, abu jenazah korban Tokyo Air Raids yang tak teridentifikasi atau tidak diklaim ini kemudian juga disimpan di berbagai lokasi memorial dan tempat publik seperti taman, kuil dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan masa perang yang masih memuncak. Setelah perang berakhir, pemerintah memindahkan sebagian abu yang tersebar di kota Tokyo ke salah satu lokasi paling memungkinkan yaitu, Tokyo Memorial Hall di Taman Yokoami, bersamaan dengan abu jenazah korban Gempa Kanto (1923). Hal ini dikuatkan oleh Karacas, sebagian besar korban serangan udara di letakan pada kuburan massal di taman, kompleks kuil, dan tanah pribadi, yang kemudian dipindahkan ke di Taman Yokoami (Tokyo Memorial Hall) pada tahun 1951 (Karacas, hlm. 34, 2006).



Gambar 18. Tama Bochi (多磨墓地)

Sumber: www.e-ohaka.com

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pemerintah Jepang kembali melakukan rekonstruksi dan perbaikan ekonomi makro. Standarisasi pengelolaan lahan tetap menjadi pertimbangan pemerintah Jepang. Hal ini memberikan dampak pada berbagai aspek termasuk pemakaman yang dahulunya melekat pada kuil Buddha. Terjadi transformasi dalam praktik dan bentuk pemakaman yang cukup signifikan sejak akhir era Taisho⁹ hingga Showa¹⁰. Munculnya pemakaman menyerupai taman, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 17. Tidak seperti pemakaman tradisional, *koenbochi* menyediakan fasilitas-fasilitas lain yang ditujukan bagi para pelayat yang datang. Menurut Murakami,

⁹ Taisho Jidai (大正時代) adalah periode sejarah Jepang yang berlangsung dari tahun 1912 hingga 1926. Periode ini dipimpin oleh Kaisar Taisho (Yoshihito), dan ditandai dengan adopsi gaya dan teknologi barat (Novaldisyah dkk., 2018).

¹⁰ Showa Jidai (昭和時代) adalah periode sejarah Jepang yang berlangsung dari tahun 1926 hingga 1989. Periode ini dipimpin oleh Kaisar Showa (Hirohito), dan ditandai oleh peristiwa Perang Dunia II, rekonstruksi pasca perang, dan pertumbuhan ekonomi pesat (Shiori, 2024).

munculnya pemakaman menyerupai taman yang disebut dengan *koenbochi* (公園墓地) dan krematorium modern yang dilatar belakangi oleh sistem sanitasi dan penggunaan lahan yang efisien (Murakami, hlm. 343, 2000). Perubahan ini juga mencerminkan penataan ulang ruang yang lebih rasional dalam kerangka negara modern. Untuk mengatur sistem ini, pemerintah Jepang kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1948 terkait pemakaman, menetapkan aturan dasar tentang pengelolaan dan penguburan di pemakaman, osuarium, dan krematorium (laws.e-gov.go.jp, 2022). Undang-Undang ini berisikan 28 pasal yang membahas secara rinci peraturan pemerintah terhadap pengelolaan pemakaman dan osuarium. Pada pasal 11 membahas terkait pendirian, perubahan, atau penghapusan tempat pemakaman atau krematorium yang dilaksanakan sebagai suatu proyek penataan kota, maka persetujuan atau pengesahan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Penataan Kota dianggap telah diberikan sesuai dengan izin yang diberikan oleh gubernur prefektur.

Transformasi praktik pemakaman ini memiliki konsekuensi terhadap sistem kepercayaan pada pemakaman di Jepang. Pada masa krisis, masyarakat terdesak untuk segera memakamkan jenazah korban secara cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya simplifikasi praktik pemakaman terjadi pada masa perang ini. Masyarakat tidak menggunakan prosesi pemakaman seperti *rokuyo*, *otsuya*, dan praktik pemakaman lainnya. Pertimbangan utamanya adalah aspek higienitas serta pencegahan epidemi. Walaupun kuil dijadikan tempat evakuasi serta pemakaman sementara, aspek agama bukanlah hal yang di prioritaskan pada masa perang. Selain itu, pergeseran ini juga semakin terasa pasca Perang Dunia II di mana altar, karangan bunga, atau bunga buatan

atau *hanawa*, serta barang-barang lain yang berkaitan dengan pemakaman diperjual belikan dan tersedia secara nasional. Menurut Nakamaki, pasca Perang Dunia II, Kuil-kuil di kawasan kota mulai menyewakan barang-barang untuk pemakaman (Nakamaki, hlm. 178, 1986). Hal ini menunjukkan bagaimana nilai spiritualitas yang murni mulai bergeser dan menganut nilai-nilai kapitalis.

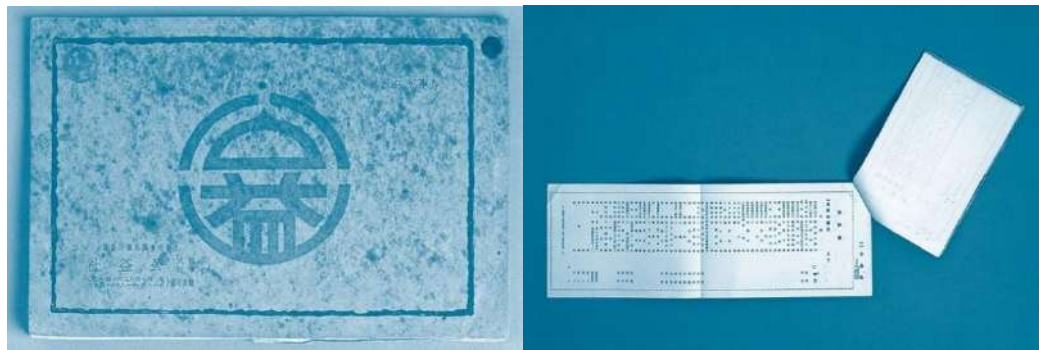
Dalam kerangka modernitas tidak hanya membawa kemajuan teknologi dan administratif, tetapi juga melahirkan ancaman-ancaman baru yang lebih kompleks. Hal ini menjadi salah satu konsekuensi dari modernitas itu sendiri. Hal ini di sampaikan oleh Giddens, perang nuklir jelas merupakan ancaman global yang paling potensial, mendesak, dan dahsyat di antara semua ancaman global saat ini (Giddens, hlm.126, 1990). Teknologi yang awalnya dikembangkan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia, kini justru membahayakan bagi manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, munculnya sistem pengelolaan kematian yang termasuk dalam pembangunan osuarium dan krematorium, dapat dilihat sebagai refleksi dari kesiapan negara dalam menghadapi bencana di kemudian hari. Oleh karena itu, pengelolaan kematian dalam masyarakat modern tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis dan simbolik. Hal ini mencerminkan antisipasi negara terhadap krisis yang dihasilkan oleh modernitas itu sendiri.

3.2.2 Perkembangan Industri Pemakaman pasca Perang Dunia II (1945-1991)

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Jepang mengalami kehancuran masif baik fisik maupun sosial, termasuk pada sistem pengurusan jenazah. Tokyo Air Raids dan pengebomaan besar lainnya menciptakan kebutuhan mendesak untuk pengelolaan

jenazah yang efisien dan cepat, dan jauh dari kapasitas sistem tradisional. Praktik kremasi massal yang dilakukan secara cepat menjadi umum dalam menangani jenazah pasca peristiwa besar didorong oleh efisiensi industrial untuk mengatasi jenazah dalam jumlah yang tidak sedikit. Menurut Suzuki, sepuluh tahun pasca perang terjadi, industri pemakaman mulai berkembang pesat, didukung oleh pembentukan Koperasi Gotong Royong (Gojokai 互助会) (Suzuki, hlm. 53, 2022). Selain dengan koperasi gotong royong, munculnya krematorium modern dan *Koenbochi* dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem sanitasi dan penggunaan lahan yang efisien. Hal ini merupakan ciri khas industrialisasi dalam penataan kota dan pengelolaan ruang. Industrialisme mendorong standarisasi proses dan munculnya fasilitas khusus yang dirancang untuk mengolah sejumlah besar jenazah secara sistematis.

Pada tahun 1950-an, seiring dengan pemulihan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II, keberadaan *funeral Homes* atau *Soughisha* (葬儀社) ikut berkembang. Hal ini merupakan manifestasi langsung dari logika kapitalisme dalam aspek pemakaman. *Soughisha* mengambil alih fungsi-fungsi pemakaman dari keluarga dan kuil, serta menawarkan layanan yang terstandarisasi dan berorientasi pada efektivitas. Menurut Suzuki, *Soughisha* menjadi aktor utama dalam proses pemakaman, mulai dari pemrosesan jenazah, penyediaan altar, hingga pengaturan krematorium (Suzuki, hlm. 51, 2003).



Gambar 19. Katalog Pertama perusahaan pemakaman Koekisha

Sumber: www.san-hd.co.jp

Pada masa pertumbuhan ekonomi Jepang atau *Japanese Miracle* (高度経済成長期) yang terjadi sekitar tahun 1945 hingga 1991, pemakaman mulai dikemas dalam paket-paket yang dikategorikan dalam layanan-layanan sederhana hingga mewah. Layanan ini kemudian dapat dipilih melalui katalog jasa, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 18. Sebuah perusahaan pemakaman bernama Koekisha pertama kali mencetuskan penggunaan katalog sebagai bahan komersialisasi terhadap layanan yang ditawarkan. Hal ini secara jelas menunjukkan manifestasi kapitalisme dalam aspek pemakaman, di mana sebuah peristiwa personal dan sakral diubah menjadi sebuah komoditas pasar yang dapat dijual belikan. Hal ini dikuatkan oleh Suzuki, meninjau perbedaan antara praktik pemakaman dalam masyarakat berbasis komunitas dan praktik pemakaman saat ini, praktik pemakaman era modern memiliki sifat yang lebih kapitalistik (Suzuki, hlm. 3, 2022). Peranan keluarga tidak lagi mengurus pemakaman secara langsung, tetapi hanya sebagai konsumen yang memilih layanan pemakaman. Hal ini menggambarkan bagaimana modal dan pasar terbentuk dalam praktik sosial bahkan pada aspek yang paling intim seperti pemakaman.

Industri pemakaman di Jepang mulai muncul pada tahun 1917, atau bertepatan pada era Showa. Namun, pada masa itu, bisnis ini belum menjadi hal yang krusial di masyarakat. Menurut Suzuki, faktor kesuksesan pada *Sougisha* pada saat ini jauh berbeda dengan kondisi sebelum Perang Dunia II. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan adaptasi sistem pemakaman yang diadopsi oleh perusahaan tersebut (Suzuki, hlm. 55, 2022).

Perkembangan industri pemakaman di Jepang didukung oleh regulasi pemerintah terhadap pengelolaan pemakaman. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1948 terkait pemakaman, yang di sahkan setelah perang adalah wujud peningkatan kapabilitas pengawasan pemerintah terhadap aspek-aspek pemakaman. Undang-Undang ini menetapkan aturan dasar yang rinci terkait pengelolaan dan penguburan pada praktik pemakaman, serta perizinan pembangunan atau bahkan pemindahan fasilitas osuarium dan krematorium. Pada pasal-pasal yang mengatur pendirian, perubahan, atau penghapusan fasilitas pemakaman dilakukan sebagai salah satu proyek penataan kota. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menstandarisasi, mengontrol, merasionalisasi pemakaman melalui kerangka hukum serta memastikan bahwa layanan kematian diatur dan dipantau oleh otoritas formal.

Peristiwa seperti Tokyo Air Raids menyebabkan kematian dalam jumlah besar yang tidak ditangani dengan baik oleh pihak kuil, dan memicu kremasi darurat menjadi lebih umum. Krisis ini menciptakan kebutuhan akan sistem yang lebih terorganisir, dan secara tidak langsung melonggarkan keterikatannya pada praktik tradisional yang berbasis keluarga ataupun komunitas yang tidak efisien dalam skala besar. Ideologi

militer selama perang yang mengubah narasi kematian prajurit menjadi kolektif dan nasionalistis juga turut mempersiapkan masyarakat untuk praktik pemakaman yang lebih terkontrol oleh lembaga formal. Kemudian, hal ini membuka jalan bagi layanan yang ditawarkan oleh industri pemakaman.

Seiring dengan berkembangnya industri pemakaman di Jepang, perubahan signifikan pun terjadi dalam hal pemisahan ruang dan waktu dalam praktik pemakaman. Fungsi pemakaman yang sebelumnya dilakukan di kuil atau halaman keluarga, saat ini bergeser ke fasilitas profesional seperti krematorium dan *memorial park* yang terletak di lokasi terpisah dan dikelola secara administratif. Proses berkabung pihak keluarga yang ditinggalkan tidak lagi terikat pada ruang tradisional, di mana pihak keluarga akan berkumpul di rumah duka selama beberapa hari. Melainkan, berlansung dengan cepat, bahkan sering kali hanya melibatkan perwakilan keluarga saja. Hal ini memberikan gambaran bagaimana manifestasi dari komponen pemisahan ruang dan waktu (*time-space distancing*) oleh Giddens. Menurut Giddens, pemisahan ruang dan waktu merupakan bentuk konsekuensi dari modernitas di mana terjadi proses yang memungkinkan interaksi sosial terjadi melampaui batasan lokal dan temporal. Pada masa tradisional, praktik pemakaman memiliki asas yang kekeluargaan dan berbasis pada komunitas. Namun, industri pemakaman telah mengambil alih peran ini dengan menyediakan lokasi-lokasi kremasi atau bahkan pemakaman yang sifatnya lebih efisien.

Selain itu, berkembangnya industri pemakaman telah mengubah persepsi masyarakat terhadap pemakaman sebagai nilai efisien dan memberikan kemudahan bagi pihak keluarga yang ditinggalkan. Mekanisme pelepasan dalam praktik pemakaman

Jepang terlihat jelas seiring dengan berkembangnya industri jasa pemakaman. Proses kremasi yang semulanya melibatkan partisipasi langsung publik dan keluarga, saat ini beralih menjadi lebih tertutup dan terstandarisasi. Transformasi praktik pemakaman ke ranah industrial menunjukkan fenomena mekanisme pelepasan (*disembedding*). Tanggung jawab atas pemakaman yang pada mulanya diemban oleh keluarga dan komunitas bergeser ke dalam kendali *Sougisha*. Peralihan ini merupakan manifestasi dari mekanisme pelepasan yang dijelaskan oleh Giddens, di mana ikatan personal, komunitas, dan spiritualitas dalam praktik pemakaman dilepaskan dari konteks asalnya dan diorganisasikan ulang melalui sistem yang lebih abstrak dan terstandarisasi. Menurut Giddens mekanisme pelepasan (*disembedding mechanism*) merupakan sebuah proses di mana hubungan sosial dan interaksi yang sifatnya mengakar terhadap suatu masyarakat akan terangkat keluar dan diorganisasikan ulang melalui mekanisme abstrak. Kepercayaan masyarakat terhadap *Sougisha* memberikan gambaran bagaimana masyarakat melepaskan hubungan sosial yang mengakar pada tradisi. Paket layanan pemakaman yang ditawarkan melalui katalog jasa juga mengindikasikan mekanisme pelepasan ini, di mana keluarga sebagai konsumen hanya perlu memilih layanan tanpa perlu terlibat langsung dalam setiap prosesi pemakaman yang kompleks.

Pada tahun 1990-an, muncul tren *Shukatsu* (終活) atau aktivitas persiapan kematian, di mana masyarakat Jepang mulai merancang sendiri bagaimana nantinya mereka akan dimakamkan. *Shukatsu* (終活) sendiri merupakan inovasi industri pemakaman yang menawarkan paket perencanaan kematian sebagai produk layanan. Masyarakat kemudian merespon inovasi ini sebagai konsumen yang mengadopsi layanan

tersebut. Hal ini merupakan bentuk manifestasi komponen reflektivitas oleh Giddens. Dalam konteks praktik pemakaman pasca Perang Dunia II, inovasi yang diciptakan oleh *Sougisha* memberikan pilihan bagi masyarakat. Hal ini dikuatkan oleh Ikeuchi, *Sougisha* memenuhi semua kebutuhan konsumen dalam mengekspresikan kepribadian mereka dalam upacara pemakaman terakhir seseorang (Ikeuchi, hlm. 124, 1998). Selain *shukatsu*, muncul bentuk praktik baru seperti kremasi laut (海洋散骨) hingga pemakaman *eco-friendly*. Menurut Ikeuchi, *Sougisha* juga mulai menawarkan layanan konseling dan pemakaman yang disesuaikan dengan identitas pribadi (Ikeuchi, hlm. 124, 1998). Kemunculan fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Jepang tidak hanya menerima modernisasi dalam praktik pemakaman, tetapi juga secara aktif mengevaluasi dan membentuk ulang makna kematian agar sesuai dengan nilai-nilai individual dan preferensi personal mereka dalam konteks modern.

Transformasi praktik pemakaman memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sistem kepercayaan di Tokyo. Munculnya industri jasa pemakaman telah mengikis otoritas tradisional kuil sebagai pusat pengurus jenazah dan upacara kemarian. Peran kuil di era modern ini tergantikan oleh *Sougisha*. Istilah *Funeral Buddhism* di muncul sebagai kritik terhadap agama hanya hadir di saat kematian, dan hal ini kemudian semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Menurut Efanova, *Funeral Buddhism* memberikan citra buruk bagi para biksu Buddha. Hal ini dikarenakan ajaran Buddha muncul pada saat pemakaman. Biaya pemakaman yang tinggi menjadi tanda tanya bagi jemaatnya (Efanova, hlm. 21, 2013).



Gambar 20. Video Dokumenter berjudul *When I Die: Inside Japan's Death Industry, 101 East*

Sumber: www.youtube.com

Pada Gambar 19, Genyu Daito, seorang biksu Buddha Jepang, dalam wawancaranya dengan Aljazeera English mengungkapkan bahwa banyak masyarakat hanya menganggap upacara pemakaman sebagai formalitas sosial belaka. Ia menyatakan, *“I think memorial service here don't really connect people with their religion, they just think it's appropriate to pay for a priest to chant some prayer they don't understand. the religion is not something you pay for”* (Al Jazeera English, 16.45, 2015). Daito secara Jelas mengungkapkan bagaimana pandangannya terhadap sistem kepercayaan di Tokyo yang semakin terkikis dan tergantikan oleh industri pemakaman. Pergeseran unsur-unsur spiritualitas dalam praktik pemakaman menunjukkan proses sekularisasi yang terjadi dalam ranah pemakaman, di mana peran spiritual dan pihak kuil berkurang seiring dengan dominasi layanan komersial dan rasionalisasi terhadap nilai praktis. Kepercayaan yang dahulunya merupakan penopang utama dalam pengelolaan kematian, kini harus beradaptasi dengan realitas di mana kematian telah menjadi bagian dari komoditas

industri jasa. Namun, munculnya *Shukatsu* dan praktik pemakaman alternatif lainnya juga menunjukkan bahwa meskipun pelepasan dari otoritas kuil tradisional, masyarakat masih mencari makna dan ekspresi personal dalam menghadapi kematian, yang bisa jadi merupakan bentuk spiritualitas yang lebih individual.

3.3 Praktik Pemakaman Pasca Pandemi Covid-19 (2020-Sekarang)

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu peristiwa global paling disruptif dalam sejarah modern. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona atau corona virus jenis baru bernama SARS-CoV-2, yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Berdasarkan situs resmi World Health Organization (WHO), penyebaran virus ini sangat cepat ke negar-negara lain sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mendeklarasikan Darurat Kesehatan Masyarakat Kepedulian Internasional (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020 (WHO, 2020a).

Covid-19 menyebarkan ke seluruh dunia dalam waktu singkat, memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan, ekonomi, sosial, hingga praktik spiritualitas dan ritual pemakaman. Virus corona menyerang sistem pernapasan manusia sehingga jarak yang terlalu dekat dengan penyintas berpotensi lebih besar untuk terpapar. Berdasarkan situs resmi Organisasi Kesehatan Internasional (WHO), penularan virus Covid-19 terjadi ketika seseorang melakukan kontak dekat (dalam jarak 1 m) dengan penyintas (WHO, 2020b).

Pandemi Covid-19 di Jepang dimulai dengan insiden karantina kapal pesiar Diamond Princess di pelabuhan Yokohama selama dua minggu. Pada masa ini, ditemukannya kasus infeksi virus corona baru di antara penumpang. Berdasarkan media koran elektronik Science, 712 dari 3711 orang di kapal pesiar Diamond Princess dinyatakan positif terinfeksi virus corona baru dan 14 orang meninggal dunia (Normile, 2020). Peristiwa ini menjadi titik awal kekhawatiran nasional terhadap penyebaran virus, sekaligus memunculkan tantangan besar dalam penanganan kesehatan publik dan sistem pemakaman di Tokyo.

Menurut data dari Pemerintah metropolitan Tokyo yang dikutip melalui artikel yang ditulis oleh Ohmagari, hingga Februari 2022 jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Tokyo mencapai 863.984 kasus, dan perkiraan jumlah kematian pada tanggal yang sama adalah 3.376 jiwa (Ohmagari, 2022). Hal ini menggambarkan bagaimana tingginya angka kematian yang terjadi di kota Tokyo pada masa Covid-19. Selain itu, Jepang menghadapi tantangan pandemi dengan latar belakang demografis yang cukup kompleks, dengan angka lansia yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tahun 2015, Kantor Kabinet memperkirakan bahwa 18 juta orang, atau satu dari tujuh orang di Jepang, akan meninggal sebelum tahun 2030. (Ministry of Health, Labour, and Welfare, 2018). Bahkan sejak tahun 2018, tingkat kematiannya telah melebihi tingkat kelahirannya. Demografi masyarakat “super-tua” di Jepang berisiko mempercepat penyebaran penyakit dan mengakibatkan lonjakan angka kematian.

Usia	Kasus Total	Meninggal Total (%)	Kasus Laki-laki	Meninggal Laki-laki (%)	Kasus Perempuan	Meninggal Perempuan (%)
<10	76	0 (0.0%)	45	0 (0.0%)	31	0 (0.0%)
10an	109	0 (0.0%)	42	0 (0.0%)	67	0 (0.0%)
20an	1383	1 (0.1%)	737	1 (0.1%)	646	0 (0.0%)
30an	1167	0 (0.0%)	496	0 (0.0%)	671	0 (0.0%)
40an	921	0 (0.0%)	398	0 (0.0%)	523	0 (0.0%)
50an	878	16 (1.8%)	413	13 (3.1%)	465	3 (0.6%)
60an	376	32 (8.5%)	167	26 (15.6%)	209	6 (2.9%)
70an	585	92 (15.7%)	255	65 (25.5%)	330	27 (8.2%)
80an	374	113 (30.2%)	167	65 (38.9%)	207	48 (23.2%)
90an	180	61 (33.9%)	50	26 (52.0%)	130	35 (26.9%)
100+	4	3 (75.0%)	1	1 (100.0%)	3	2 (66.7%)

Gambar 21 Tabel Distribusi Kematian di Tokyo Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin dengan angka kematian tertinggi pada Laki-laki usia 90 Tahun mencapai 52%.

Sumber: www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp

Keterkaitan fenomena *aging population* atau masyarakat super-tua di Jepang memberikan implikasi terhadap meningkatnya angka kematian akibat virus korona. Berdasarkan data dari Pemerintah metropolitan Tokyo, menyatakan bahwa semakin tua usia, semakin tinggi tingkat kematiannya, dengan 33,9% pada usia 90-an, 30,2% pada usia 80-an, dan 17,0% pada usia 70-an. Di sisi lain, tingkat kematian pada usia 50-an ke bawah sangat rendah, yaitu 0,5% (Tokyo Metropolitan Bureau of Social Welfare and Public Health, 2020).

Lonjakan kasus dan kematian yang cepat, seperti yang terlihat pada karantina kapal pesiar Diamond Princess, memberikan ancaman terhadap fasilitas publik seperti rumah sakit dan sistem pemakaman. Dalam konteks pemakaman, urgensi ini menciptakan tekanan dalam penanganan jenazah dan penyelenggaraan upacara. Tidak hanya pada

kapasitas fisik, tetapi juga pada adaptasi praktik pemakaman yang telah mengakar secara tradisi, karena protokol kesehatan ketat seperti pembatasan interaksi fisik dan jaga jarak sosial secara langsung bertentangan dengan esensi banyak tradisi pemakaman yang melibatkan keterlibatan langsung keluarga dan komunitas.



Gambar 22. Dokumenter singkat berjudul *Korona-ka no sougi 'kao mo mi rarezu...' mada nokoru sougisha no kajo taiou aisuruhito to no saigo no wakarenanoni*

Sumber: www.youtube.com

Peristiwa ini juga memberikan pengaruh terhadap keluarga duka, berdasarkan dokumenter pendek yang diakses melalui saluran Youtube dengan akun bernama RKB News, berjudul コロナ下の葬儀「顔も見られず…」まだ残る葬儀社の過剰対応 愛する人との最後の別れなのに *Korona-ka no sougi 'kao mo mi rarezu...' mada nokoru sougi-sha no kajo taiou aisuruhito to no saigo no wakarenanoni*. Yang berarti Pemakaman di tengah pandemi COVID-19: “Bahkan wajah pun tak bisa dilihat...” (RKB NEWS, 2022). Tanggapan berlebihan dari perusahaan pemakaman masih berlanjut, padahal ini adalah perpisahan terakhir dengan orang yang dicintai.”. Dalam dokumenter

pendek ini, ditemukan adanya kesenjangan antara pedoman yang diberikan oleh pemerintah dengan praktik di lapangan yang dilaksanakan oleh *Sougisha*. Seorang lansia bernama Shinokura Kunio (80 Tahun), merasa sangat frustrasi karena tidak dapat melihat wajah istrinya untuk terakhir kalinya. Ia menyebutkan bahwa *Sougisha* menganggap jenazah seperti “bahan berbahaya” dan menemukannya dalam kantong jenazah. Namun, berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah pada bulan Juli tahun 2021 secara eksplisit menyatakan bahwa risiko infeksi dari jenazah sangat rendah jika jenazah tersebut dikemas dengan benar dalam kantong jenazah. Selain itu, pemberitahuan yang diterbitkan pada Juni ini merekomendasikan penggunaan kantong jenazah yang memungkinkan wajah terlihat. Hal ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Namun, pada kenyataannya *Sougisha* belum menerapkan hal tersebut. Hal ini menyebabkan penderitaan emosional bagi keluarga korban Covid-19, seperti Shinokura Kunio. Menurut Profesor Takao Hashiguchi dari Universitas Kyoto, tenaga medis berada dalam lingkungan di mana mereka dapat dengan mudah mengakses informasi terbaru terkait penanganan Jenazah Covid-19 (RKB NEWS, 4.24, 2022). Hal ini seharusnya menjadi sebuah pelajaran bagi pihak medis dan *Sougisha* untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan praktik pemakaman khususnya pada masa pandemi.

Peristiwa yang mendadak seperti Covid-19 menimbulkan kekosongan emosional dan spiritual yang serius bagi keluarga yang berduka, yang sering kali terhalang untuk mengucapkan perpisahan secara langsung atau mendapatkan dukungan sosial yang memadai. Hal ini dikuatkan oleh Kondo-Arita & Becker, perubahan bentuk dalam upacara pemakaman membuat pemakaman tidak lagi tentang ketenangan jiwa orang yang

telah meninggal, tetapi juga bagaimana proses berduka dari pihak keluarga (Kondo-Arita & Becker, 2023). Kebijakan pemerintah terhadap pembatasan ruang gerak individu berpotensi memperburuk kesedihan yang rumit dan berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, urgensi baru muncul untuk memastikan penanganan jenazah dengan aman di tengah pandemi, sekaligus mendukung kesejahteraan, kenyamanan keluarga mendiang dalam masa dukanya. Dalam kondisi ini, kebutuhan akan kebijakan formal menjadi mendesak untuk memastikan penanganan kematian tetap aman, dan dapat diterima oleh masyarakat.

3.3.1 Kebijakan Pemerintah Terhadap Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan global yang unik, memaksa adaptasi drastis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik pemakaman di Tokyo. Pemerintah Jepang menetapkan kebijakan darurat nasional (*State of Emergency*) pada April 2020. Sejak tanggal 7 April hingga 6 Mei 2020, langkah-langkah situasi darurat akan dilaksanakan di Jepang. Berdasarkan kebijakan pemerintah terhadap keadaan darurat sebagai respon terhadap penyakit Virus Corona baru yang di akses melalui situs resmi Kantor Perdana Menteri Jepang, bahwa pemerintah menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penyakit influenza jenis baru dan adanya pembatasan wilayah yang diberlakukan ke seluruh prefektur (Prime Minister Office of Japan, 2020). Berbeda dengan negara lain, kebijakan ini dilakukan tanpa menerapkan *lockdown* atau karantina wilayah yang ketat, namun tidak ada paksaan dalam larangan hukum, pemerintah mengandalkan kesadaran masyarakat untuk membatasi mobilitas dan kontak sosial.

Kebijakan pemerintah Jepang dalam menghadapi pandemi Covid-19, khususnya terkait pembatasan pergerakan, lebih berfokus pada pendekatan sukarela daripada paksaan hukum. Berdasarkan laporan dari media elektronik NHK, gubernur di prefektur diberi wewenang untuk “meminta” penduduk untuk tidak bepergian ke luar rumah, kecuali untuk kebutuhan esensial yang berkaitan dengan mata pencaharian mereka (nhk.or.jp, 2020). Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mencegah penyebaran infeksi dengan mengandalkan kerja sama dari masyarakat.

Lebih lanjut, regulasi terkait penanganan jenazah pasien COVID-19 juga mencerminkan upaya pencegahan infeksi yang ketat. Menurut Pasal 30, Ayat 3 dari Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular, jenazah yang terinfeksi atau diduga terinfeksi patogen dapat dikremasi atau dikubur dalam waktu 24 jam (Ministry of Health, Labour, and Welfare & Ministry of Economy, Trade and Industry, 2023b). Meskipun demikian, pihak Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan menyatakan bahwa pemindahan jenazah dari fasilitas medis tetap diizinkan, asalkan tindakan pencegahan infeksi yang tepat, seperti *Angel Care* (perawatan pasca kematian), diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang ketat, pemerintah tetap mengedepankan prosedur yang memungkinkan dengan tetap memprioritaskan keamanan dan pencegahan infeksi.

Kebijakan pembatasan wilayah Ini adalah bentuk kapabilitas pengawasan ketat dari pemerintah Jepang, di mana negara menggunakan otoritasnya untuk mengontrol ruang gerak dan interaksi sosial individu demi kesehatan khalayak banyak. Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh tindakan sejumlah *Sougisha*, terutama di Tokyo. Kata “Keadaan

Darurat” dan “Pembatasan Wilayah” yang secara implisit mirip dengan tindakan pada masa perang. Prioritas utama negara terhadap kesehatan publik menggantikan kebebasan individu dalam beberapa aspek kehidupan, hal ini secara tersirat serupa dengan prioritas militer dapat membatasi hak-hak sipil di masa perang.

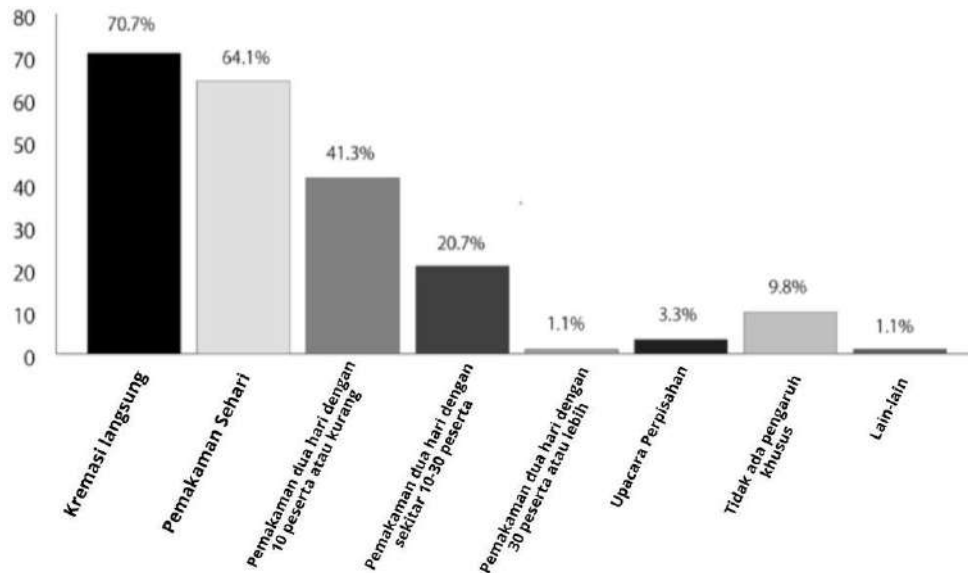
Kebijakan ini berdampak langsung pada praktik pemakaman, yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Jenazah korban Covid-19 tidak boleh disentuh atau dilihat oleh keluarga, dimakamkan dengan prosedur tertutup, dan proses kremasi dilakukan secepat mungkin demi mencegah risiko penularan. Menurut McLaughlin, pemerintah menetapkan larangan upacara penuh dan interaksi langsung dengan jenazah Covid-19 (McLaughlin, hlm. 12, 2020). Kebijakan pemerintah terkait “kremasi secepat mungkin” untuk jenazah korban Covid-19 menunjukkan dorongan industrial untuk memproses kematian secara efisien dan higienis dalam skala yang berpotensi besar, dengan standarisasi prosedur penanganan jenazah dan pembatasan interaksi. Hal ini mencerminkan logika efisiensi industrial untuk mengelola risiko secara sistematis.

Pemerintah secara eksplisit menerapkan larangan terhadap pelaksanaan upacara pemakaman penuh serta interaksi langsung antara keluarga dan jenazah. Kebijakan ini kemudian diiringi dengan tindakan dari sejumlah *Sougisha*, terutama di Tokyo. Menurut Boret, beberapa perusahaan pemakaman di Tokyo bahkan meminta agar tidak ada yang datang melihat jenazah atau menghadiri kremasi jika almarhum terkontaminasi Covid-19 (Boret dkk., hlm. 511, 2021). Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk melindungi operasional bisnis di tengah risiko, sekaligus bagian dari adaptasi pasar terhadap krisis yang memprioritaskan kelangsungan operasional dan keamanan finansial.

Pandemi Covid-19 membawa perubahan drastis dalam prosedur penanganan jenazah di Jepang, khususnya bagi pasien yang meninggal akibat infeksi virus. Berdasarkan pedoman dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, jenazah yang terinfeksi Covid-19 harus dibungkus dalam lapisan plastik khusus, disemprot disinfektan, dan tidak dimandikan atau dirias sebagaimana biasanya (Ministry of Health, Labour, and Welfare & Ministry of Economy, Trade and Industry, hlm.28, 2023). Interaksi keluarga juga sangat dibatasi, dengan kata lain jenazah tidak boleh disentuh atau dilihat secara langsung. Kebijakan ini tidak hanya merupakan respon medis, tetapi juga mempercepat terjadinya mekanisme *disembedding*.

Dalam konteks ini, praktik pemakaman dilepaskan dari kedekatan fisik, nilai emosional, dan ritual terkait yang pada masa tradisional berkaitan erat. Praktik pemakaman pada masa pandemi dialihkan kepada sistem ahli seperti tenaga medis dan perusahaan pemakaman profesional, yang mengelola jenazah sesuai dengan protokol kesehatan. Bahkan, beberapa perusahaan di Tokyo secara eksplisit meminta agar keluarga tidak menghadiri proses kremasi jenazah yang terinfeksi, memperkuat pelepasan praktik dari struktur sosial dan hubungan antar individu yang sebelumnya erat.

Selain perubahan secara teknis, kebijakan pembatasan sosial juga turut mengubah secara mendalam bentuk dan makna upacara pemakaman. Banyak keluarga terpaksa melakukan *sougiishuku* (葬儀自粛) atau pemakaman berskala kecil atau tertutup, bahkan ada yang tidak dapat menyelenggarakan upacara perpisahan sama sekali. Hal ini dikuatkan oleh Ikeuchi, bahwa pandemi virus corona memberikan batasan yang kemudian menjadi berdampak pada sistem pemakaman di Jepang (Ikeuchi, hlm. 511, 1998).



Gambar 23. Survei oleh Kamakura Shinsho pada tahun 2020, *Situasi Aktual Virus Corona Baru*

Sumber: www.e-sogi.com

Berdasarkan Gambar 20, pada survei yang dilakukan Kamakura Shinsho¹¹ terkait jenis pemakaman yang meningkat akibat Covid-19, Jenis pemakaman yang mengalami kenaikan tertinggi meliputi kremasi langsung mencapai 70,7% dan pemakaman satu hari mencapai 64,1%. Selanjutnya untuk pemakaman keluarga yang berlangsung selama 2 hari dikategorikan dengan jumlah tamu meliputi pemakaman dengan 10 orang tamu atau kurang mencapai 41,3%, pemakaman dengan 10 hingga 30 orang tamu mencapai 20,7%, dan pemakaman dengan 30 orang tamu atau lebih mencapai 1,1%. Untuk layanan di luar prosesi kremasi terdapat upacara perpisahan yang mencapai 3,3%, tidak ada pengaruh khusus yang berarti preferensi tidak mengalami perubahan pada masa pandemi mencapai

¹¹ Kamakura Shinsho (鎌倉新書) adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang layanan terkait akhir kehidupan dan penerbitan buku terkait pemakaman (Kamakura Shinsho, 2025).

9,8%, dan layanan lain-lain mencapai 1,1%. Berdasarkan survei ini, dapat dilihat bahwa jenis layanan yang dipilih oleh masyarakat pada masa pandemi cenderung kepada simplifikasi pemakaman yang tidak melibatkan tamu yang banyak dan bersifat privat. Upacara yang biasanya menjadi momen kolektif untuk berduka kini dipangkas atau ditiadakan. Proses kremasi dipercepat, sering kali hanya dalam beberapa jam setelah kematian, sehingga rentang waktu antara kematian dan perpisahan menjadi sangat singkat.



Gambar 24. Layanan pemakaman *virtual* oleh perusahaan pemakaman Koekisha
Sumber: www.koekisha.co.jp

Perubahan praktik pemakaman ini mencerminkan bentuk pemisahan ruang dan waktu (*time-space distancing*), di mana ritual kematian tidak lagi bergantung pada lokasi fisik tertentu dan jangka waktu tertentu. Interaksi sosial dan simbolik dalam kematian kini terjadi secara daring melalui *virtual funeral* atau *online memorial*, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 22. Pemakaman *virtual* ini menggambarkan bagaimana

praktik pemakaman dapat melampaui keterbatasan ruang dan waktu. Dengan kata lain, praktik pemakaman dipaksa untuk berjalan dalam kerangka yang sangat terkontrol dan terisolasi yang disebabkan oleh urgensi kesehatan publik dan kebijakan negara.

Dalam menghadapi pembatasan yang ketat ini, baik masyarakat maupun pemerintah Jepang menunjukkan bentuk reflektivitas sebagaimana dijelaskan oleh Giddens. Pemerintah tidak secara otoriter memaksakan *lockdown*, melainkan mengandalkan kesadaran masyarakat untuk membatasi kontak sosial. Masyarakat pun diminta untuk menyesuaikan cara mereka merespon kematian orang terdekat dengan kondisi baru yang tidak ideal. Dalam praktik pemakaman, ini terlihat dari berkembangnya inovasi-inovasi pemakaman seperti pemakaman daring dan *altar virtual*, yang menunjukkan bahwa masyarakat dan penyedia jasa pemakaman secara sadar mencari alternatif untuk mempertahankan fungsi sosial dan spiritual dalam situasi yang berubah. Reflektivitas juga hadir dalam keputusan institusi pemakaman untuk menyesuaikan protokol layanan agar tetap aman sekaligus layak secara tradisi. Dengan demikian, pandemi bukan hanya memaksa perubahan prosedur, tetapi juga mendorong adaptasi sadar terhadap nilai dan tatanan sosial yang telah mapan dalam praktik pemakaman di Tokyo.

Kebijakan dan praktik pemakaman di masa Covid-19 memiliki konsekuensi terhadap sistem kepercayaan di Jepang, terutama dalam konteks pemakaman Buddhisme yang menekankan keterlibatan fisik dan komunitas. Larangan untuk menyentuh atau melihat jenazah, serta pelaksanaan pemakaman secara tertutup tanpa kehadiran keluarga duka, mengganggu struktur ritual yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi

seperti *Rokuyo*, prosesi pengumpulan tulang belulang pasca kremasi (*shuukotsu*), ataupun malam berjaga (*otsuya*) menjadi tidak memungkinkan. Hal ini berdampak langsung pada peran kuil Buddha, yang selama ini menjadi fasilitator utama dalam proses pemakaman dan tempat keluarga berduka secara spiritual. Pembatasan sosial dan percepatan kremasi mempersingkat masa berkabung, sekaligus mempersempit ruang untuk pelaksanaan ritus spiritual secara penuh. Akibatnya, bukan hanya pengalaman berduka yang menjadi lebih privat dan individual, tetapi juga otoritas dan fungsi komunitas mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Transformasi ini mencerminkan pelemahan dalam aspek spiritualitas praktik pemakaman, serta bergesernya otoritas dari kuil ke lembaga profesional seperti *Sougisha*.

3.3.2 Adaptasi Industri Pemakaman Terhadap Pandemi Covid-19

Industri pemakaman di Jepang menunjukkan kemampuan adaptif yang signifikan selama pandemi Covid-19, khususnya dalam merespon keterbatasan interaksi fisik dan pembatasan sosial yang berlaku. Sejumlah *Sougisha* menawarkan paket khusus bertema pandemi atau dikenal sebagai Paket Layanan Covid (Covid 対応プランあり) yang dikomersialisasi. Paket ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemakaman tanpa risiko infeksi. Selain itu, *Sougisha* juga menerapkan pedoman dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang (MHLW), terkait pedoman pengelolaan jenazah korban terinfeksi virus korona baru. Hal ini kemudian menjadi landasan utama bagi *Sougisha* sebagai aktor dalam melaksanakan praktik pemakaman.

Berdasarkan situs resmi perusahaan pemakaman Koekisha, Dalam paket ini, layanan yang ditawarkan berupa pemakaman tanpa tatap muka, pengelolaan jenazah sesuai protokol kesehatan, hingga opsi pengiriman abu ke rumah keluarga (Koekisha, 2020). Layanan-layanan tersebut mencerminkan logika industrialisme yang berfokus pada efisiensi dan standardisasi, di mana proses kematian dipecah menjadi rangkaian prosedur terstruktur layaknya jalur produksi. Pemakaman yang sebelumnya bersifat personal dan penuh ritual tradisional kini dijalankan secara terukur, higienis, dan cepat.

Paket layanan pemakaman tersebut menjadi bentuk nyata dari kapitalisasi atas kematian. Munculnya “Paket Layanan Covid” menandai bagaimana pandemi bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga peluang pasar. Pemakaman dipaketkan layaknya produk yang bisa disesuaikan dengan preferensi, harga, dan tingkat keamanan konsumen, sehingga menunjukkan bagaimana respon industri pemakaman terhadap logika komersil. Ini memperkuat arus kapitalisme dalam industri pemakaman Jepang, di mana upacara suci sekalipun diolah menjadi komoditas yang dapat dipasarkan, dibeli, dan diukur secara ekonomis. Adaptasi ini tidak hanya merespons kebutuhan teknis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana institusi yang bersifat privat mampu membangun ulang praktik sosial menjadi sesuatu yang efisien dan memiliki nilai jual.



Gambar 25. Situs resmi perusahaan Pemakaman Koekisha terkait pengelolaan pemakaman masa Pandemi Covid-19

Sumber: www.koekisha.co.jp

Dalam pelaksanaan operasionalnya, *Sougisha* menerapkan pedoman dari pemerintah terkait kebijakan kesehatan publik seperti larangan kontak fisik dan pembatasan tatap muka. Hal ini menandakan komponen dari modernitas itu sendiri, di mana adanya kapabilitas pengawasan dari pemetintah sebagai pemegang otoritas negara. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 23, bagaimana *Sougisha* melakukan praktik pemakaman di masa pandemi yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan. Penyedia jasa pemakaman mengambil peran sebagai agen implementasi protokol, memastikan setiap layanan berjalan sesuai standar protokol kesehatan. Selain itu, munculnya kebijakan selama masa pandemi yang diadopsi oleh *Sougisha* sebagai aktor utama dalam pengelolaan jenazah ini memiliki pendekatan yang digunakan menyerupai kontrol yang ketat ala militer dalam menghadapi ancaman tak kasat mata seperti virus. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip militer diadopsi dalam praktik sipil sebagai

strategi pertahanan publik, bahkan dalam sektor yang sebelumnya sangat dipengaruhi nilai spiritual.

Kebijakan pemerintah pada pembatasan sosial dan protokol kesehatan mendorong adaptasi *Sougisha* dalam memberikan layanan-layanan yang sesuai. Dalam keadaan mendesak ini, pihak *Sougisha* tidak secara langsung memberikan inovasi-inovasi baru, melainkan mengembangkan layanan yang telah muncul pada sepuluh tahun terakhir. Dalam konteks ini, *Sougisha* berhasil mengubah persepsi masyarakat terhadap layanan-layanan pemakaman yang jauh dari norma dalam praktik pemakaman tradisional.



Gambar 26. Layanan pemakaman *Drive-thru* oleh perusahaan pemakaman Kankon Sousai Aichi Group pada tahun 2018

Sumber: www.vice.com

Perkembangan layanan pemakaman seperti pemakaman *drive-thru*, menjadi solusi pada masa yang serba terbatas ini. Menurut Fazal, layanan pemakaman *drive-thru* muncul sekitar tahun 2017, layanan ini memberikan kemungkinan bagi keluarga ataupun tamu untuk dapat memberi penghormatan terakhir dari dalam mobil tanpa keluar atau menyentuh peti jenazah (Fazal, 2018). Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 24. Hal ini

menjadi contoh nyata bagaimana berpisahnya ruang dalam prosesi pemakaman yang biasanya terjadi dengan syarat interaksi baik fisik atau emosional. Begitu juga dengan upacara pemakaman yang dilaksanakan secara daring melalui layanan *livestream*. Upacara daring memungkinkan keluarga dan kerabat untuk menghadiri pemakaman dari jarak jauh dan pada waktu yang lebih fleksibel, bahkan setelah upacara berlangsung.

Layanan-layanan pemakaman yang dianggap tabu ini kemudian diterima oleh masyarakat yang kini semakin bergantung terhadap teknologi. Hal ini memberikan gambaran jelas terhadap komponen pemisahan ruang dan waktu oleh Giddens. Menurut Giddens, *time-space distanciation* merujuk pada pemisahan ruang dan waktu yang memungkinkan interaksi sosial terjadi melampaui batasan lokal dan temporal. Dengan begitu, pemakaman yang secara tradisional hanya dapat dilakukan di ruang dan waktu yang pasti, saat ini bisa dilakukan kapan saja. Bahkan dalam beberapa layanan yang memberikan kemudahan untuk memutar ulang tayangan *livestream*, sehingga bagi keluarga yang tidak dapat hadir bisa melihat prosesi pemakaman tanpa harus datang secara langsung. Dalam konteks ini, konsekuensi pemisahan ruang dan waktu yang dihasilkan oleh modernitas telah mencapai puncaknya. Di mana masyarakat telah mengandalkan kemajuan teknologi yang dapat mempermudah berbagai aspek kehidupan dengan pertimbangan rasionalitas dan efisiensi waktu.

seberapa penting tindakan pencegahan Covid-19 Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap *Sougisha* (n:100)



Gambar 27. Diagram hasil survei Kamakura Shinsho terkait peningkatan layanan pemakaman

Sumber: www.kamakura-net.co.jp

Berdasarkan Survei yang dilakukan Perusahaan pemakaman Kamakura Shinso terhadap mereka yang melaksanakan pemakaman melalui layanan pemakaman ii-sogi (いゝ葬儀) selama pandemi virus korona (sejak Maret 2020). Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 25, bahwa perusahaan pemakaman berupaya meningkatkan layanan pemakamannya dalam demi kenyamanan konsumen. Berdasarkan hasil survei, didapat bahwa dari 100 responden, 96% responden merasa bahwa peningkatan layanan sangat diperlukan dalam pengelolaan jenazah pada masa Covid-19. 「コロナ対策は葬儀社への信頼度向上に重要だと思った」 96.0%～変化する情勢に柔軟に対応できる葬儀社が信頼を獲得し、選ばれる傾向 *korona taisaku wa sougi-sha e no shinrai-do koujou ni juuyouda to omotta 96. 0% Henka suru josei ni juunan ni taiou dekiru sougisha ga shinrai*

o kakutoku shi, erabareru keiko, yang berarti “Tindakan pencegahan Covid-19 dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan pemakaman” 96,0% Perusahaan pemakaman yang dapat beradaptasi dengan fleksibel terhadap situasi yang berubah cenderung mendapatkan kepercayaan dan dipilih (Kamakura Shinsho, 2021). Hal ini menunjukkan bagaimana adaptasi langsung dari pihak *Sougisha* terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Sementara itu, beberapa contoh dari layanan yang diterapkan oleh *Sougisha* pada masa pandemi berupa, memakai masker (staf dan pelayat), disinfeksi tangan (staf dan pelayat), ventilasi di dalam gedung, penjelasan pencegahan sebelumnya kepada keluarga penyelenggara (喪主). Layanan ini kemudian diterapkan oleh *Sougisha* pada masa pandemi.

Munculnya layanan-layanan tersebut memberikan dampak terhadap nilai-nilai tradisional dalam praktik pemakaman. Jarak fisik dan protokol kesehatan yang ketat turut mendorong pelepasan hubungan sosial dari akar tradisionalnya. Dalam praktik pemakaman, keluarga tidak lagi berperan langsung sebagai penyelenggara atau aktor utama dalam pemakaman, melainkan menyerahkan sepenuhnya proses pemakaman kepada penyedia jasa pemakaman atau *Sougisha*. Pemakaman diproses secara profesional dan steril, tanpa adanya kontak fisik, upacara terbuka, bahkan dalam beberapa kasus tanpa adanya partisipasi keluarga secara fisik. Kepercayaan pihak keluarga terhadap pengelolaan jenazah kini dialihkan sepenuhnya kepada protokol medis dan lembaga operasional yang dianggap lebih profesional. Lembaga ini ditujukan sebagai sistem ahli, sebagaimana yang disampaikan oleh Giddens. Menurut Giddens, berpindahnya kepercayaan (*trust*) individu atau lebih kepada sebuah sistem abstrak yang

dianggap lebih profesional (*expert system*) merupakan bentuk konsekuensi modernitas dalam mekanisme pelepasan unsur tradisional (*disembedding mechanism*). Dengan demikian, proses praktik pemakaman yang dibatasi serta bagaimana *Sougisha* mengambil alih terhadap praktik pemakaman ini merupakan bentuk mekanisme pelepasan dalam konteks praktik pemakaman di Tokyo.

Dalam praktiknya, mekanisme pelepasan juga dapat dilihat dengan simplifikasi praktik pemakaman. Upacara pemakaman yang secara tradisional dilakukan dengan durasi setidaknya 2 hari, pada saat ini dipersingkat menjadi satu hari atau bahkan langsung dilaksanakan kremasi tanpa adanya ritual-ritual khusus. Seperti yang dapat dilihat pada survei oleh Kamakura Shinsho (terdapat pada halaman 83), jenis-jenis pemakaman yang mengalami peningkatan cenderung pada pemakaman yang cepat dan tidak mengundang banyak tamu. Hal ini dapat digolongkan sebagai mekanisme *disembedding*, di mana praktik pemakaman tidak lagi mempertimbangkan ritus-ritus kepercayaan Buddhisme dalam pelaksanaannya.

Dalam merespon kebijakan pemerintah pada masa pandemi, *Sougisha* membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih terbuka dan memandang pemakaman sebagai salah satu tujuan yang perlu direncanakan. Hal ini kemudian mendorong fenomena perencanaan kematian yang dikenal sebagai *Shukatsu* (終活) mengalami peningkatan signifikan menuju digitalisasi selama pandemi Covid-19. Fenomena ini muncul sekitar tahun 2009 hingga 2010, awalnya kemunculan fenomena ini sebagai respon terhadap penuaan populasi dan budaya persiapan akhir hidup. Fokus dari fenomena ini adalah mempersiapkan surat wasiat, memilih makam, mempersiapkan keuangan, dan lain

sebagainya. Namun, setelah Covid-19 datang fenomena ini mengalami perubahan bentuk. Banyak individu mulai secara aktif merancang upacara pemakamannya secara daring. *Shukatsu* memberikan layanan mulai dari memilih jenis kremasi, altar, hingga menyusun pesan pribadi yang akan diwariskan melalui video atau surat digital. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan kemampuan adaptif, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari mekanisme reflektivitas (*reflexivity*) dalam modernitas.

Digitalisasi fenomena *Shukatsu* mencerminkan tingkat reflektivitas yang tinggi dalam masyarakat Jepang. Melalui *Shukatsu*, individu tidak lagi pasif menghadapi kematian, melainkan mengambil posisi aktif untuk mendesain momen akhir hidupnya sebagai bentuk ekspresi personal. Dalam konteks pandemi, kesadaran akan kematian menjadi lebih nyata dan mendesak, memicu proses reflektif di pada individu. Di sisi lain, industri pemakaman juga menunjukkan reflektivitas institusional dengan merespons perubahan sosial ini secara cepat dan inovatif. Mereka tidak hanya menyediakan layanan yang sesuai protokol kesehatan, tetapi juga membentuk ulang makna berduka dan menghadirkan ruang-ruang baru untuk mengenang mendiang. Adaptasi *Sougisha* terhadap pandemi dengan memanfaatkan teknologi menjadi solusi mengatasi krisis sekaligus mengarahkan masa depan praktik pemakaman. Di sinilah terlihat bagaimana modernitas dalam bentuk paling dinamisnya yaitu dengan memanfaatkan teknologi, pasar, dan kesadaran reflektif dalam membentuk ulang cara pandang masyarakat dalam menghadapi kematian.

Kebijakan pembatasan interaksi fisik dan adaptasi industri pemakaman selama pandemi Covid-19 dan adaptasi *Sougisha* terhadap pandemi memiliki konsekuensi langsung terhadap sistem kepercayaan di Jepang. Pergeseran upacara pemakaman

menjadi peristiwa privat yang disaksikan melalui *livestream*, rekaman video, atau sesi peringatan *virtual* secara signifikan mengubah bentuk rituas tradisional. Layanan Paket Covid, pemakaman *drive-thru*, fenomena *shukatsu* memberikan menekankan pemakaman tanpa tatap muka dan memproses jenazah sesuai protokol kesehatan juga membatasi atau bahkan menghilangkan praktik-praktik religi yang membutuhkan sentuhan fisik atau kehadiran langsung. Keterlibatan kuil Buddha dalam proses pemakaman yang bersifat komunitas dan personal menjadi tergeser oleh protokol kesehatan dan solusi teknis komersial. Perubahan ini secara fundamental menantang cara kuil Buddha menjalankan fungsinya dalam mengelola kematian dan memberikan dukungan spiritual kepada jemaat, memaksa adaptasi yang mungkin mengurangi peran tradisional kuil Buddha dalam momen-momen sakral tersebut. Pergeseran sistem kepercayaan ini kemudian menjadi salah satu bentuk konsekuensi dari transformasi pemakaman di Jepang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Giddens, bahwa dalam modernisasi nilai religi tidak menghilang sepenuhnya tetapi mengalami pergeseran dan menjadi pilihan apabila memungkinkan.

Praktik pemakaman yang terstandardisasi dan diakomodasi oleh industri pemakaman di Jepang bukanlah sekadar tren baru yang muncul tiba-tiba saat pandemi Covid-19. Jauh sebelum krisis kesehatan global ini, Jepang telah dihadapkan pada fenomena sosial seperti *Muen Shakai* (無縁社会). *Muen Shakai* sendiri merupakan sebuah fenomena yang dipopulerkan oleh media nasional NHK pada tahun 2010. Berdasarkan situs resmi NHK, *Muen Shakai* berarti masyarakat tanda ikatan, di mana individu terputus dari hubungan sosial dan komunitas mereka, dan biasanya hidup secara terisolasi (NHK, 2010). Bersamaan dengan itu, Jepang juga mengalami lonjakan populasi lansia dan angka

kematian yang secara statistik terus melampaui angka kelahiran sejak 2018. Kombinasi dari kondisi demografis dan sosial ini mendorong perlunya bentuk pemakaman yang lebih efisien, praktis, dan dapat dijalankan tanpa keterlibatan komunitas tradisional. Oleh karena itu, berkembangnya *Sougisha* pada masa *Japanese Miracle* (1945-1991) mendorong inovasi-inovasi baru dalam paket layanan pemakaman, dan perencanaan seperti *Shukatsu* sebagai bagian dari respons terhadap perubahan zaman, bukan sekadar tren sesaat.

Dalam konteks ini, pandemi Covid-19 menjadi pendorong transformasi pada praktik pemakaman di Tokyo. Pembatasan sosial dan risiko kesehatan membuat masyarakat menerima layanan-layanan pemakaman cepat dan layanan *virtual* dengan lebih terbuka. Pilihan-pilihan ini, yang dulunya mungkin dianggap terlalu jauh dari pandangan pemakaman secara tradisional, kini menjadi standar baru karena dapat menjadi solusi pada peristiwa pandemi yang sifatnya mendadak. Dengan demikian, paket layanan pemakaman masa pandemi bukanlah tren sementara, tetapi bagian dari transformasi struktural praktik pemakaman di Tokyo yang telah berlangsung, mengakar, dan kini makin diterima seiring dengan krisis global yang mempercepat perubahan.

BAB IV

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, peristiwa-peristiwa besar ini telah mempercepat modernisasi praktik pemakaman di Tokyo, yang ditandai oleh rasionalisasi, efisiensi, dan komodifikasi. Pertama, Gempa Besar Kanto (1923) menandai titik awal pergeseran praktik pemakaman tradisional dengan munculnya kremasi massal terorganisir. Kedua, Perang Dunia II (1939–1945) memperdalam rasionalisasi pemakaman melalui praktik massal yang praktis dan lahirnya industri jasa pemakaman (*Sougisha*). Terakhir, Pandemi Covid-19 (2020) memanfaatkan digitalisasi, serta munculnya sifat individualisasi pada praktik pemakaman. Berdasarkan analisis, fenomena sosial seperti *aging population* dan *Muen Shakai* menjadi salah satu pendorong dalam adaptasi praktik pemakaman khususnya di daerah perkotaan seperti Tokyo. Transformasi ini kemudian memberikan konsekuensi terhadap nilai-nilai spiritualitas pada praktik pemakaman itu sendiri. Meskipun demikian, sistem kepercayaan juga menunjukkan kemampuan adaptasi dan reflektif untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernitas.

Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lebih lanjut mengenai perbedaan pengalaman generasi dalam memaknai praktik pemakaman di Jepang, serta variasi regional antara masyarakat urban dan rural. Selain itu, penelitian komparatif dengan negara lain yang menghadapi krisis serupa dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana modernitas, krisis, dan tradisi berinteraksi dalam membentuk praktik pemakaman kontemporer.

要旨

この研究のタイトルは『地震・戦争・パンデミックといった社会的危機に対応する日本の葬儀の変容』です。このタイトルは、日本における重大な出来事後の葬儀慣行の変化への関心から選択されました。日本の葬儀慣行は一般的に仏教の教えと密接に関連しており、寺院が遺族と協力して葬儀の全プロセスを管理しています。日本における葬儀の慣行に影響を与えた三つの時期「地震、戦争、パンデミック」があり、これらが現在の葬儀の慣行の変容をもたらしました。

本研究の目的は、1923年の関東大震災、1945年の第二次世界大戦、2020年のCovid-19パンデミックという三つの重大な出来事後に日本において生じた葬儀慣行の変化を分析することです。さらに、これらの変化が日本の葬儀慣行における宗教的要素、特に仏教の教えにどのように影響を与えたかを説明することを目的としています。

本研究で採用されたアプローチは、質的記述的アプローチです。データは、日本の政府公式文書を含む多様な二次資料を用いた文献レビューを通じて収集されました (E-Gov Japan、日本国会図書館、bousai.go.jp、mhlw.go.jp、日本国立公文書館)、電子メディア (NHK、朝日新聞グローバル)、葬儀会社ウェブサイト (鎌倉新社、サンホールディングス)、および日本における葬儀に関するYouTube ドキュメンタリー動画 (特に現代期に焦点を当てたもの) が含まれます。データ分析は記述的分析手法を用いて行われ、補足データには日本の政府公式文書などの歴史的記録が含まれます。

本研究では、アンソニー・ギデンズの理論「モダニティの帰結」を分析の理論的枠組みとして採用しています。この理論は、モダニティの四つの制度的基盤として、資本主義『Capitalism』、産業主義『Industrialism』、監視能力『Surveillance Capability』、軍事力『Military Power』を挙げています。さら

に、現代性は時間と空間の分離『Time-space Distanciation』、埋め込みの解体『Disembedding』、および反射性『Reflexivity』という三つの要素により、ますますダイナミックなものとなっています。

一般的に、日本の仏教に関連する葬儀の風習は、仏教寺院とコミュニティと密接な関係にあります。これらの葬儀の風習には、家族によって行われる一連の葬儀儀式（例：六夜、お通夜、告別式）や、墓地に遺体を埋葬するための特別な儀式が含まれます。現代社会の四つの基本機関、資本主義『Capitalism』、産業主義『Industrialism』、監視能力『Surveillance Capability』、軍事力『Military Power』、そしておよび三つの要素時間と空間の分離『Time-space Distanciation』、埋め込みの解体『Disembedding』、および反射性『Reflexivity』を分析の基盤として、本研究は日本の東京地域における葬儀儀式の変容を考察しています。分析の結果、日本の埋葬伝統は、仏教の教えに根ざした伝統的な価値観から、より現代的、世俗的、効率的な伝統へと大きな変化を遂げたことが示されました。この変化は、三つの主要な出来事、関東大震災（1923年）、第二次世界大戦（1939–1945年）、Covid-19 パンデミック（2020年）によって促進されました。各危機は、ギデنزの社会学的な概念である時間と空間の分離『Time-space Distanciation』、埋め込みの解体『Disembedding』、および反射性『Reflexivity』といった適応を余儀なくしました。

関東大震災は、集団火葬の実施を促進し、葬儀の責任を地域社会から国家機関に移管するきっかけとなりました。これは、伝統的に地域社会に根ざした権威から、政府の緊急対応への移行を反映しており、これには『Disembedding』の要素が表れています。災害現場での直接的な集団火葬の実施は時間と空間の分離『Time-space Distanciation』の要素を反映しており、一方、東京中心部での灰の池の建設は、社会が関東大震災の埋葬慣行を現代の生活に反映させたことを示しています。

次に、第二次世界大戦後、政府は埋葬サービスの資本化と標準化を推進しました。この現象は、伝統的な実践が現代の要求に適応するプロセスを反映しており、埋葬実践の権威が機関からコミュニティに戻っていく傾向を示しています。ギデنزはこの現象を再埋め込み『Reembedding』と呼んでいます。爆弾による犠牲者の数と再建努力の失敗は、より実践的で効率的な葬儀実践の必要性を強化しました。これは、公共の場での中規模の火葬実践と、さまざまな場所で遺灰の埋葬が行われる実践に反映されています。戦争後、埋葬産業は商業サービスを提供し始め、政府は埋葬儀式を標準化する規制を制定しました。この文脈で、社会は第二次世界大戦の出来事を現代的な視点から発展させる価値として反映させました。この変化は伝統的な神社の役割を変え、精神的価値が商業化される状況を生み出しました。これにより、仏教の葬儀実践に対する批判が巻き起こり、死の儀式にのみ焦点を当てた実践が問題視されるようになりました。

最後に、Covid-19 パンデミックは、葬儀サービスを通じたデジタル化とパーソナライゼーションを加速させるとともに、社会の適応プロセスにおける反射的な性質を浮き彫りにしました。技術の発展を活用することで、葬儀の慣行はよりダイナミックな方向へ変革を遂げています。技術はまた、日本の仏教教義への依存を変化させ、葬儀実践に関する権限の移譲プロセスが仏教寺院とコミュニティから葬儀社へと移行する中で、時間と空間の分離『Time-space Distanciation』が、バーチャルな葬儀サービスの登場により、埋め込みの解体『Disembedding』と、より簡素化された慣行の台頭、そしてアンソニー・ギデنزが提唱するおよび反射性『Reflexivity』を体現するサービスが現実化しています。したがって、日本の葬儀慣行の変革は、ギデنزが提唱する『モダニティの帰結』理論を支持しています。この理論では、社会は技術的進歩を活用して時代に対応します。これにより、特に日本の葬儀実践において、仏教の教義の不可避的な周辺化が生じます。

全体として、これらの危機は日本の葬儀慣行の近代化を加速させ、合理化、効率化、商品化を特徴とし、宗教システムが適応して関連性を維持する能力を示しています。

今後の研究では、日本の高齢化社会のような現代の現象が、将来の文化と葬儀慣行にどのように影響を与えるかについて、より詳細な調査が必要です。

DAFTAR PUSTAKA

- Akagawa, N., Hubbell, A. L., Rojas-Lizana, S., & Pohlman, A. (Ed.). (2020). *Places of Traumatic Memory: A Global Context*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-52056-4>
- Al Jazeera English (Direktur). (2015, Juli 31). *When I Die: Inside Japan's Death Industry* | 101 East [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=BzpmWVExQ>
- Berger, P. L. & Georgetown University (Ed.). (2008). *The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics* (Nachdr.). Ethics and Public Policy Center.
- Bernstein, A. (2000). Fire and Earth: The Forging of Modern Cremation in Meiji Japan. *Japanese Journal of Religious Studies*. <https://doi.org/10.18874/jjrs.27.3-4.2000.297-178>
- Boret, S., Hoondert, M., Post, P., Klomp, M., & Barnard, M. (2021). *Handbook of Disaster Ritual: Multidisciplinary Perspectives, Cases and Themes*. Peeters Publishers. <https://doi.org/10.2307/j.ctv28bqm06>
- Bousai.go.jp. (2024). *White Paper on Disaster Management in Japan* (White Paper, hlm. 166) [Laporan Tahunan]. Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. https://www.bousai.go.jp/en/documentation/white_paper/pdf/2023/R5_hakusho_english.pdf
- Civilian Defense Division. (1947). *Final Report: Covering Air-Raid Protection and Allied Subjects in Japan* (Final Report No. D785.U63; The United States Strategic Bombing Survey, hlm. 218). Boston Public Library; Boston Public Library. <https://www.ibiblio.org/hyperwar/NHC/NewPDFs/USAAF/United%20States%20Strategic%20Bombing%20Survey/USSBS%20Final%20report%20covering%20air-raid%20protection%20and%20allied%20subjects%20in%20Japan.pdf>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Daniell, J. E. (2014). The Socioeconomic Impact of Earthquake Disasters. Dalam *Earthquake Hazard, Risk and Disasters* (hlm. 203–236). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394848-9.00009-2>
- Daniels, G. (2004). *Collected Writings of Gordon Daniels: The Collected Writings of Modern Western Scholars on Japan* (Vol. 12). British Library Cataloguing in Publication Data.
- dictionary.cambridge.org. (2025). Futon. Dalam *Cambridge Dictionary*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/futon>
- Earhart, H. B. (1969). *Japanese religion: Unity and diversity* (3 ed.). Wadsworth Pub Co.; Trent University Librabry.

- Efanova, N. (2013). Funeral Buddhism: A Religion in Crisis. *University of Iceland*.
- Fazal, M. (2018, Juli 5). *Melayat Terasa Jauh Lebih Mudah dengan Layanan Drive-thru di Jepang* [Media]. Vice. <https://www.vice.com/id/article/bagaimana-rasanya-menjadi-orang-yang-fobia-mati/embed/>
- Fujii, M. (1983). Maintenance and change in Japanese traditional funerals and death-related behavior. *Japanese Journal of Religious Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.18874/jjrs.10.1.1983.39-64>
- General Incorporated Foundation, Japan Development Institute. (2014, April). *Sejarah Pemindahan Ibu Kota ke Tokyo dan Diskusi Selanjutnya tentang Pemindahan Fungsi Ibu Kota, dll.* [東京遷都の経緯及びその後の首都機能移転論等 Tokyo Sento no Keii Oyobi Sono-go no Shuto Kinou Iten-ron To] [Newsletter Feature]. Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/service/newsletter/pdf/77/i_02_77_2.pdf
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity* (Repr). Polity Press.
- Gould, H., Arnold, M., Kohn, T., Nansen, B., & Gibbs, M. (2021). Robot death care: A study of funerary practice. *International Journal of Cultural Studies*, 24(4), 603–621. <https://doi.org/10.1177/1367877920939093>
- Hariyadi, B. S. (2017). *The Transition of Japanese Funeral Ceremony: Cultural and Business Perspective* [Doctoral thesis, Tohoku University]. <https://tohoku.repo.nii.ac.jp/records/122979>
- Hart, C. (1998). *Doing Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. SAGE Publications, Inc.
- Ikeuchi, F. (1998). *Funeral Services in Contemporary Japanese Society: Introduction of "Self-Determination" in One's Afterlife* [Master of Arts, University of Hawaii]. University of Hawaii Library. <https://www.proquest.com/docview/2487443107?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true&sourcetype=Dissertations%20&%20Theses>
- Jisho.org. (2025). Shirei (死霊)—Jisho.org. Dalam *Jisho*. Jisho.org. [https://jisho.org/search/Shirei%20\(%E6%AD%BB%E9%9C%8A\)%20](https://jisho.org/search/Shirei%20(%E6%AD%BB%E9%9C%8A)%20)
- Kamakura Shinsho. (2021, Juli 29). **【Tindakan Pencegahan COVID-19/Secara Umum】** “Tindakan pencegahan COVID-19 dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan pemakaman” **【コロナ対策/全体】** 「コロナ対策は葬儀社への信頼度向上に重要だと思った」 [Company website]. 株式会社鎌倉新書. <https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/8874/www.kamakura-net.co.jp>

- Kamakura Shinsho. (2025). *Kamakura Shinsho, Ltd.* 鎌倉新書. <https://www.kamakura-net.co.jp/en/www.kamakura-net.co.jp>
- Karacas, C. (2006). Buckets, Bombs, and Bodies: Rights to the Japanese City & the Tokyo Air Raids. *UC Berkley: International and Area Studies, University of California*. <https://escholarship.org/uc/item/0jz9k7fs>.
- Kementerian Pendidikan Pusat Meteorologi. (2012, September 1). *Hal-hal yang berkaitan dengan tindakan yang harus diambil dalam menanggapi bencana gempa bumi 大正 12 年 (1923) 9 月 | 関東大震災：日本のあゆみ* (Arsip eksternal). National Archives of Japan Kokuritsu Kōmonsho-kan 国立公文書館; National Archives of Japan 国立公文書館. https://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/t12_1923_01.html
- Koekisha. (2020). *Langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan penyakit menular lainnya serta prosedur pemakaman [Layanan Pemakaman]*. Koekisha. <https://www.koekisha.co.jp/covid-19/flow/>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Komite Ahli tentang Warisan Bencana. (2009). *Laporan Komite Ahli tentang Warisan Bencana Pelajaran yang Dipetik Maret 2009, Gempa Besar Kanto 1923* (Laporan Bencana No. 3; Laporan Gempa Besar Kanto 1923). Cabinet Office, Government of Japan. https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1923_kanto_daishinsai_3/index.html#container
- Kondo-Arita, M., & Becker, C. B. (2023). Changing Funerals and Their Effects on Bereavement Grief in Japan. *OMEGA - Journal of Death and Dying*, 00302228231158914. <https://doi.org/10.1177/00302228231158914>
- Koshiro, Y. (2001). Japan's World and World War II. *Diplomatic History*, 25(3), 425–441. <https://doi.org/10.1111/0145-2096.00276>
- laws.e-gov.go.jp. (2022). *Hukum tentang pemakaman, penguburan, dll. | Pencarian Hukum e-Gov [Government Law]*. E-Gov. <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048>
- McLaughlin, L. (2020). Japanese Religious Responses to COVID-19: A Preliminary Report. *Asia-Pacific Journal*, 18(3), e3. <https://doi.org/10.1017/S1557466020029733>
- merriam-webster.com. (2025). Definition of OSSUARY. Dalam *Meriam Webster*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/ossuary>
- Ministry of Health, Labour, and Welfare. (2018, Desember). *Estimasi tahunan statistik vital untuk tahun 2018 | Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan [Ministry Website]*. Ministry of Health, Labour, and Welfare. <https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei18/index.html>

- Ministry of Health, Labour, and Welfare & Ministry of Economy, Trade and Industry. (2023a). *Pedoman Penanganan Jenazah dan Proses Pemakaman, Kremasi, dll. Bagi Individu yang Meninggal karena Penyakit Infeksi Virus Corona Baru dan yang Diduga Terkena Penyakit Infeksi Virus Corona Baru* (Guideline No. 4.1). https://www.mhlw.go.jp/content/001107743_240508.pdf
- Ministry of Health, Labour, and Welfare & Ministry of Economy, Trade and Industry. (2023b). *Pedoman Tentang Perawatan, Transportasi, Pemakaman, dan Kremasi Orang yang telah Meninggal atau Diduga Meninggal Akibat Infeksi Virus Corona Baru* (Guideline No. Edisi 4.1). Ministry of Health, Labour, and Welfare and Ministry of Economy, Trade and Industry. https://www.mhlw.go.jp/content/001107743_240508.pdf
- Murakami, K. (2000). Changes in Japanese Urban Funeral Customs during the Twentieth Century. *Japanese Journal of Religious Studies*. <https://doi.org/10.18874/jjrs.27.3-4.2000.336-352>
- Mutter, J. (2004). Japanese Society and the 1931 Invasion of Manchuria. *The Atlas: UBC Undergraduate Journal of World History*, 1(3), 8.
- Nakamaki, H. (1986). Continuity and change: Funeral customs in modern Japan. *Japanese Journal of Religious Studies*, 13(2–3). <https://doi.org/10.18874/jjrs.13.2-3.1986.177-192>
- National Diet of Japan. (2024). *Reskrip Kekaisaran tentang Pemulihan Ibu Kota Kekaisaran: Arsip Nasional Jepang* [Archive]. www.archives.go.jp. <https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/henbou/contents/16.html>
- NHK (Direktur). (2010, September 5). Spesial: Masyarakat Tanpa Ikatan, Kejutan 32.000 Kematian Tanpa Ikatan | Program | Arsip NHK NHK スペシャル 無縁社会～“無縁死”3 万 2 千人の衝撃～ | 番組 | NHK アーカイブス (No. Spesial) [Broadcast]. Dalam *NHK スペシャル 無縁社会～“無縁死”3 万 2 千人の衝撃～* / 番組 / NHK アーカイブス . https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009010577_00000
- nhk.or.jp. (2020, Mei). *Situasi pada saat keadaan darurat pertama* [Newsletter Feature]. <https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/emergency/>
- nichirenlibrary.org. (2025). Doushou | Dictionary of Buddhism | Nichiren Buddhism Library. Dalam *Nichiren Library*. <https://www.nichirenlibrary.org/en/dic/Content/D/110>
- Nippon.com. (2020, Juni 30). *Japan's Female Emperors*. nippon.com. <https://www.nippon.com/en/japan-data/h00753/>
- Normile, D. (2020, Mei). *Japan ends its COVID-19 state of emergency* [Newsletter Feature]. Science. <https://www.science.org/content/article/japan-ends-its-covid-19-state-emergency>

- Novaldisyah, F. M., Sulistya, S. L., Himawan, S. L., Naido, S. A., & Revianti, N. (2018, Oktober). *Zaman Meiji dan Zaman Taishō* [Publikasi Ilmiah]. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/355395030_Zaman_Meiji_dan_Zaman_Taisho
- Ohmagari, N. (2022). How did the Tokyo Metropolitan Government respond to COVID-19? *Global Health & Medicine*, 4(2), 67–70. <https://doi.org/10.35772/ghm.2022.01017>
- Picone, M. (2007). Cremation in Japan: Bone Buddhas and surrogate bodies: *Études Sur La Mort*, 132(2), 131–140. <https://doi.org/10.3917/eslm.132.0131>
- Prime Minister Office of Japan. (2020, April 16). *[COVID-19] Declaration of a State of Emergency in response to the Novel Coronavirus Disease (April 16)* [Ministry Website]. Prime Minister's Office of Japan. https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/_00020.html
- Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8. ed). McGraw-Hill. www.mhhe.com
- RKB NEWS (Direktur). (2022, Oktober 8). *Korona-ka no sougi 'kao mo mi rarezu...' mada nokoru sougi-sha no kajo taiou aisuruhito to no saigo no wakarenanoni. Yang berarti Pemakaman di tengah pandemi COVID-19: "Bahkan wajah pun tak bisa dilihat..."* コロナ下の葬儀「顔も見られず...'」まだ残る葬儀社の過剰対応 愛する人との最後の別れなのに [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=iMHN6HwBD38>
- Schencking, J. C. (2008). The Great Kanto Earthquake and the Culture of Catastrophe and Reconstruction in 1920s Japan. *The Journal of Japanese Studies*, 34(2), 295–331. <https://doi.org/10.1353/jjs.0.0021>
- Schencking, J. C. (2013). *The Great Kanto Earthquake and the Chimera of National Reconstruction in Japan* (1 ed.). Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/columbia/9780231162180.001.0001>
- Searle, T. R. (2002). It Made a Lot of Sense to Kill Skilled Workers: The Firebombing of Tokyo in March 1945. *The Journal of Military History*, 66(1), 103. <https://doi.org/10.2307/2677346>
- Shiho T. (2023). Kantoudaishinsai to ihai noukotsu-dou haka 関東大震災と遺灰・納骨堂・墓. *Tohoku Journal of Religious Studies*, 特集号, 17–30. Tohoku University Repository.
- Shiori. (2024, Desember). *Menjelaskan Era Showa dalam Istilah Sederhana! Apa Tren Makanan, Musik, Idol, dan Film pada Masa Itu?* [Publikasi informasi tentang Jepang]. FUN! JAPAN Indonesia. <https://www.fun-japan.jp/id/articles/13874>
- Sorensen, A. (2001). Urban planning and civil society in Japan: Japanese urban planning development during the “Taisho Democracy” period (1905–31). *Planning Perspectives*, 16(4), 383–406. <https://doi.org/10.1080/02665430110066884>

- Stewart, P. J., & Strathern, A. J. (2015). *The Ashgate Research Companion to Anthropology* (1 ed.). Routledge.
- Suzuki, H. (2003). McFUNERALS: The Transition of Japanese Funerary Services. *Asian Anthropology*, 2(1), 49–78. <https://doi.org/10.1080/1683478X.2003.10552530>
- Suzuki, H. (2013). *Death and Dying in Contemporary Japan* (1 ed.). Taylor & Francis Ltd.
- Suzuki, H. (2022). *The price of death: The funeral industry in contemporary Japan*. Stanford University Press.
- Tillman, B. (2010). *Whirlwind: The Air War Against Japan, 1942–1945* (1 ed.). Simon & Schuster.
- Tokyo Metropolitan Bureau of Social Welfare and Public Health. (2020, Juni 30). *Kasus Kematian Akibat Infeksi Virus Corona Baru di Tokyo* [Case]. Siaran Pers, Tokyo. https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/03_toniokeokr usibousyourei
- Tsani, T., Marlina, S., & Arum, A. K. (2024). *Systematic Literature Review: Pembelajaran dari Reformasi Birokrasi Global untuk Indonesia*.
- University of California at Berkley. (2006, Oktober 17). *JHTI—Shoku Nihongi* [Academic and research-oriented digital database]. Japanese Historical Text Initiative. https://jhti-studentorg-berkeley-edu.translate.goog/Shoku%20Nihongi.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge
- WHO. (2020a). *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic* [Portal data kesehatan internasional]. World Health Organization (WHO) COVID-19. <https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19>
- WHO. (2020b, Maret 29). *Modes of transmission of virus causing COVID-19: Implications for IPC precaution recommendations* [Health Organization]. World Health Organization (WHO) COVID-19. <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations>
- World Population Review. (2025). *5 Countries with the Highest Rate of Cremation* [Demographic/statistical reference website]. Cremation Rate by Country 2025. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/cremation-rate-by-country>
- Yamanaka, H. (2022). Religious Change in Modern Japanese Society: Established Religions and Spirituality. *Japanese Journal of Religious Studies*, 48(2), 365–382. <https://doi.org/10.18874/jjrs.48.2.2021.365-382>
- Yanase, N., Souza, F. F. de, Ochi, T., & Hosono, A. (2018). *Land readjustment: Solving urban problems through innovative approach* (First edition, Vol. 2). JICA Research Institute. <https://www.jica.go.jp/Resource/jica->

ri/publication/booksandreports/175nbg00000ltoak-
att/LAND_READJUSTMENT_web.pdf
Yokai.com. (2025, Mei). *Ikiryō*. the illustrated database of Japanese folklore.
<https://yokai.com/ikiryō/?srsltid=AfmBOoqceQ2LbkoDygfOpZuYIdaHWzoNTv0PPuswseGcYh7fMRCucrGB>

DATA PRIBADI

Profil Pribadi

Nama : Rahmalia Azzahra
NIM : 13020221140079
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 16 Oktober 2002
Alamat : Jl. A. Chatib Komplek Pemda Bukit Indah No.68 Rt.14,
Telanaipura, Kota Jambi
E-mail : rahmaliaazzahra11@gmail.com
Nomor Hp : 081270773838

Riwayat Pendidikan

1. SD IT Al-Azhar Jambi (2008 - 2014)
2. SMPI Nurul Fikri Boarding School Serang (2014 - 2017)
3. SMA PU Al-Bayan Putri Selabintana (2017 - 2020)

Riwayat Organisasi

1. Ketua Biro Kantor Media dan Informasi BEM FIB Undip (2023)
2. Staf Muda Kantor Media dan Informasi BEM FIB Undip (2022)

Riwayat Kepanitian

1. Staf Koordinator Lapangan ODM UNDIP (2023)
2. Divisi media FIB Mengajar (2022)
3. Staf Publikasi, Dokumentasi, dan Dekorasi EXPORIA (2022)
4. Mentor Pendidikan Karakter FIB (2022)